HARVARD
3 2044

enes Reagen Ijie, SE

# KONGRES RAKYAT PAPUA II

## *Merupakan Resolusi Dasar Menuju Papua Merdeka*

HD





**Suatu Refleksi**
**Tentang Aspirasi dan Tuntutan Papua Merdeka**

*Kata Pengantar : Dr. Muchtar Pakpahan*

Origenes Reagen Ijie, SE

# KONGRES RAKYAT PAPUA II

## MERUPAKAN RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

PT. Bumi Intitama Sejahtera
Jakarta, 2003

sependapat terhadap beberapa hal yang dikemukakan. Tetapi saya setuju ia mengemukakannya secara tertulis, sehingga dari apa yang sudah dikemukakan tersebut, dapat dicari solusi yang terbaik.

Beberapa hal yang tidak sesuai dengan metode dan sistematika penulisan ilmiah yang dikemukakan di dalam buku ini misalnya, sering melakukan pengulangan data dan pernyataan. Namun saya pikir, dengan seringnya melakukan pengulangan, ia ingin menegaskan kembali apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Seperti berulang kali mengatakan pernyataan kemerdekaan yang disampaikan rakyat Papua dan berulang kali mengungkapkan kekejaman tentara Indonesia, dimana pengulangan ini dilakukan hampir di semua bab. Tentu hal ini tidak sesuai dengan metode penulisan yang benar. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, mungkin hal-hal inilah yang membuat hatinya gundah, yang membuat batinnya bergejolak dan intelektualnya berkecamuk, dan inilah yang ingin dia kemukakan.

Berikutnya, apa yang tertuang di dalam buku yang ditulis Saudara Ijie ini merupakan perwakilan dari keinginan sebagian, atau sebagian besar rakyat Papua. Oleh karena itu semua pihak yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama pihak pengambil keputusan bagi Negara Kesatuan, setelah membaca buku ini agar merenungkan isinya baik-baik. Hentikanlah pendekatan keamanan, hentikanlah penindasan-penindasan di masa depan, kalau Papua diharapkan untuk terus menjadi bagian dari NKRI.

Lewat pengantar ini, ada satu hal yang tidak saya setujui, yaitu kalau Papua berpisah dari NKRI. Tetapi sebagai seorang sosial demokrat, saya tidak akan memaksa Papua untuk menjadi bagian Indonesia. Kalau orang Papua masih terus ingin merdeka seperti sekarang ini, secara moral dan secara legal, yang dapat kita buat jalan keluarnya adalah melalui referendum. Namun biarlah rakyat Papua melakukan referendum ketika mereka dalam keadaan tenang, di

tengah suasana damai bukan dalam keadaan emosi tetapi berpikir secara tenang. Bagi saya sebagai seorang sosial demokrat, masalah kemanusiaan menjadi lebih utama dibandingkan masalah kebangsaan. Tetapi saya tetap berusaha agar Papua tidak lepas dari Indonesia. Inilah beberapa butir yang saya sampaikan.

Saya menyambut penulisan dan penerbitan buku ini. Kepada para pembaca, saya anjurkan agar lebih peduli kepada substansi yang disampaikan ketimbang metode penulisan ilmiahnya. Kepada penulis saya berharap setelah membaca buku ini, dapat menemukan sendiri kelemahan-kelemahan metode penulisan dan melakukan perbaikan. Sehingga buku ini diterbitkan untuk terbitan kedua, pembaca telah dapat menemukan perbaikan dalam metode dan sistematika penulisannya, sesuai dengan sebuah karya ilmiah pada umumnya.

Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang banyak mendapat kritik dari buku ini, khususnya birokrat , militer dan kepolisian, agar jangan melakukan tindakan yang semakin represif. Tetapi saya menghimbau untuk merenungkan isi buku ini baik-baik dan lakukanlah pendekatan yang lebih persuasif dan manusiawi. Semakin represif dan semakin securitif cara-cara pendekatan yang dilakukan, maka akan semakin kuat pula keinginan rakya Papua untuk merdeka.

**Jakarta, Mei 2003**

**Dr. Muchtar Pakpahan**

# PRAKATA

Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dan hasil penelitian penulis tentang akar masalah menguaknya bara pergolakan di Papua sepanjang sejarah bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana daerah ini terus menjadi suatu *trouble pot* yang dapat menumpahkan darah dan nyawa.

Rasa kekecewaan yang terpendam begitu dalam dan luka psikologis sebagai kawasan yang sekian lama terpinggirkan ternyata telah memupukan sejumlah bara api dalam sekam setiap saat siap terbakar dan meletus menjadi ledakan konflik dan kekerasan yang berskala luas.

Tuntutan dan aspirasi Papua merdeka bukan hal baru yang semata-mata dapat disebabkan oleh masalah ketidakadilan, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM dan ketimbang pembagian pendapatan antara Jakarta-Papua, tetapi masalah tuntutan dan aspirasi Papua merdeka adalah suatu pertaruhan terhadap hak asasi politik yang menyangkut harga diri *(pride)* dari suatu komunitas sosial yang berada di muka bumi pada suatu bangsa, yang nama bangsa Papua Barat yang pernah merdeka dan memiliki sebuah negara yang "berdaulat" sebagai sebuah *modern nation state* yang diproklamirkan pada tanggal 1 Desember 1961 di Port Numbay oleh Niew Guinea Raad yang lengkap sebagai unsur persyaratan

berdirinya suatu negara seperti adanya luas wilayah yang meliputi Sorong-Merauke, adanya pemerintahan dan adanya alat kelengkapan negara antara lain: bendera Bintang Kejora; lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua"; lambang negara Burung Mambruk; TNP yang meliputi PIS dan PVK; Mata Uang IB; serta pengakuan oleh negara lain terutama bangsa dan pemerintah Indonesia.

Buku ini dalam fokus pembahasannya pada pencarian akar masalah yang fundamental dan tawaran Resolusi KRP II atas gejolak serta ledakan kekerasan yang terjadi Papua sebagai produk dan dampak dari kekeliruan fatal negara yang menempatkan daerah Papua sebagai subordinasi kekuasaan sentralistrik dan daerah DOM Pemerintah Indonesia.

Kemerdekaan bangsa Papua Barat yang pernah ada pada tanggal 1 Desember 1961 merupakan hak asasi politik dan harga diri bangsa Papua sebagai sebuah komunitas sosial pernah memiliki kedaulatan sebagai *"modern nation state"* yang dianeksasi oleh pemerintah RI lewat komando Trikora tanggal 19 Desember 1961 oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno, maka otomatis aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua tidak cukup hanya dengan mengubah pendekatan pembangunan dengan menerapkan otonomi khusus tetapi bagaimana melakukan pendekatan dialogis secara bertahap sehingga tercipta *"win win solution"* karena proses dialog maupun pengakuan kedaulatan berdirinya suatu negara merdeka merupakan kebutuhan hakiki dari proses demokrasi.

Dalam penerbitan buku ini, saya ingin tegaskan bahwasanya penulisan sebuah buku dapat memenuhi syarat metodologis ilmiah akademis bagi sebuah karya tulis namun pada prinsipnya saya berupaya untuk meletakannya pada prinsip-prinsip metodologi deskripsi-eksloratif.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bpk. Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat

B. Otonomi Khusus Versus Merdeka 61
C. Timor Timur Jajak Pendapat harus Belajar dari Papua 64
D. Timor Timur Merdeka Papua Pun Merdeka 68

BAB IV EKSPLORASI DAN EKPLOITASI SERTA PEMBANGUNAN PAPUA
A. Eksistensi Freeport di Papua 79
B. Pemberdayaan Masyarakat Papua 83
C. Nasib Orang Papua 84

BAB V MEMAHAMI TUNTUTAN PAPUA MERDEKA
A. Integrasi Nasional 91
B. Aksi Pengibaran Bintang Kejora 101
C. Tuntutan Papua Merdeka 113

BAB VI KONGRES MENUJU PAPUA BARU
A. Masa Depan Rakyat dan Bansa Papua 129
B. Kongres Rakyat Papua II 136
C. Arti Dialog 140
D. Resolusi 142

# BAB I

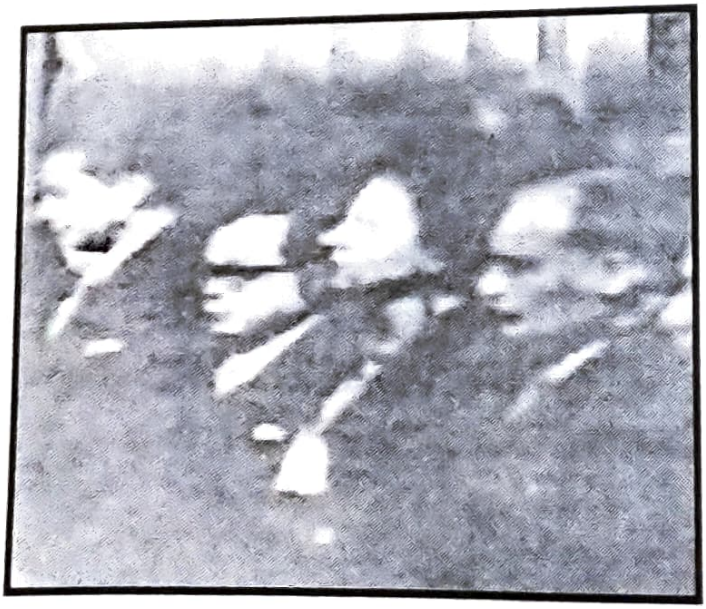
# AKAR SEJARAH PERGOLAKAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA



Suasana Sidang BPUPKI Tanggal 18 Agustus 1945 tentang status politik Papua Barat



Interupsi menjelang Pepera Tahun 1969



Sidang penandatanganan New York Agreement di Markas Besar PBB New York (15 Agustus 1962), tanpa melibatkan orang Papua.

# BAB I

# AKAR SEJARAH PERGOLAKAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

## A. LATAR BELAKANG

Gugatan dan tuntutan Papua merdeka dari dan oleh masyarakat Papua Barat (penduduk asli) terus menggema sejak awal integrasi wilayah Papua Barat ke wilayah RI. Tuntutan itu mencapai klimaks sejak tahun 1998, yaitu awal bergulirnya arus reformasi pada bulan Mei 1998. Bintang Kejora, Bendera Kebangsaan Papua Barat telah dikibarkan di 13 kabupaten di provinsi Papua bahkan sampai ke desa-desa. Demikian pula wakil-wakil rakyat Papua Barat dari semua Kabupaten yang jumlahnya 100 orang atau dikenal Tim 100 orang secara bulat telah menyampaikan aspirasi Papua merdeka kepada Pemerintah Indonesia melalui Presiden B.J. Habibie di Jakarta tanggal 26 Februari 1999. Presiden melalui Tim 100 tersebut meminta masyarakat Papua Barat agar merenungkan kembali tuntutan tersebut.

Demikian catatan sejarah dapat memperlihatkan bahwa proses integrasi

Papua Barat ke wilayah RI ternyata tidak mulus. Sebelum integrasi yaitu tepat tanggal 1 Desember 1961, rakyat Papua telah menyatakan kemerdekaannya yang ditandai dengan pengibaran bendera kebangsaan Bintang Kejora. Lewat berbagai strategi dan pendekatan yang melibatkan pemerintah Belanda-Indonesia dan PBB, wilayah dan masyarakat Papua Barat yang telah menyatakan kemerdekaannya diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia tanggal 1 Mei 1963 melalui New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Hal tersebut telah menimbulkan perlawanan dan berbagai protes keras dari seluruh orang Papua. Isi dan corak perlawanan tersebut menggambarkan bahwa tuntutan dan aspirasi OPM telah berlangsung dalam suatu semangat nasionalisme Papua. Pada tingkat dan titik ini aspirasi dan tuntutan Papua merdeka memiliki akar sejarah dan ideologi yang terus diperjuangkan baik secara diplomasi maupun kontak senjata secara fisik dengan TNI. Perlawanan dilakukan secara bergerilya dan disosialisasikan ideologi tersebut kepada masyarakat Papua yang masih terisolasi.

Dari hasil penelitian penulis dapat dicatat beberapa peristiwa penting antara lain :

1. Pada tahun 1946 Konferensi Malino untuk membicarakan status politik Papua Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun ditentang oleh John Ariks dan meminta agar Papua hendaknya merdeka sendiri.
2. Pada tahun 1948 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), agar memasukkan Papua Barat, pasal 2 ayat f, sebagai bagian dari negara RIS.
3. Pada tahun 1955 Papua masuk sebagai anggota Pasifik Selatan.
4. Pada tahun 1950 - 1957 dibentuklah Dewan Distrik.

5. Pada bulan Januari 1961 Belanda mengijinkan pembentukan partai-partai politik.
6. Pada tahun 1961 - 1963 aneksasi kenegaraan.
7. Pada tahun 1963 - 1969 pemerintahan sementara PBB.
8. Pada tahun 1969 - 1998 Hari Berkabung Nasional Bangsa Papua.
9. Pada tahun 1998 sampai sekarang Hari Kebangkitan Nasional Bangsa Papua.

## B. AKAR MASALAH

Unsur-unsur akar masalah yang melatarbelakangi munculnya tuntutan Papua merdeka di Papua dapat dideskripsikan sebagai berikut :

### 1. Latar Belakang Sejarah

Pendapat dari para responden baik dari hasil diskusi maupun interview (wawancara), dari komunitas Papua maupun komunitas pandatang dapat menunjukkan bahwa tuntutan Papua merdeka merupakan perjuangan yang sudah lama berlangsung karena sejarah komunitas Papua Barat adalah sejarah penjajahan.

Beberapa fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Papua Barat tidak ada kantongan dengan NKRI antara lain :

a. Netherlansch Niew Guinea atau Papua Barat tidak termasuk wilayah Hindia Belanda adalah berdasarkan Deklarasi Batavia pada tanggal 7 Maret 1910 yang isinya antara lain "Wilayah Hindia Belanda dari Aceh sampai

Maluku " yang berada di bawah kekuasaan Gubernur Hindia pada saat itu. Sedangkan Netherlansch Niew Guinea bernama Suriname (langsung di bawah pengawasan Pemerintah Belanda di Netherlansch.

b. Dalam pergerakan kebangsaan yang dimulai pada tahun 1908 di bawah Budi Utomo dan mencapai puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, tak seorang pemuda Papua yang ikut terlibat atau ambil bagian pada pergerakan tersebut.

c. Secara fisik dan budaya orang Papua berbeda dari masyarakat Indonesia yang lainnya. Dan hal tersebut diakui oleh Drs. Muhammad Hatta dalam mempertimbangkan batas-batas wilayah Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

d. Dalam pertemuan di Saigon Jepang tanggal 12 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Dr. K.R.I Radjiman Widyoningrat dan Jenderal Haisaichi Taraci mengatakan bahwa ia akan menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda saat itu, sekaligus mengajukan pertanyaan tentang status tanah dan rakyat Papua. Drs. Muhammad Hatta dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua dapat menentukan nasibnya dan masa depannya sendiri. Sedangkan menurut Ir. Soekarno, bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta yang tidak memberikan pendapat untuk masalah Papua pada sidang ke II BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah Indonesia yang akan segera memperoleh kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan pandangan

anggota BPUPKI yang lain seperti Muhammad Yamin, Moezakir, Abdul Kaffar dan Soemitro Kolopaking, sedangkan orang Papua pada umumnya menolak pandangan BPUPKI yang menghendaki agar tanah Papua masuk wilayah NKRI.

Menurut orang Papua klaim dengan memakai konsep Janggi sebagai sebutan untuk orang Papua dalam sejarah kerajaan Majapahit dan kesultanan Tidore dinilai tidak tepat, mengapa? Karena alasan utama yang dikemukakan bahwa sifat dan pola hubungan pada waktu itu adalah hubungan dagang melalui VOC. Sultan Tidore representatif wakil kontingen Belanda.

Yang menjadi pertanyaan rakyat Papua selama ini adalah, apakah Netherlansch Niew Guinea termasuk Hindia Belanda menggambarkan bahwa Papua Barat bukan wilayah Hindia Belanda secara administratif?

Masyarakat Papua tidak ikut ambil bagian dalam proses Proklamasi 17 Agustus 1945, sedangkan Papua Barat menjadi menarik perhatian Indonesia setelah 3 tahun merdeka yaitu pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengembangkan propaganda dan memasukan infiltran ke Papua Barat. Untuk pendapat dan fakta ini, orang Papua mengacu pada fakta-fakta antara lain :

1. Tokoh Sugoro di kota Nica, Sentani
2. Boven Digul atau tokoh hasil binaan pemerintah Indonesia yang pro NKRI dan dikenal dengan sebutan *Kelompok Merah Putih* pada tahun 1948, Indonesia mulai melakukan upaya-upaya untuk merebut Papua Barat, maka Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk merdeka, hal tersebut dapat dibuktikan dengan :
   a. Berdirinya partai-partai politik pada tahun 1957 terbentuklah Dewan Distrik yang dapat menghimpun tokoh masyarakat, tokoh adat dan

tokoh agama di tiap-tiap distrik.

b. Terbentuklah Niew Guinea Raad atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

c. Proses tersebut telah mencapai puncaknya lewat Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961 dan menurut orang Papua negara baru ini bukan negara boneka buatan Belanda, karena telah melalui proses yang panjang dan sudah memiliki sejumlah perlengkapan atribut kenegaraan. Selain Dewan Distrik dan Niew Guinea Raad juga perangkat kenegaraan lainnya seperti :

- Memiliki Bendera Nasional, Bintang Kejora;
- Lagu Kebangsaan, Hai Tanahku Papua;
- Dasar Negara, Kasih;
- Lambang Negara, Burung Mambruk;
- 149 pasal UUD
- Mata uang negara Rupiah Irian Barat (IB)

Pandangan orang Papua Barat tentang kemerdekaan tersebut telah mewujudkan program dekolonialisasi dari PBB bagi daerah-daerah di wilayah pasifik, termasuk Papua Barat yang belum merdeka sebelumnya.

Namun kenyataan pahit yang dirasakan oleh rakyat Papua Barat yaitu kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang memakan banyak korban, waktu, tenaga, harta bahkan nyawa hanya bisa berlangsung selama 18 hari yaitu tepatnya tanggal 19 Desember 1961 Ir. Soekarno mengumumkan seruan Trikora yang isinya antara lain :

1. Bubarkan pembentukan negara boneka Papua Barat buatan kolonial Belanda.

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Papua Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah mobilisasi umum untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Namun sekitar dua bulan kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 1963 Niew Guinea Raad mendeklarasikan prosedur penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat. Berbagai kelompok dalam Niew Guinea Raad menuntut plebisit pada tahun berikutnya. Pada tahun 1963 dengan bantuan Korps Perdamaian PBB, pemerintahan Netherlansch Niew Guinea mengalihkan administrasi pemerintahan kepada UNTEA di bawah pimpinan Djalal Abdon. Tentara Indonesia di bawah Korps perdamaian PBB (UNTEA) yang memaksa pemimpin-pemimpin Papua untuk menandatangani pernyataan pencabutan kembali deklarasi hak menentukan nasib sendiri, bahkan menangkap, menahan dan menyiksa orang-orang Papua yang mengorganisir demonstrasi untuk meminta plebisit di bawah bantuan Korps perdamaian UNTEA/PBB. Belum lagi permintaan atau tuntutan plebisit dipenuhi, UNTEA mengalihkan administrasi pemerintahan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Bersamaan dengan itu Niew Guinea Raad dibubarkan dan digantikan dengan DPR serta sebulan sebelumnya yaitu pada bulan April 1963, Ellieser Jan Bonay salah seorang anggota Niew Guinea Raad, diangkat sebagai gubernur pertama. Namun setahun kemudian pada bulan Mei 1964, ia dipecat.

Setelah penyerahan, perjuangan rakyat Papua untuk mempertahankan kemerdekaan yang ditandai 1 Desember 1961 secara demokratis terus berlangsung di satu pihak tetapi senantiasa mendapat perlakuan yang kejam dari tentara Indonesia di lain pihak. Akibatnya Partai Nasional Indonesia

mengirim surat protes kepada Presiden Soekarno atas perlakuan tentara Indonesia terhadap masyarakat Papua. Namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan dan perhatian oleh pemerintah Indonesia, bahkan kegiatan-kegiatan politik, kebebasan berkumpul dan hak-hak sipil masyarakat dicabut melalui Dekrit Presiden Nomor 11 Tahun 1963 dan tanah Papua dinyatakan sebagai daerah tertutup bagi pihak asing.

PBB, dalam hal ini UNTEA di Papua Barat, di mata orang Papua pada saat pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, berpihak kepada persekongkolan antara Amerika-Indonesia, yaitu integrasi Papua ke dalam NKRI. Adapun alasan orang Papua dengan keberpihakan Amerika-Indonesia adalah sebagai berikut :

a. *New York Agreement* tidak memberikan tempat yang memadai bagi prosedur-prosedur pelaksanaan penentuan nasib sendiri yang dikehendaki oleh masyarakat Papua.
b. Deklarasi oleh Niew Guinea Raad yang harus diimplementasikan dalam plebisit yang dituntut ataupun *act of free choice*.
c. Bahwa persyaratan deklarasi 16 Februari 1962 mendapat tempat yang layak dalam *New York Agreement*, tetapi tidak dilaksanakan/diterapkan dalam Pepera 2 Agustus 1969.
d. Pepera tidak menjalankan syarat azas *one man one vote*.
e. Prosedur Pepera berlangsung secara ketat di bawah pengawasan tentara.
f. Dari wakil-wakil yang ditentukan sebanyak 1.025 orang, hanya 20% atau kurang orang yang memilih.
g. Pelaksanaan Pepera tidak sesuai *New York Agreement* pasal XVII, XVIII dan XXII

h. Ortizan juga menyatakan keberatan terhadap proses pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam penelitian ini para responden dapat menyatakan bahwa ketidakjujuran bukan hanya berlaku pada saat pemilihan, tetapi juga pada saat sosialisasi menjelang Pepera 1969. Sebagai contoh, seorang responden yang menyaksikan sambutan utusan UNTEA di Wamena menjelaskan bahwa terjemahan sambutan dimaksud diselewengkan menjadi seolah-olah sang utusan sedang berkampanye bagi kepentingan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah Sabang sampai Merauke. Orang Indonesia dapat memegang *kampak batu di tangan kiri* dan *kampak besi di tangan kanan* dan bertanya, *"Saudara-saudara mau menerima kampak yang mana, yang sebelah kiri atau kanan?"* Dan dijawab oleh masyarakat, *"Yang sebelah kanan!"* Mendapat berbagai macam tawaran menarik seperti itu, maka masyarakat Papua menjawab, *"Kami mau kampak yang sebelah kanan"*, menurut responden tersebut hal itu menunjukkan adanya manipulasi.

Gambaran di atas saat ini telah disosialisasikan secara luas di kalangan orang Papua sehingga gugatan Papua merdeka senantiasa memiliki hubungan erat dengan unsur sejarah yang terkait dengan hasil Deklarasi 1 Desember 1961, dan telah menjadi dasar bagi rakyat Papua untuk meminta kembali kemerdekaannya.

## 2. Nasionalisme dan Identitas Papua

Masyarakat dan bangsa Papua Barat secara fisik maupun sosial berbeda dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Kalau mayoritas orang Indo-

nesia tergolong rumpun Melayu yang berasal dari daerah "Yunan, Cina Selatan" (Kamboja), maka secara fisik orang Papua termasuk rumpun Melanesia ras Negroid di Pasifik. Selain itu secara sosial orang Papua merasa memiliki pandangan dan cara hidup tersendiri yang sangat berbeda dari mayoritas rakyat Indonesia di tempat-tempat atau provinsi-provinsi lain, karena orang Papua memiliki sifat khas dalam mengatur, mengembangkan kebutuhan dan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewajiban adat dari para individu itu sendiri, sehingga mereka merasa sulit untuk bertemu dalam satu NKRI seperti yang sekarang ini.

Praktek-praktek diskriminatif dari pendatang telah mendukung dan atau membenarkan pandangan tersebut. Praktek diskriminatif yang dimaksud antara lain:

a. Adanya menopoli di bidang ekonomi (pasar).
b. Promosi jabatan.
c. Urusan kenaikan pangkat di instansi pemerintahan sipil dan militer.
d. Eksploitasi hasil kekayaan alam yang menempatkan mereka sebagai penonton, sementara pendatang menjadi karyawan utama padahal masyarakat Papua lah pemegang hak adat.
e. Dalam bidang politik dan pemerintahan, posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar atau pendatang dengan dalih orang Papua belum mampu.

Salah seorang responden pemerintah Kabupaten Sorong mengatakan bahwa dari 23 Dinas Otonom Kabupaten Sorong hanya 5 orang Papua yang menjabat menjadi kepala dinas, dan 12 kantor vertikal hanya 2 orang kepala kantor. Serta di lingkungan Setda Kabupaten Sorong dari 14 bagian hanya 5

bagian yang dipimpin oleh orang Papua dan 9 bagian oleh orang non Papua, apalagi di kalangan swasta, orang Papua lebih tertindas lagi.

Diskriminasi tersebut secara tidak langsung turut mendapatkan perhatian dan sorotan dalam diskusi-diskusi sehubungan soal identitas Papua di samping pokok ketidakadilan. Penindasan terhadap masyarakat Papua dengan identitas khusus pada masa TRIKORA-UNTEA dan menjelang Pepera 1969 merupakan bagian dari proses yang mematangkan evolusi nasionalisme Papua yang merupakan bagian dari orang Papua. Bagi orang Papua, tuntutan identitas dan menguatnya nasionalisme Papua adalah proses panjang dari tahun 1946, saat **John Ariks** berkampanye menolak pikiran integrasi Papua ke dalam NKRI sampai 26 Februari 1999 saat 100 orang tokoh masyarakat Papua dapat menyampaikan aspirasi tuntutan merdeka kapada Persiden B.J. Habibie dan sejumlah menteri Kabinet Reformasi. Rasa solidaritas dan nasionalisme Papua yang kuat dapat disebabkan oleh:

a. Adanya praktek dan ideologi penjajahan.
b. Praktek ideologi pembangunan yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan pembangunan, kesejahteraan dan martabat manusia.
c. Eksplotasi dan penindasan oleh militer
d. Papua Barat memiliki tanah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah namun rakyatnya miskin.

### 3. Ketidakadilan

Sudah 40 tahun masyarakat Papua berintegrasi dengan Indonesia dan merasakan adanya suatu perlakuan secara tidak adil. Hal ini menimbulkan

semakin kuatnya sikap keberatan masyarakat Papua untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonsia. Terhadap faktor sejarah identitas, nasionalisme Papua, dan ketidakadilan, beberapa responden berpendapat bahwa tanah dan masyarakat Papua ibarat anak perempuan yang dipaksa kawin dengan laki-laki (NKRI) oleh orangtua (AS dan Belanda). Kini laki-laki itu berbuat sewenang-wenang, dan sang isteri minta cerai dan kembali ke orangtuanya karena bukan saja ia tidak cinta tetapi gagal mengidonesiakan Papua karena ketidakadilan. Perlakuan yang tidak adil ini dikemukan oleh para responden dengan mengacu pada faktor yang berkaitan dengan aspek-aspek :

**a. Ekonomi yaitu eksploitasi SDA**

Pembangunan yang hanya mengejar kemajuan material dan kemajuan fisik dengan memakai indikator ekonomi semata-mata, telah menempatkan manusia pada posisi marginal di Papua Barat. Pembangunan banyak diarahkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) seperti tanah, hutan, tambang dan laut untuk kepentingan umum yang kurang jelas penggunaannya, sedangkan untuk kepentingan masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA justru kurang mendapat perhatian yang layak.

Eksploitasi SDA selama ini telah menampilkan suatu ketidakadilan berdasarkan fakta bahwa masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA tidak dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh penduduk asli bukan oleh pengambil keputusan. Sebaliknya agen-agen pembangunan yang

mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang tidak memadai terhadap hak-hak di satu pihak dan tidak memikirkan alternatif sebagai penduduk asli di lain pihak.

Dalam kasus pengalihan hak atas tanah untuk keperluan transmigrasi yang mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya sumber-sumber ekonomi keluarga. Di Merauke misalnya masyarakat kehilangan binatang buruan sebagai sumber protein, kayu untuk bangunan, kayu bakar, rusaknya ekosistem lokal sebagai sumber protein yang mendukung kehidupan masyarakat lokal dan hilangnya sagu sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat Moi di Katapop, masyarakat Moswaren, Mogatemin dan Inanwatan Kabupaten Sorong. Hal ini juga berlaku untuk kasus HPH di Sorong, Merauke, Serui, Nabire, Jayapura dan Manokwari. Eksploitasi juga memberi dampak negatif yang besar buat penduduk lokal, kasus Freeport contohnya, limbah teling telah mencemari sumber-sumber ekonomi seperti Moluska (STK) sumber protein masyarakat Komoro Sempan di Omawita. Contoh ini berada di luar areal konsesi, lalu bagaimana halnya dengan hasil masyarakat di dalam areal konsesi?

Eksploitasi sumber daya laut seperti di Biak, Sorong, Merauke dan Fak Fak juga telah merusak ekosistem dan mengganggu populasi ikan. Penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya. Tuduhan GPK/OPM ini dijadikan stigma supaya orang Papua dapat dihambat untuk memiliki akses di pemerintahan dan jika mereka bereaksi, maka mereka dapat ditangkap untuk diinterogasi, disiksa atau bahkan dibunuh demi suatu proyek yang menaikan kegiatan atau anggaran militer di Papua.

Dominasi masyarakat pendatang bukan hanya pada sektor pemerintahan saja tetapi juga pada sektor swasta. Pada kegiatan sektor perbankan banyak didominasi oleh pekerja dari masyarakat pendatang. Misalnya Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya di seluruh tanah Papua, PDAM, PLN, Telkom dan Pertamina. Demikian pula pada sektor industri manufaktur yang memanfaatkan eksploitasi SDA sebagai bahan baku yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar, seperti yang terjadi di pabrik playwood PT. Wapoga, PT. Henrison, PT. Timber Group, PT. Usaha Mina Sorong, pabrik pengalengan ikan di Biak dan Sorong serta PT. Liem Sari di Jayapura.

Jika kondisi itu dipertanyakan, maka jawaban lazimnya adalah orang Papua belum siap. Tetapi kenapa belum dan bagaimana menyiapkan itu sejauh ini belum mendapat perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan.

Dominasi dan tekanan-tekanan tersebut makin mematangkan nasionalisme Papua dan memungkinkan tuntutan Papua merdeka makin gencar di jaman reformasi.

## b. Dominasi Pendatang

Perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat Papua juga terjadi dalam proses-proses politik pada umumnya, dan pemerintahan pada khususnya. Sadar atau tidak sadar, selama 40 tahun orang Papua kurang diberikan suatu peran sebagai *decision maker* dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi pembangunan dan lain-lain. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Dalih dan seleksi yang

dikenakan terhadap orang Papua tersebut dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai OPM.

Dalam penelitian penulisan ini, ditemukan seorang responden yang kapasitasnya sebagai pimpinan Parpol pemenang Pemilu 1999, seorang politikus senior yang juga tokoh gereja menyatakan bahwa, terdapat kepentingan politik dari sejumlah elite di pemerintahan yang menginginkan agar penduduk asli tidak memiliki akses dan duduk di pemerintahan serta tidak bersuara untuk membela hak-hak dan kekayaan sumber daya alamnya dengan menggunakan tuduhan OPM/GPK.

Lebih menyakitkan lagi yaitu setelah reformasi bergulir dan lahirnya partai-partai politik yang menjamur di tanah Papua, banyak orang Papua tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin partai politik terutama partai-partai reformis, contoh PDI Perjuangan dari 13 DPC di Provinsi Papua, hanya 3 DPC yang dipimpin oleh orang Papua asli dan 10 DPC lainnya dipimpin oleh orang luar.

### c. Dominasi dan Penindasan Budaya

Unsur luar pertama yang berpengaruh terhadap aspek sosial budaya masyarakat Papua adalah gereja. Penyebaran Injil oleh Gereja Kristen yang dipertentangkan secara frontal dengan akar-akar budaya masyarakat Papua telah meniadakan atau menghancurkan beberapa akar budaya. Pengembangan sumber daya manusia memang secara gencar dilakukan oleh gereja tetapi diarahkan kepada kepentingan budaya Kristen.

Pasca berikutnya adalah kekuasaan pemerintah Indonesia melalui para

petugas negara yang datang dan migran spontan dari luar Papua. Sebagai agen-agen pembangunan, mereka melihat dan mengukur budaya orang Papua dari sudut budaya, kepentingan dan ideologi pembangunan. Unsur kebudayaan lokal menjadi salah satu sasaran yang harus diamankan supaya sesuai dengan kepentingan budaya dan ideologi yang dianut.

Kepentingan modern juga diinstruksikan kepada masyarakat Papua untuk menggantikan kepemimpinan tradisional dan diharapkan membawa dampak positif bagi penduduk lokal. Tetapi yang terjadi justru menjadi sumber malapetaka, karena banyak hal yang menjadi amburadul, padahal pada masa sebelumnya, kepemimpinan adat telah menciptakan ketertiban.

Kesimpulannya pembangunan sumber daya manusia justru tidak berpijak pada pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap ekosistem orang Papua, tokoh seperti **Arnold Ap** berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur budaya lokal namun penguasa militer melihat hal ini secara sempit dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika dan dipahami sebagai ancaman, makanya Arnold AP dibunuh dengan cara-cara yang melukai hati orang Papua khususnya kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut menjadi identitas dan nasionalisme Papua semakin mantap untuk menopang tuntutan Papua merdeka.

## d. Kekerasan Militer

Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk antara lain: intimidasi, teror, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer, berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas

sumber daya alam secara paksa untuk berbagai keperluan seperti HPH, transmigrasi, pertambangan dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Pembunuhan umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang militan memperjuangkan demokrasi, hukum, budaya dan kemanusiaan termasuk tuntutan Papua merdeka. ***Free Papua Movement*** **(FPM)** mencatat adanya pembunuhan masal dalam kurun waktu dari tahun 1961-2002 dan dinyatakan terbunuh dan hilang telah mencapai ratusan ribu jiwa.

## C. PERSEPSI

Persepsi komunitas masyarakat di Papua berdasarkan diskusi yang terfokus pada wawancara yang mendalam serta dokumen yang relevan dengan akar masalah dapat dikelompokkan menjadi :

### 1. Penduduk asli

Seluruh responden penduduk asli Papua dalam pandangannya menyatakan menghendaki merdeka. Menurut mereka tuntutan merdeka merupakan hak dan sudah dicapai pada tanggal **1 Desember 1961** sebagai hari **Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat**. Artinya, perjuangan dan tuntutan merdeka sudah ada sejak lama dan merupakan hak yang sudah dirampas (aneksasi) secara paksa melalui proses aneksasi oleh pemerintah Indonesia. Proses integrasi atau masuknya Papua Barat ke dalam NKRI melalui Pepera tahun 1969 adalah hasil rekayasa yang penuh dengan tekanan dan

paksaan dari pemerintah Indonesia. Mereka memiliki catatan tentang tiga peristiwa sejarah penting yaitu :

a. Pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai Hari Kematian Negara Papua Barat melalui aksi Trikora.
b. Pada tanggal 1 Juli 1971 sebagai Hari Kebangkitan Nasional Papua Barat.
c. Pada tanggal 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Negara Papua Barat.

Rakyat Papua akan terus berjuang dan menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat sebagai suatu keharusan. Mereka sangat tidak percaya dengan berbagai tawaran yang diajukan Pemerintah Indonesia bahkan dari mereka sudah tidak percaya dan tidak sabar lagi dengan bentuk upaya damai yang melelahkan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat.

## 2. Masyarakat Pendatang

Responden dari kelompok pendatang terbagi dalam tiga persepsi yaitu yang bersikap mendukung, netral dan menentang Papua merdeka antara lain:

a. Kelompok pendatang yang mendukung gerakan Papua merdeka adalah mereka yang orang tuanya sebagai penginjil dan guru pada masa awal atau pertama kali di kala Papua masih primitif (pelopor) dan mereka yang berketurunan Tionghoa (Cina).
b. Sebagian besar dari kelompok pendatang pula yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah, mereka memahami mengapa mereka atau penduduk asli menuntut merdeka serta terdapat pula kelompok yang merasa tidak berkepentingan (tidak peduli) apakah Papua Barat mau

merdeka atau tidak, yang penting tidak ada tragedi kemanusiaan atau kerusuhan sosial yang menimpa mereka. Artinya bagi mereka, apapun sebabnya sepanjang akibatnya tidak membuat mereka menjadi korban kerusuhan sosial tidak akan ditentang.

c. Sebagian kecil dari kelompok pendatang terutama yang status sosial ekonomi menengah ke atas bersikap menentang tuntutan kemerdekaan Papua dengan alasan bahwa kalaupun benar Pepera dilakukan dengan penuh rekayasa namun secara yuridis formal Papua telah sah secara nasional maupun internasional menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### 3. Elite Gereja, Intelektual (Papua dan Pendatang) LSM dan Pers

Pada dasarnya mereka menyadari bahwa tuntutan Papua merdeka dari penduduk asli pada masa sekarang ini sangat kuat dan mereka memahami pula bahwa merdeka itu hak mereka. Namun mereka menyatakan bahwa perjuangan mendapatkan kemerdekaan dari segi substansi berupa peningkatan martabat, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan penegakan hukum serta kebenaran bagi penduduk asli justru harus menjadi sasaran utama.

Menurut mereka, walaupun aspirasi merdeka dari penduduk asli dalam arti formal memisahkan diri dari NKRI dapat dipahami, namun merdeka dalam arti negara belum tentu merupakan jawaban atas persoalan kemanusiaan, politik, sosial ekonomi dan budaya yang dialami penduduk asli selama

pemerintahan Orde Baru bahkan jika hal itu dilakukan secara terburu-buru akan memancing terjadinya tragedi kemanusiaan yang justru dapat merugikan penduduk asli Papua sendiri.

**4. Penguasa (Birokrasi Sipil dan Militer)**

Penguasa memiliki pemikiran dan sikap bahwa masuknya wilayah Papua Barat ke dalam NKRI telah melalui proses hukum internasional yang sah, sehingga sudah final dan tidak dapat diganggu gugat (pandangan ini ditolak oleh penduduk asli sebagaimana tergambar dalam persepsi penduduk asli dengan alasan bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan persyaratan *"free of choice"* yang wajar menurut ukuran mereka). Sehingga mereka menentang aspirasi penduduk asli yang melakukan tuntutan merdeka. Mereka akan melakukan tindakan dengan resiko apapun untuk tetap mempertahankan keutuhan NKRI yaitu secara khusus persepsi perwira tinggi militer di Jakarta terhadap masyarakat Papua (dapatkan dari hasil wawancara Chusnul Mariyah, Ph. D) digambarkan sebagai berikut :

a. OPM dianggap sebagai saudara yang tersesat sehingga militer perlu untuk menyelesaikan gerombolan tersebut secara tuntas.
b. Militer tidak dapat menempatkan posisi yang sama dengan para gerombolan tersebut.
c. Birokrasi militer bertugas dalam mempertahankan Negara Kesatuan RI sehingga mereka dapat melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukannya.
d. Kurangnya pendidikan bagi rakyat Papua sehingga menyebabkan tidak ada komunikasi yang baik

e. Militer tidak setuju dikatakan mereka adalah sumber dari kerusuhan-kerusuhan di Papua dan militer menolak tuduhan tersebut karena menganggap dirinya mesin pembangunan di Papua.
f. Tidak dipahaminya ekologi dan ekosistem wilayah Papua oleh birokrasi sipil yang menyebabkan pembangunan yang seragam
g. Jika Papua merdeka, maka mereka perang selamanya dengan sesama suku karena tidak ada kesepakatan di antara ratusan suku yang ada di Provinsi Papua.

Jadi menurut penguasa, persoalan martabat manusia, kesejahteraan ekonomi dapat diatasi dengan jalan memperbaiki dan meningkatkan pendapatan bagi penduduk asli, dan melakukan penegakan HAM. Salah satu usaha yang dilakukan sekarang ini adalah melaksanakan konsep otonomi khusus dan melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi tiga provinsi dalam rangka memperbaiki keadaan tersebut.

## 5. Masyarakat Internasional

Pandangan masyarakat internasional tentang perjuangan rakyat Papua dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

a. Aspek legal formal, dimana status Papua dalam konteks NKRI di mata masyarakat internasional sudah final melalui Pepera, akan tetapi bukan berarti masyarakat internasional tidak memperdulikan kondisi masyarakat Papua secara praktis pada saat ini.
b. Aspek pelanggaran HAM, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak terungkap bahwa eksploitasi kekayaan SDA belum memperhatikan kepentingan masyarakat Papua sebagai sesuatu yang penting, yang diambil ke luar Papua oleh penguasa di Jakarta dan tidak melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan.

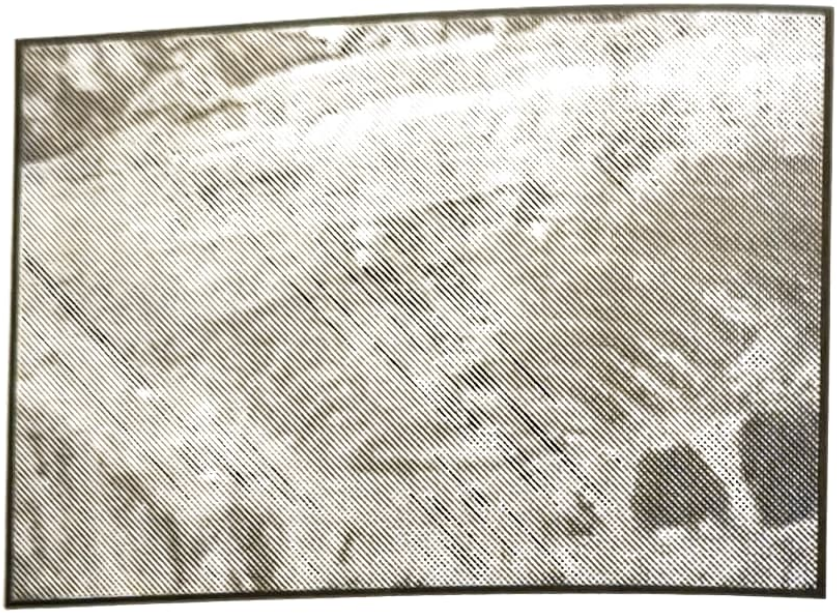
## 6. Investor

Tuntutan Papua merdeka memang sangat mencemaskan para investor asing. Akan tetapi mereka tidak ingin mengomentari secara mendalam tentang gerakan-gerakan yang ada, dengan alasan mereka tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Hasil wawancara penulis dengan beberapa investor asing, mereka menilai bahwa pokok persoalannya terdapat dalam sistem pengelolaan hukum di Indonesia yang tidak obyektif dan transparan, apa lagi besarnya peran militer di daerah-daerah seperti di Papua.

Secara spesifik mereka menilai sistem hukum dan para pelaksananya telah menyumbang pada memburuknya hubungan rakyat Papua dengan pemerintah pusat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Lembaga-lembaga keadilan seperti polisi, jaksa dan hakim tidak bekerja dalam suasana penuh kemandirian khususnya yang melibatkan penguasa. Keadaan ini diperburuk dengan tingginya tingkat korupsi di lembaga-lembaga tersebut dan hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap investor.
b. Pihak eksekutif terutama militer dapat dengan mudah memotong suatu ketentuan hukum yang berlaku dan di sisi lain lebih berperannya diskorsi seorang pejabat dibandingkan dengan yang dinyatakan oleh hukum
c. Sebagai akibat ketidakmampuan lembaga-lembaga *judicial* di Indonesia menyebabkan rakyat Papua kehilangan jalan atau tempat untuk mengadukan masalah mereka. Karena itu investor asing melihat tuntutan Papua merdeka sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem politik dan hukum di Indonesia dalam menyalurkan kepentingan-kepentingan politik lokal dan menuruti tuntutan keadilan orang Papua.

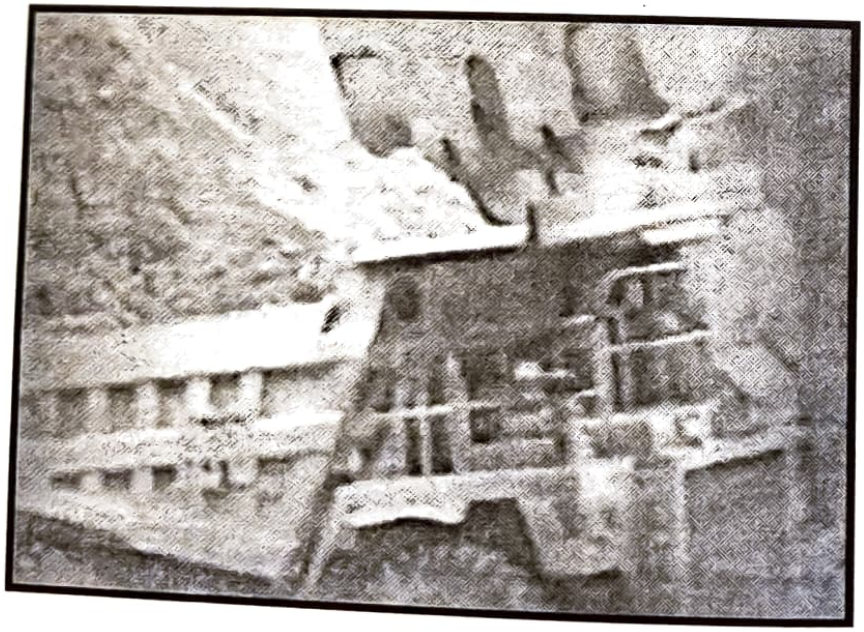
# BAB II
# KEADAAN UMUM WILAYAH PROPINSI PAPUA



Lokasi penambangan emas di Timika.



Janda dan anak-anak dari ayah yang dibantai oleh TNI/Polri



Penambangan emas oleh Freeport, Timika.

# BAB II
# KEADAAN UMUM WILAYAH PROPINSI PAPUA

## A. SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI PAPUA

### 1. Latar Belakang

Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, Papua Bara atau Irian Jaya (saat itu bernama Netherlands/Dutch Niew Guinea) terus menerus menjadi *'anak emas'* dari pemerintah Hindia Belanda (Netherlands Indies). Pemerintah Belanda menunjukkan minatnya yang baik di Papua Barat dengan mengakui bahwa teritorial tersebut memiliki posisi strategis untuk mencegah analisir kepulauan Nusantara yang kaya tersebut. Pada awal abad ke 20, Irian Barat digunakan sebagai tempat hukuman bagi pegawai negeri Belanda yang nakal dan tempat pembuangan bagi para pemimpin nasionalis Indonesia termasuk mereka yang aktif dalam revolusi komunis tahun 1926/1927 seperti yang diungkapkan oleh mantan Residen Belanda di Papua Barat, Jan Van Eechoud, Papua Barat yang dahulunya merupakan

*"Tanah yang Dilupakan" (Vergetan Aarde)* dan diabaikan pembangunannya, baru diperbaiki ketika orang luar mulai melirik ke wilayah tersebut. Pecahnya Perang Dunia ke II menyebabkan Belanda mulai mendesak Amerika Serikat untuk memperhatikan Papua Barat, karena wilayah tersebut merupakan bagian terpenting dalam strategi Sekutu di Pasifik Selatan. Pada Bulan Oktober 1944, Jan Van Eechoud yang saat itu menjadi komandan polisi di Holandia (Jayapura sekarang), mendirikan Batalyon penduduk asli Papua pertama dan diberi nama Batalyon Papua.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Indonesia berusaha untuk memperkuat daerah jajahan ke Papua Barat dengan Perjanjian Renville, maka Pemerintah Belanda bersiap untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas Papua dengan tiga alasan utama, yaitu :

a. Menjadikan Papua Barat sebagai pusat penampungan atau *"Tropical Holland"* bagi keturunan Eurosia yang tidak dapat kembali ke Holland.
b. Tempat penampungan para wisatawan Belanda yang meninggalkan Indonesia.
c. Sebagai basis untuk kemungkinan intervensi militer ke Indonesia bila Republik yang baru tersebut ambruk

Indonesia berupaya untuk mendapatkan Papua Barat selama bernegoisasi dengan Belanda baik pada Koferensi Malino tahun 1946 maupun KMB di Den Hag pada tahun 1949. KMB tidak memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari RIS dan pasal 2 ayat f hanya menyatakan bahwa status politik Papua Barat akan didiskusikan oleh Indonesia dan Belanda dalam konteks uni Indonesia-Belanda. Ketika persetujuan KMB

ditandatangani tanggal 27 Desember 1949, Residen Belanda di Papua Barat Jan Van Eechoud dapat memproklamirkan pemisahan Papua Barat dari RIS dan meletakkannya langsung di bawah Kerajaan Belanda.

Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua Barat melalui jalur diplomasi di PBB (1950-1957). Belanda juga tidak mau kalah, dengan strateginya, yang antara lain :

a. Belanda mempercepat pembangunan ekonomi, yaitu dengan meingkatkan subsidi Belanda untuk Papua Barat dari 4,3 juta dolar AS pada tahun 1950, menjadi 28 dolar AS tahun 1962.
b. Mempercepat pembangunan sekolah, yaitu membangun Sekolah Administrasi di Abepura.
c. Mendirikan partai-partai politik sebagai bagian dari pembangunan politik di Papua Barat.

Sejak awal tahun 1950, Belanda memfokuskan diri pada pembangunan politik di Papua Barat sebagai upaya untuk mencegah Indonesia dari dukungan luar negeri atas persoalan Papua Barat, dengan pandangan bahwa wilayah tersebut dapat merdeka sendiri. Hanya sedikit partai politik yang pro Indonesia, sedangkan sebagian besar lainnya pro Belanda. Gerakan politik yang pro Indonesia adalah ***Gerakan Pemuda Iryan*** (bukan Irian) yang dianggap disusupi oleh para pemimpin nasionalis Indonesia di Papua Barat dan karena itu dilarang oleh Belanda pada tahun 1961. Pada bulan Januari 1961 Belanda menyetujui berdirinya delapan partai politik di Papua Barat :

a. Partai Demokrasi Rakyat Ketua Arnold Runtuboy, Sekretaris Mozes Rumainum, Bendahara Petrus Moabuay. Partai ini didirikan pada tahun 1957 dan bertujuan untuk bersatu dengan PNG dalam Federasi Melanesia

b. Partai Nasional, Ketua Herman Wajoi, Wakil Ketua Amus Indey, Sekretaris S.Martin Bela dan Frits M. Kirihio, bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang Papua menuju penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan dan petunjuk Belanda.

c. Pantai New Guinea bersatu. Ketua Lodewijk Mandatjan Wakil Ketua HFW Gosewijk. Tujuannya mencapai kemerdekaan politik sebelum tahun 1975 dalam kaitan dengan Belanda, Antilles dan Surimame.

d. Partai Serikat Pemuda Papua Ketua Johan Wamaer. Anggotanya terbatas pada orang-orang Papua dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan di bawah pengawasan PBB.

e. Partai Persatuan Orang Niew Guinea, ketuanya John Ariks yang bertujuan untuk merdeka tanpa target tanggal dan orangnya terbatas pada orang-orang Papua saja.

f. Partai Rakyat Ketua Husein Warwei, Wakil Ketua Luis Rumaropen, Sekretaris M.Ongge dan Z. Abaa.

g. Kena U. Embay (Partai Kekuatan Menuju Persatuan) Ketua Esau Itaar, Wakil Ketua Anas Kreuta, Bendahara Willem Ossoway. Tujuannya mencapai kemerdekaan sejumlah itu bekerja dalam kaitannya dengan Belanda.

h. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat Nur Majalibit, Sekretaris J. Rajar, Penasihat pertama Abdullah Arfan. Tujuannya untuk bekerja sama dengan Belanda guna mencapai kemakmuran di New Guinea Belanda dan bersandar pada hasil-hasil daerah.

Setelah pembentukan partai-partai politik pro Belanda di Papua Barat, maka Belanda memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang dari atas ke bawah. Pada Bulan Februari 1961 Belanda melangsungkan pemilihan langsung maupun

tak langsung untuk membentuk sebuah lembaga parlemen (kuasi), yaitu Niew Guinea Raad atau Dewan Niew Guinea. Menurut Van der Veur bahwa sekitar 54.000 orang Papua yang berpartisipasi dalam Pemilu, dan ketika Dewan Niew Guinea diresmikan pada tanggal 5 April 1961, maka orang-orang Papua dapat merebut 22 kursi dari 26 kursi yang tersedia. Meskipun Van der Veur menyatakan bahwa Pemilu tersebut sukses, namun dia juga menyatakan bahwa para pemilih sangat sedikit di wilayah-wilayah yang pro Indonesia seperti di Yapen, Sorong dan Fak Fak.

Pada tanggal 27 September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Yoseph Luns mengusulkan *Rencana Luns (Luns Plan)* kepada PBB yang intinya membentuk suatu organisasi internasional dan otoritas internasional untuk mempersiapkan penduduk asli Papua guna pelaksanaan penentuan nasib sendiri secara dini pada kondisi stabil. Rencana tersebut ditolak oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio dengan alasan, bahwa Indonesia adalah pewaris Hindia Belanda karena itu Papua Barat adalah bagian dari Indonesia.

Rencana Luns membangkitkan pemimpin-pemimpin Papua yang pro Belanda termasuk Nicolaas Youwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma dan Ellyeser Jan Bonay, yang membuat draft manifesto dan menyebutkan bahwa 17 orang Papua hadir pada pertemuan pada tanggal 17 Oktober 1961.

Pada pertemuan tersebut telah dilahirkan beberapa keputusan penting antara lain "Simbol Politik" sebagai berikut :

a. Nama Bangsa dan Negara, Bangsa Papua
b. Bendera kebangsaan, Bintang Kejora
c. Lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua

d. Lambang Negara, Burung Mambruk
e. Mata Uang Negara, IB
f. Sebutan rakyat orang Papua diadopsi dan diperkenalkan
g. Bahasa persatuan Bahasa Inggris

Menurut Peter Hasting, lambang negara adalah Burung Mambruk dengan motto sama dengan motto Indonesia Bhineka Tunggal Ika, yang kemudian berubah menjadi *"One People One Soul"*.

Di tengah-tengah bergeloranya semangat nasionalisme kepapuaan, untuk membentuk suatu negara dan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat tidaklah semudah yang dipikirkan. Karena kemudian namun datanglah beberapa pemimpin Papua dari Partai Nasional untuk memprotes hasil pertemuan tersebut yang isi protesnya antara lain, tidak ada gunanya menaikan bendera Papua pada saat perasaan kebangsaan Papua belum terbentuk, karena :

a. Dari sisi kebangsaan, sentimen Papua lebih tergambar dalam lagu ciptaan I.S. Kijne *"Dari Ombak Besar"* dari pada dalam lagu *"Hai Tanahku Papua"*.
b. Penggunan nama Papua juga kurang tepat karena konotasinya amat buruk yaitu budak.
c. Pada bulan september 1945 Marcus W. Kaisepo mencanangkan nama Irian Jaya yang dalam bahasa Biak/Numfor yang artinya sinar mentari atau tanah yang panas.

Saat pemerintah Belanda sedang berpacu untuk mempercepat pembangunan politik dan ekonomi di Papua Barat, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora untuk membebaskan atau merebut Papua Barat dari tangan pemerintah Belanda dengan tiga tuntutan:

1. Bubarkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2. Kibarkan bendera merah putih di seluruh daratan Papua Barat.
3. Bersiaplah mobilisasi umum untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari Trikora, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 1/1962 Tanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala yang berpusat di Makassar untuk perebutan Papua Barat dari tangan pemerintah Belanda, dan pada tanggal 11 Januari 1962 Brigjen Soeharto diangkat menjadi mayor jenderal oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Mandala.

Perang antara Indonesia dan Belanda telah terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Papua. Perang ini dapat mengidentifikasikan bahwa ketegangan antara Indonesia - Belanda semakin meningkat. Ketegangan demi ketegangan menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden John F. Kennedy untuk bertemu dengan Presiden Soekarno di Whashington DC pada bulan April dan September 1961, yang selanjutnya melakukan korespondensi selama dua bulan dan selama bulan Desember 1961 tentang bagaimana AS dapat membantu Indonesia dalam penyelesaian persoalan Papua Barat, dapat pula menyusul persoalan adanya komunis timbal balik antara dua Presiden tersebut sehingga John F.Kennedy dapat mengubah kebijakan AS tentang status politik Papua Barat dari *passive neutrality policy* menjadi *active mediation policy* untuk menyelesaikan masalah Papua Barat secara damai karena kepentingan AS di Papua Barat khususnya PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua Barat.

Gagasan dibalik perubahan kebijakan AS terhadap masalah Papua Barat

tersebut sesungguhnya mengubah atau mencegah menguatnya pengaruh Uni Soviet ke Indonesia. Pada bulan Desembar 1960, Uni Soviet berjanji memberikan pinjaman sebesar 450 Juta Dolar AS dengan bunga rendah kepada Indonesia untuk digunakan sebagai modal pembelian senjata modern termasuk tank, roket, kapal selam, kapal perusak, pesawat tempur, pesawat perusak dan pesawat pembom dari Uni Soviet. Sebelumnya, Khruschev juga telah berkunjung ke Jakarta pada bulan Februari 1960. Uni Soviet juga berjanji memberikan bantuan ekonomi sebesar 250 juta AS.

Untuk dapat mencegah semua pengaruh Uni Soviet tersebut, maka pada bulan Februari 1962, Presiden John F. Kennedy mengirimkan adiknya Roberth F. Kennedy yang juga Jaksa Agung AS ke Jakarta dan Den Haag untuk bernegoisiasi dengan kedua belah pihak. Keterlibatan AS sebagai mediator misi tersebut merupakan suatu sukses diplomatik AS. Presiden Soekarno setuju untuk berpartisipasi dalam negoisasi dengan Belanda di Belanda di bawah naungan PBB, tetapi seorang diplomat senior AS sebagai mediatornya.

Presiden John F. Kennedy juga melakukan pertemuan dengan Menlu Belanda Dr. Yoseph Luns. Pada awalnya Dr. Luns dengan tegas menentang upaya mediasi tersebut namun karena Presiden John F. Kennedy dengan nada menekan dan menjawabnya dengan menyatakan *"Do you want to fight a war about West New Guinea?"* Kennedy dan pembantu Amerika Serikat untuk Timur Jauh Avrell Herrymen mendesak Luns agar bersedia datang ke meja koferensi pada musim semi di AS pada Tahun 1962.

Kedua belah pihak sepakat Ellsworth Bungker, satu dari diplomat AS yang cukup berpengalaman bertindak sebagai mediator yang dipinjamkan AS kepada PBB untuk tujuan tersebut. Pertemuan pertama diadakan di Middlebrug Vir-

ginia tanggal 20 Maret 1962 dengan wakil-wakil berikut:

a. Dubes Belanda di AS Dr. Jhon H. Van Roijen dan delegasi Belanda di PBB C. W.A. Shcurman.
b. Dubes Indonesia di Uni Soviet Adam Malik dan Kepala Direktorat Urusan Eropa Deplu RI, Soerjarwo Tjondronegoro.

Akhirnya pada tanggal 2 April 1962 Bungker dapat mengajukan suatu rencana yang disebut dengan *"Bungker Proposal"*, yaitu Papua Barat akan ditransfer kepada yurisdiksi PBB, kemudian dari PBB kepada Indonesia yang disusul dengan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selama lima bulan melakukan negosiasi, saling tuduh menuduh, interupsi dan provokasi, akhirnya pada tanggal 5 Agustus 1962 para negosiator Indonesia dan Belanda dapat menandatangani suatu perjanjian bersama yang disebut *"The Agreement between Republic of Indonesia and The Kingdom of the Netherlands concerning West Niew Guinea (West Irian)"* atau yang lebih dikenal dengan *"New York Agreement"* di Markas besar PBB, New York.

Sesuai dengan persetujuan New York, Belanda akan melakukan pengalihan administrasi Papua Barat kepada UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Dan setelah tanggal 1 Mei 1963m, UNTEA dan Indonesia akan memerintah Papua Barat secara bersama-sama, dan Indonesia akan melaksanakan Pepera di Papua Barat dari tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969. Hasil tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi PBB Nomor 2504 (XXIV) tanggal 19 Nopember 1969 dengan perincian sebagai berikut:

a. Setuju 84 suara
b. Menentang 0 suara
c. Abstain 30 suara

Dengan demikian sejak saat itu, baik secara hukum internasional maupun etika demokrasi, Papua Barat resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

## 2. Masalah Pokok

Dalam sejarah Papua Barat (Irian Jaya) telah memiliki berbagai nama yaitu:

a. Gubernur pertama Portugis di Maluku, Jorge de Meneses, pada tahun 1528 menyebutnya dengan nama Papua ketika de Meneses mengunjungi Pulau Waigeo, dan menamakan penduduk berkulit hitam dan berambut keriting sebagai orang Papua, sedangkan wilayahnya disebut ***Ilhas dos Papua*** (pulau Papua). Kata Papua dikonotasikan secara negatif sebagai *budak berkulit hitam* dan *berambut keriting*.

b. Pada tanggal 20 Juni 1545 M seorang nahkoda Spanyol bernama Ynigo Ortiz de Retes yang singgah di daerah Mamberamo memberikan nama Nova Guinea (Niew Guinea). Namun nama tersebut baru mulai digunakan secara internasional setelah dimunculkan dalam Peta Dunia buatan "Mercator" tahun 1569.

Wilayah Papua Barat yang luas daratannya 414.800 km persegi dan luas perairan laut 228.000 km persegi, belum termasuk ZEE, terus menerus menjadi *'tanah yang panas'* (Irian) dan *'tanah yang dilupakan' (Vergeten Aarde)*. Perhatian Belanda kepada wilayah Papua baru muncul setelah Jerman menduduki paro utara (Niew Guinea), dan Inggris menduduki paro selatan (Papua) yang kini menjadi PNG. Perhatian Belanda kepada *The Netherlands Niew Guinea* semakin nyata yang akhirnya membelah wilayah dua kali perbatasan pulau Niew Guinea hingga kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan setelah Papua

bersatu dengan Indonesia di wilayah ini tetap merupakan tanah yang dilupakan sampai dengan pemberian kemerdekaan bagi rakyat PNG oleh Australia pada tanggal 16 September 1975 dan perhatian Indonesia kepada Papua setelah masuknya Timor Timur ke dalam RI pun mulai memudar.

Jika kita cermati secara saksama ada beberapa akar permasalahan sejak tahun 1950 an hingga sekarang yang mengakibatkan sampai Papua ingin merdeka. Akar permasalahan tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. **Segi internal** yang meliputi lima faktor/akar permasalahan sehingga sekarang belum diselesaikan antara lain :

a. **Pembangunan politik di Netherlands Niew Guinea antara tahun 1950-1962** yang meliputi :
   - Suka atau tidak suka, pendirian partai-partai politik yang disokong oleh orang-orang Indonesia di Papua Barat
   - Dibangunnya Sekolah Pamong Praja di Abepura
   - Pembentukan Dewan Nieuw Guinea Raad tanggal 1 April 1961
   - Dikibarkannya bendera Bintang Kejora tanggal 1 Desember 1961
   - Membangkitkan rasa nasionalisme Papua dan kemerdekaan bagi rakyat Papua.

   Implikasi dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah :
   - Orang Papua sudah siap mendirikan negara sendiri.
   - Orang Papua bisa memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Niew Guinea melalui *"one man one vote"* meskipun melalui demokrasi.
   - Pada tanggal 1 Desember 1961 sudah diproklamasikan kemerdekaan

rakyat Papua meskipun tanpa teks.

- Proklamasi kemerdekaan oleh Zeth Rumkorem pada tanggal 1 Juli 1971.

Pada saat Presiden Soekarno mencanangkan Trikora yang butir pertamanya menyatakan "Bubarkan negara boneka Papua Barat buatan Kolonial Belanda", maka hal itu dapat diinterprestasikan oleh kaum intelektual Papua pada saat itu sebagai suatu tindakan Indonesia membubarkan negara Papua Barat. Itulah sebabnya sampai saat ini mereka terus menuntut adanya suatu pengakuan kemerdekaan dari pemerintah Indonesia dan mereka bukan menuntut kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh OPM. Selain itu pula Pepera pada tahun 1969 dianggap tidak sah karena tidak dilakukan melalui cara *"one man one vote"*, melainkan melalui sistem perwakilan. Sebenarnya pada tahun 1961 rakyat Papua dapat melakukan pemilihan, tetapi diundur hingga pada tahun 1969, karena rakyat Papua dianggap tidak mampu.

**b. Peristiwa Traumatik Periode Peralihan 1963- 1969**

Ada beberapa peristiwa penting yang sangat traumatik bagi rakyat Papua antara lain :

- Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi dan dampaknya sampai ke Papua Barat sehingga para pejabat militer dan sipil yang bertugas di Papua saat itu membawa barang-barang berharga dari Papua ke wilayah Indonesia lain sehingga timbul suatu anggapan bahwa orang Indonesia merampok kekayaan orang Papua.
- Harga barang-barang di Papua pada saat itu melambung tinggi, meskipun

ada kebijakan untuk memperlakukan dua bentuk mata uang, yaitu Rupiah biasa dan Rupiah IB (Rupiah Irian Barat) Pantai New Guinea bersatu.

- Terjadinya proses indonesianisasi yang dipercepat dalam administrasi pemerintahan sipil maupun dalam simbol ketatanegaraan. Para pegawai administrasi sipil asal Papua didikan Belanda disingkirkan dan diganti dengan orang-orang yang berasal dari luar Papua, demikian pula terjadilah awal proses teralienasinya orang-orang Papua asli di tanahnya sendiri.
- Pendekatan Keamanan terhadap para pendukung OPM dan kaum intelektual yang berbeda pandangan dengan pemerintah hingga saat ini masih terus berlangsung.
- Terjadinya proses irianisasi di bidang pemerintahan dan sektor swasta.

c. **Program transmigrasi yang diinterprestasikan sebagai program jawanisasi dan islamisasi di Papua.** Munculnya pandangan tersebut karena pengambilan lahan/tanah adat milik rakyat Papua tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah.

d. **Pengerukan kekayaan alam secara besar-besaran oleh pemerintah pusat.** Kandungan kekayaan alam yang tak terhingga seperti kekayaan hutan, tambang tembaga dan emas, minyak dan gas bumi dan kekayaan laut, sebagai salah satu contoh adalah pendapatan perhari PT. Freeport Indonesia 3 Juta Dolar AS.

Lebih sialnya lagi perusahaan macam Freeport yang mengeksploitasi kekayaan tambang tembaga dan emas di Papua tidak dapat memberikan

kontribusinya untuk membantu mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat Papua yang miskin dan terbelakang, terutama penduduk asli Papua. PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua sejak tahun 1967 hingga sekarang tidak dapat membangun penduduk asli Papua dan baru pada tahun 2000 PT. Freeport Indonesia dapat menyediakan dana 12 miliar dolar pertahun untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat Suku Amungme dan suku-suku lain di sekitar pertambangan, kenyataan pahit inilah yang menyebabkan bertambahnya keinginan orang-orang Papua untuk merdeka dan menolak konsep otonomi khusus karena sudah terlalu lama terabaikan.

e. **Faktor Timor Timur, dimana Penduduk Asli Papua sangat cemburu terhadap perlakuan Indonesia pada Timor Timur dari segi kekayaan alam dan perhatian pemerintah pada Pembangunan.** Papua sebagai daerah pemberi devisa sangat besar pada Indonesia tetapi yang dikembalikan ke Papua sangat sedikit. Sebaliknya Timor Timur tidak memberikan apa-apa bagi pemerintah pusat tetapi anggaran pemerintah bagi pembangunan Timor Timur sangat luar biasa.

Dalam proses kemerdekaan Timor Timur perhatian Internasional sangat besar sedangkan untuk Papua masih minim jika Indonesia berani memberikan hak untuk menentukan nasib bagi Timor Timur mengapa Papua Barat tidak? Apalagi Papua Barat masuk Indonesia melalui persetujuan Internasional yaitu Persetujuan New York. Itulah sebabnya

pada saat pemberian dua opsi bagi Timor Timur munculah tuntutan kaum intelektual Papua untuk menuntut dialog terbuka dengan pemerintah pusat untuk pengakuan kemerdekaan Papua Barat.

2. **Faktor eksternal** yang mempengaruhi keinginan orang Papua untuk merdeka antara lain :

a. Kemerdekaan PNG dan negara Pasifik Selatan :
   - Kemerdekaan PNG dan negara-negara lainnya di Pasifik Selatan
   - Pemikiran orang Papua, mereka juga merupakan suatu bangsa yang sama-sama punya hak untuk merdeka.
   - Adanya perbedaan etnis bagi orang Papua yang merupakan ras Malanesia.
   - PNG dan negara di Pasifik Selatan lainnya yang lebih miskin dari Papua Barat dan PNG bisa merdeka mengapa Papua Barat tidak.

b. Ada campur tangan pihak asing khususnya Amerika Serikat dalam masalah Papua Barat dimana:
   - Jika pada masa perang dingin Amerika Serikat membantu memasukan Papua Barat ke pangkuan RI, maka sejak perang dingin berakhir pula dualisme kebijakan AS terhadap Papua Barat.
   - Secara resmi Pemerintah AS tetap mendukung integrasi nasional Indonesia, di sisi lain ada sekelompok kalangannya AS seperti aktivis LSM dan sektor-sektor AS yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua Barat.

Sekarang adalah zaman kemerdekan. Bangsa Indonesia dan bangsa Papua adalah saudara. Di dalam zaman kemerdekaan ini bangsa Indonesia dan bangsa Papua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Bangsa Indonesia tidak boleh memonopoli kekuasaan, posisi jabatan dan kekayaan, sedangkan Papua tidak mendapatkan apa-apa. Jika persoalan-persoalan tersebut masih ada, maka selama itu pula tetap akan ada permasalahan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Papua (Anggota Niew Guinea Raad, Marcus Kaisiepo September 1945).

Indonesia harus memindahkan basis roket dan instansi militer lainnya dari Irian Barat yang mengangkat senjata untuk memberontak, oleh karena motif-motif politik (Anggota MPRS-RI F. Karubuy, 10 Maret 1967). Selama 40 tahun proses pembangunan di tanah Papua, ia hanya dijadikan ideologi dan kebijakan yang dipaksakan dan itu membuat orang Papua merasa terbuang dari tanahnya. Tidak heran bila ujung-ujungnya pembangunan di tanah Papua ini justru dilihat sebagai penjajahan. Akibatnya orang Papua beramai-ramai menuntut kemerdekaannya (Wawancara penulis dengan Pdt. Herman Saut Mth, di Jayapura tanggal 22 Maret 1999).

"... Persiapan menuju kemerdekaan sudah matang, kemerdekaan itu sudah diproklamirkan 1 Desember 1961 tinggal pemerintah RI mengakui kemerdekan itu. Karena itu, upaya pemerintah untuk menghilangkan kemerdekaan Papua dengan otonomi khusus sama sekali tidak dibenarkan." (Demikian ungkap **Frans Kemipit**, wakil masa penentang sosialisasi otonomi khusus di Merauke tanggal 16 Februari 2000 tulis Kompas, 17 Februari 2000).

" Terima kasih kepada pemerintah RI yang sudah hidup bersama selama 38 tahun dengan bangsa dan rakyat Papua, terima kasih kepada Presiden

B.J. Habibie yang telah membukakan jendela demokrasi yang telah tertutup rapat kepada rakyat Papua, terima kasih kepada Presiden RI Abdurrahman Wahid yang telah mengijinkan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Karena sudah terlalu lama dan saya bosan pakai *koteka* dan telanjang. Saya ingin merdeka sendiri dan mau pakai celana juga seperti bangsa Indonesia. (**Yunius Wandikbo**, Ketua Panel Wamena pada Acara Kongres Rakyat Papua II melalui Pemandangan Umum Daerah tanggal 4 Juni 2000 di KRP II di Gedung Olah Raga Cenderawasih Jayapura Port Numbay).

Adanya upaya pemerintah untuk mengeliminasi bantuan eksternal bagi kemerdekaan Papua Barat melalui jalur diplomasi seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Papua Barat yang masih kurang, khususnya dari unsur negara, karena masalah Papua sangat berbeda dengan kasus Timor Timur yang mendapat dukungan penuh dari dunia internasional.

### 3. Kondisi Sekarang

Membaca dan menyimak dari keempat kutipan di atas dapat menunjukkan perasaan dan hati orang Papua dalam tiga kurun waktu yang berbeda, tetapi dalam nuansa yang sama, yakni perasaan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Papua adalah saudara senasib sepenanggungan dalam era kemerdekaan. Namun karena adanya monopoli kekuasaan, jabatan dan kekayaan oleh orang-orang Indonesia non Papua terhadap orang-orang Papua, maka ada perasaan bahwa orang-orang Indonesia sedang menjajah orang-orang Papua.

Jika perasaan senasib diejawantahkan dalam wujud keadilan sosial dan ekonomi, maka kecil kemungkinannya orang-orang Papua mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan dari Indonesia, karena motif pemberontakan tidak sepenuhnya berakar dari matif-motif politik, melainkan pada keadilan sosial ekonomi.

Keterlibatan kaum intelektual dalam usaha untuk dapat membangkitkan nasionalisme Papua sudah berkembang sejak tahun 1945, khususnya para tokoh politik Papua binaan Belanda. Namun sejak tahun 1960-1984 *Gerakan Papua Merdeka* lebih banyak dilaksanakan secara sporadis oleh faksi-faksi yang menamakan dirinya OPM. Kebangkitan kembali rasa nasionalisme etnik yang muncul tahun 1980-an telah melibatkan kaum intelektual khususnya Kepala Museum Uncen Arnold Ap dalam mengoleksi lagu-lagu daerah Irian Jaya untuk didendangkan dan direkam bersama kelompok musik etnik ***"Mambesak"***.

Lagu daerah Irian Jaya ini bukan saja populer di tanah Irian, melainkan sampai ke Netherlands, PNG dan Vanuatu. Sayang, perasaan nasionalisme yang masih dalam kerangka NKRI itu dihadapi dengan cara-cara kekerasaan. Arnold Ap sendiri ditangkap, dimasukan ke penjara dan kemudian ditembak mati karena dituduh akan melarikan diri dari penjara. Hal ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya gelombang pengungsian dari Irian Jaya ke PNG pada tahun 1984-1985 yang mencapai jumlahnya 10.000 orang.

Sejak tahun 1984-1998 gerakan OPM di Papua merupakan perpaduan antara gerakan OPM dengan gerakan intelektual yang dimotori oleh para mahasiswa dan dosen Uncen dan PTS yang ada di seluruh tanah Papua. Pada tahun 1998 muncullah wadah baru untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara

pemerintah dan masyarakat Papua, yaitu melalui Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian, yakni suatu forum yang menggabungkan kaum intelektual, Pemda, tokoh agama, mahasiswa dan ketua-ketua adat.

Dari hasil penelitian kepustakaan dan data lapangan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa di masyarakat Papua pada saat ini terdapat dua kelompok elite politik Papua, yaitu :

- Mereka yang menginginkan otonomi penuh (jalur O) yang dimotori oleh para birokrat dan politisi.
- Mereka yang menuntut merdeka atau kemerdekaan penuh (jalur M) yang didukung oleh kaum intelektual, Pemda, tokoh agama, tokoh adat, mahsiswa dan seluruh lapisan masyarakat strata bawah.

Kedua kelompok tersebut memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan posisi mereka antara lain :

- Mereka yang menuntut otonomi penuh mengatakan bahwa secara hukum nasional dan internasional Papua Barat sebagai bagian integral dari Indonesia sudah final, dan sekarang kita tinggal memperbaiki orang-orang Papua sebagai tuan rumah yang mengatur rumah tangganya sendiri.
- Para pendukung kemerdekaan (Jalur M) sesungguhnya tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, dengan alasan bahwa pemberian otonomi itu dahulu sudah dijanjikan dan ada peraturan perundang-undangannya, yaitu UU No. 5 tahun 1975, tetapi dalam pelaksanannya tidak. Sentralisasi kekuasaan pusat atas daerah masih terus berlangsung. Jika nanti diberikan otonomi khusus dalam prakteknya bisa saja lain seperti yang sudah terjadi sejak tahun 1963, karena selama 40 tahun berintegrasi dengan Indonesia merupakan masa yang cukup

lama. Janji-janji pemerintah pusat merupakan janji-janji belaka. Janjinya sudah cukup lama dan rakyat Papua tidak tertarik pada tawaran konsep otonomi khusus. Rakyat Papua memilih untuk merdeka. Dalam perbedaan itulah muncul suatu konsep baru yaitu sebaiknya Indonesia menerapkan sistem negera federal. Sehingga otonomi benar-benar dapat dilaksanakan di masing-masing negara bagian.

Sebelum masuk pada kesimpulan akhir, ada beberapa besar potensi disintegrasi nasional di Papua, apakah orang-orang Papua benar-benar ingin merdeka? dan langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang apa yang perlu diambil untuk mengatasinya? Ada baiknya kita membahas terlebih dahulu akar sejarah masuknya Papua Barat ke dalam wilayah NKRI, tumbuh dan berkembangnya gerakan OPM di bumi cenderawasih tersebut, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat Papua.

## 4. Rekomendasi

Atas dasar latar belakang sejarah, masalah pokok dan kondisi sekarang sebagaimana dapat diuraikan di atas, maka penulis berupaya untuk membuat beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi OPM di Papua Barat yang dibagi dalam 3 bagian yaitu jangka pendek, menengah dan panjang :

a. Jangka pendek (1- 5 Tahun)
b. Jangka menegah ( 1-10 Tahun)
c. Jangka panjang (10 –25 Tahun )

## B. LETAK GEOGRAFIS PROVINSI PAPUA

Provinsi Papua terletak antara 1° lintang utara 10° lintang selatan dan 134° - 141° bujur timur, dan merupakan wilayah yang berbatasan di sebelah utara dengan lautan pasifik, sebelah timur dengan negara tetangga PNG, di sebelah selatan dengan bagian utara negara tetangga Australia dan sebelah barat dengan provinsi Maluku. Problem utama di provinsi Papua adalah tingginya tingkat keterisolasian daerah-daerah pedalaman, sehingga penduduk asli yang sangat tersebar di provinsi ini amat jauh tertinggal akan perkembangan sosial ekonominya dibandingkan dengan penduduk daerah lainnya di Indonesia.

Sementara itu, karakter budaya masyarakatnya yang sangat ekslusif dan menyebabkan mereka seperti tak tersentuh dinamika pembangunan yang selama ini begitu intens disosialisasikan oleh pemerintah pusat. Provinsi Papua merupakan provinsi paling timur, yang keluasan wilayah daratannya sekitar 394.800 $Km^2$, namun luasnya wilayah Papua tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai.

## C. JUMLAH PENDUDUK DAN KEHIDUPAN EKONOMI

### 1. Penduduk

Perkiraan jumlah penduduk Papua pada tahun 1988 adalah 2.355 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk di wilayah ini masih kurang dari 6 jiwa/$km^2$. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sebesar

3, 85% untuk tahun 1990–1998. Sementara itu menurut data SUPAS 1995, jumlah ril penduduk Papua (termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap), baru mencapai 1.943 jiwa.

Faktor penduduk dianggap penting, karena ia merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan gerak dinamika pembangunan di suatu wilayah. Namun kasus Irian Jaya yang jumlah penduduknya kurang, bukan merupakan satu-satunya masalah krusial. Yang menjadi akar masalah adalah kebijakan politik pemerintah Indonesia. Kalau hanya mental penduduk, dapat diatasi dengan transmigrasi.

Hingga tahun 1996, transmigrasi yang masuk ke provinsi ini diketahui sudah mencapai 50. 981 KK (207.262 jiwa), dan jumlah tersebut sebenarnya swatransmigran yang umumnya berasal dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku yang berinisiatif datang sendiri untuk mengadu nasib di kota-kota provinsi ini.

Tetapi masalah berat yang dirasakan sulit untuk diantisipasi begitu saja adalah realitas keterisolasian daerah pedalaman, terutama disebabkan karena terbatasnya infrastruktur yang dibangun. Desa-desa di pedalaman, sebagian besar dari jumlah 2.280 buah desa di Papua, letaknya terpencar dan berjauhan satu sama lain, dan umumnya hanya bisa dapat ditempuh melalui jalan setapak. Bahkan saling berjauhannya antar desa tersebut tidak jarang harus dicapai dengan berjalan kaki selama 3 atau 4 hari.

Yang dimaksud dengan "desa" di daerah pedalaman Papua sesungguhnya bukanlah desa sebagaimana halnya desa pelosok di pulau Jawa yang masih mengacu pada konsep wilayah pemukiman karena kebutuhan hubungan yang muncul karena peran eksternal, yaitu pemerintah yang berkuasa. Desa di

pedalaman Papua adalah suatu kawasan pemukiman yang muncul karena adanya persekutuan hukum genealogis. Sebuah desa biasanya dihuni oleh suatu suku dan biasanya untuk sebuah suku besar seperti suku Asmat dan suku Dani. Hal ini bisa terjadi karena mereka menghuni beberapa desa administratif sekaligus tanpa merasa bahwa mereka itu berbeda wilayah mukim. Sebagai contoh, suku Asmat misalnya tersebar di empat kecamatan di kabupaten Merauke, yaitu kecamatan Agats, Atsy dan Pantai Kasuari serta kecamatan Sawaerma yang luas wilayahnya seluas provinsi Jawa Barat. Dalam kaitannya dengan masalah penduduk di tanah Papua yang terbagi menjadi 243 etnis yang diketahui melalui 243 bahasa dan ada empat belas suku terasing yang belum terjangkau dengan pembangunan di tanah Papua ini.

**2. Perekonomian**

Dalam rangka memajukan dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan dengan program Bandes dan IDT yang diberikan untuk desa-desa tertinggal, tak ada yang meragukan bahwasanya desa di pedalaman Papua adalah desa miskin dalam kondisi yang sangat parah dan tidak ada perubahan. Misalnya bantuan Presiden (Bandes) sebesar Rp 5.000.000,- bagi desa di palau Jawa sudah cukup, sedangkan untuk Irian tidak cukup. Alasannya simpel saja yaitu:

a. Tingginya harga barang-barang.
b. Transportasi hanya lewat udara dan laut
c. Belum terjangkaunya daerah-daerah terpencil.
d. Biaya transportasi yang cukup tinggi

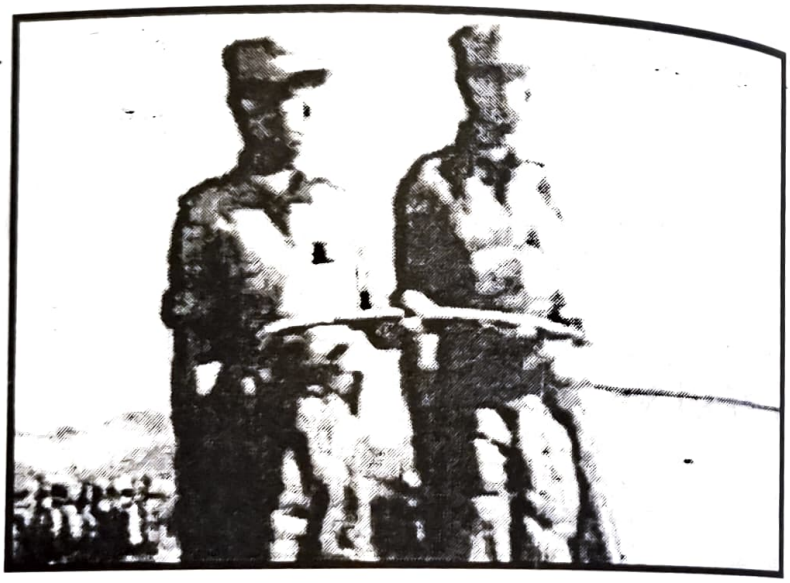
Karena itu, namun rakyat yang tidak bekerja tidak mampu membeli barang-

barang kebutuhan pokok seperti pada masa Belanda dahulu. Hal ini menimbulkan kerusuhan sosial seperti di Manokwari, Biak, Yapen waropen, dan Sukarnapura (Jayapura) dan kerusuhan tersebut dihadapi dengan kekerasan sehingga bukan saja menimbulkan trauma yang mendalam bagi penduduk Papua, tetapi juga membangkitkan semangat untuk merdeka di mana antara tahun 1963-1965 mulai terdengar istilah OPM suatu istilah yang diberikan oleh penguasa militer terhadap organisasi untuk kesejahteraan orang Papua.

# BAB III
# PEPERA PAPUA 1969
# DAN
# KASUS TIMOR TIMUR



Suasana Pepera tahun 1969



Operasi Mandala melalui Trikora




Penyerahan Irian Barat dari UNTEA kepada RI tahun 1963

# BAB III
# PEPERA PAPUA 1969 DAN KASUS TIMOR TIMUR

## A. NASIONALISME

Suatu realita politik yang tak bisa dielakkan dewasa ini di kalangan rakyat Papua, yaitu semakin memudarnya nasionalisme dan kebanggaan orang Papua sebagai bangsa Indonesia. Hal ini sangat jelas pada peringatan HUT ke 55 kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2000 lalu. Di halaman rumah penduduk asli Papua hampir-hampir di seluruh pelosok wilayah Papua tak kita temukan adanya pengibaran bendera merah putih dan juga tidak ada kegiatan yang menurut tradisi dan kebiasaan dalam rangka memperingati momentum 17 Agustus. Partanyaannya, **"Mengapa rakyat Papua semakin hilang rasa nasionalisme dan kebanggaanya sebagai orang Indonesia?"** Untuk dapat menjawab fakta tersebut dapat ditinjau beberapa aspek, antara lain:

### 1. Aspek Sejarah Politik

Pandangan pertama dari aspek sejarah politik menurut hemat penulis

bahwa ada beberapa alasan yang membuat orang Papua untuk tidak simpati dengan bangsa Indonesia dan bangsa Papua Barat sesunggunya bukan bagian dari wilayah RI, karena :

a. Secara historis Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda karena pada tanggal 28 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Trilon Pantai Selatan, diproklamasikan kepemilikan Papua Barat oleh Komandan Pasukan Tentara Belanda atas nama Sri Baginda Raja Nederland pada saat peresmian Benteng Dubus.
b. Walapun di kala itu Papua Barat dan Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda, namun secara administrasi pemerintahan Papua Barat diurus terpisah.
c. Bangsa Papua tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
d. Pada Sidang BPUPKI bulan Juli 1945, Drs. Muhammad Hatta mengatakan bangsa Papua Barat adalah bangsa yang masih primitif.
e. Pada pertemuan antar wakil–wakil Indonesia dengan penguasa perang Jepang di Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945, Drs. Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri sementara Ir. Soekarno mengatakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
f. Papua Barat tidak termasuk di dalam daerah-daerah yang diproklamirkan sebagai wilayah negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
g. *"Orang Papua itu budak berkulit hitam, berambut keriting dan bau busuk."* Hal tersebut diungkapkan oleh gubernur pertama Portugis di **Maluku** Jorge

**de Meneses** yang mengunjungi Pulau Waigeo pada tahun 1528. Sedangkan wilayah yang disebut *Ilhas Dos Papua* (pulau Papua) dan *Nova Guinea* (Niew Guinea) adalah geografis tanah yang diberi nama oleh seorang nahkoda Spanyol bernama **Ynigo Ortize de Rates** pada saat ia singgah di daerah Mamberamo pada tanggal 20 Juni 1545 M. Namun nama Papua baru muncul dan mulai digunakan secara internasional dalam peta dunia buatan Mercator tahun 1569.

## 2. Aspek Ideologi

Di dalam kesadaran kebangsaan atau nasionalisme bila dipahami dengan baik, maka hal tersebut merupakan refleksi kesadaran subyektif suatu masyarakat dalam mengidentifikasikan diri dalam satu kesatuan yang disebut sebagai bangsa Papua atau bangsa Indonesia. Kesadaran akan identitas diri sebagai komunitas sosial seperti yang diuraikan oleh ***Benedict Anderson*** tentang *Imagined Community,* untuk menjelaskan proses terbentuknya kesadaran nasional pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai dampak dari kolonialisme yang telah menetapkan batas-batas teritorial yang jelas atas wilayah kekuasaan Hindia Belanda.

Kesadaran akan identitas diri yang terbentuk dalam perjalanan sejarah di atas dapat dikatakan memberi motivasi bagi rakyat Papua untuk mempertanyakan identitas dirinya dalam kesatuan keindonesiaan.

Upaya untuk mempertanyakan identitas dirinya sebagai suatu komunitas sosial terbukti dari gugatan rakyat Papua untuk mengembalikan nama Papua yang selama 40 tahun berintegrasi, walaupun sengaja

digelapkan oleh Indonesia dengan sebutan Irian Jaya (Irian Barat). Gugatan ini tentu memiliki arti dan implikasi politik yang menandai suatu era baru, bersamaan dengan kebangkitan paradigma baru yang menuntut adanya aktualisasi yang nyata dan bertanggung jawab dari paham kebangsaan Indonesia akibat pengalaman empiris pembangunan nasional selama Orde Baru berkuasa di Papua. Sebutan nama Papua walaupun diijinkan oleh Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid pada acara dialog rakyat Papua dengan Presiden pada tanggal 31 Desember 1999 di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, namun hal itu ditentang dan ditolak oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR RI pada Sidang Tahunan Bulan Agustus 2000.

Implikasi selanjutnya dari pengembalian nama Papua sekaligus menyentuh kalangan terpelajar untuk mempersoalkan gagasan baru yaitu perlunya ditinjau kembali kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua Barat. Tegasnya, gagasan mengenai pembentukan suatu negara nasional, yaitu Papua yang merdeka yang diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera *Bintang Kejora* dan dinyanyikannya lagu kebangsaan *"Hai Tanahku Papua"*, dilakukan secara resmi pada upacra tanggal 1 Desember 1999 di Taman IMBI pusat kota Jayapura, tepatnya jam 06.00 WPB. Upacara tersebut dihadiri oleh ± 80.000 orang.

### 3. Aspek Hukum

a. Secara *de facto*, pada tanggal 1 Desember 1961 rakyat Papua telah menyatakan kehendaknya untuk merdeka dan negara yang baru merdeka

tersebut dapat berkuasa selama 3 tahun, kemudian dianeksasi oleh pemerintah Indonesia melalui Trikora oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961.

b. Secara *de jure* :

- Pidato Presiden RI pertama Ir. Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945
- Alinea I Pembukaan UUD 1945
- Deklarasi Universesal HAM tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB
- Resolusi PBB nomor 1514 tahun 1960, tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-negara dan Daerah Jajahan
- *Gouvernementsblad Van Netherlanch Niew Guinea* Tahun 1960 Nomor 69 tentang lagu kebangsaan negara.
- Pernyataan resmi Tuan Nicholaas Youwe dalam persidangan komisi gabungan Pemerintah RI dan Belanda dalam pembahasan status politik, nasib, tanah, rakyat dan bangsa Niew Guinea/Irian tanggal 19 Juli 1950 yang isinya tentang penyelesaian atas campur tangan bangsa Indonesia yang dinilainya tidak berhak untuk mengurus status politik Papua Barat.
- Surat rahasia Presiden AS John F Kennedy kepada Pemerintah Belanda cq. Dr. J.E.de Quay, Perdana Menteri Belanda, tertanggal 2 April 1962.

## 4. Aspek kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamnan TNI/POLRI di wilayah Papua

Setelah pasca berintegrasinya Papua ke dalam NKRI, kesadaran subyektifitas dapat dirusak dan dihapuskan lewat pengalaman empiris, dengan

pelaksanaan pembangunan nasional yang disertai kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Orde Baru dengan instrumen TNI/Polri. Kejahatan itu dilakukan dengan alasan gangguan stabilitas nasional dari gerakan separatisme/*Organisasi Papua Merdeka*. Dengan alasan ini, banyak rakyat Papua yang dibunuh untuk membunuh realitas keinginan rakyat.

Fakta sejarah membuktikan bahwa salah satu kejahatan dan pelanggaran HAM terbesar di dunia telah terjadi di daerah Papua Barat, kejahatan dan pelanggaran HAM disebabkan oleh :

a. Kemerdekaan bangsa Papua Barat yang diproklamirkan pada tanggal 1 Desember 1961 telah dianeksasi oleh pemerintah Indonesia melalui pengomandoan Trikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1962.

b. Adanya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur (komunis) dan semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur sebagaimana tertera dalam surat rahasia Presiden AS. John F. Kennedy de Quay tanggal 2 April 1962. Sebagai akibatnya, Belanda tunduk pada tekanan politik AS untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Mengapa New York Agreement tersebut dapat memperkuat AS menekan Belanda untuk menandatangani New York Agreement? Hal tersebut disebabkan beberapa alasan, antara lain :

   - Adanya perang dingin antara Blok Barat (dikomandoi AS), yang berpaham demokrasi liberal dan Blok Timur (Uni Soviet) yang berpaham komunis.
   - Amerika Serikat telah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia

II dengan dibomnya pangkalan angkatan perang Amerika Serikat di Pearl Harbour (Pasifik) oleh pasukan Jepang. Sedangkan Blok Timur di bawah komando Uni Soviet yang berpaham komunis sudah masuk dan menguasai Asia di antara RRC dan Vietnam. Pada kesempatan itulah Ir. Soekarno menggunakan momen tersebut untuk menekan AS (PBB) agar AS dapat menekan Belanda untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Hal ini sebenarnya telah diprotes oleh negara-negara Afrika, negara Pasifik Selatan dan Malaysia, yang menyatakan bahwa, biarlah rakyat Papua Barat yang menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara Papua Barat. Sikap Malaysia menyebabkan bangsa Indonesia merasa tersinggung, lalu terjadilah konfrontasi Indonesia Malaysia yang mengakibatkan Indonesia harus keluar sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tahun 1950.

- Amerika Serikat merasa terancam, karena jika Indonesia masuk menjadi anggota Blok Timur, maka komunis akan mulai memperkuat pangkalan angkatan perang Uni Soviet di Pasifik, khususnya pulau Biak untuk menyerang Amerika Serikat. Kalau hal itu terjadi, Amerika Serikat akan mengalami kekalahan melawan Blok Timur.

New York Agreement adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral karena tidak pernah melibatkan orang Papua/wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat untuk membicarakan status politik dan nasib bangsa Papua Barat. Isi New York Agreement dalam pelaksanaannya adalah hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, untuk memilih apakah bangsa Papua Barat mau merdeka atau berintegrasi. Dan hal ini tidak pernah

disosialisasikan kepada rakyat Papua.

Pasal XXII ayat 1 New York Agreement dengan jelas mengatur tentang hak-hak bangsa Papua untuk bebas berbicara, berkumpul dan bergerak, tetapi tidak pernah dapat dilaksanakan oleh bangsa Papua. Sebab semua organisasi sosial dan politik yang dibentuk sebelum tahun 1963 dapat dibubarkan dan dilarang melakukan aktivitasnya oleh pemerintah Indonesia melalui Dekrit Presiden RI No. 11 Tahun 1963 tanggal 15 Mei 1963.

Niew Guinea Raad yang adalah Badan Perwakilan Rakyat Papua, diketuai oleh **Herman Wayoi** dari Partai Nasional, dapat dibubarkan dan digantikan oleh DPR Gotong Royong yang keanggotaannya tidak melalui suatu proses pemilihan yang demokratis.

Sejak Tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan-pasukan militer dalam jumlah yang besar di seluruh tanah Papua Barat. Pasukan yang ditempatkan di Papua adalah pasukan organik dan non organik TNI/Polri dari semua Kodam dan Polda di seluruh Indonesia.

Akibat dari pengiriman pasukan militer dari TNI/Polri, maka telah terjadi tindakan kejahatan dan pelanggaran antara lain:

- Pelanggaran akan hak-hak politik dan HAM di tanah Papua yang brutal di luar batas prikemanusiaan pembunuhan secara kilat, penguburan manusia secara hidup-hidup, penembakan terhadap korban dengan terlebih dahulu disuruh menggali kuburannya sendiri. Pembunuhan ayah yang kemudian dagingnya dibakar dan dipaksakan untuk dimakan oleh isteri dan anak-anaknya, ada yang diikat kaki dan tangan lalu dibuang ke laut dari atas helikopter, penangkapan (penculikan) dari rumah dan tidak pernah kembali. Perlakuan keji juga terjadi dengan memasukkan besi panas

ke dalam lubang anus dan distroom. Aksi teror, jemput lalu pada malam hari adalah hal biasa. Ada pula yang digantung dengan kepala ke bawah dan disulut dengan api rokok.

- Tindakan kekerasan pun terjadi pada anak wanita di bawah umur. Suami dan istri dipaksa untuk bersetubuh di muka umum, wanita disuruh untuk membuka lubang anusnya lalu disulut dengan api rokok, alat kelamin wanita ditusuk dengan bayonet/kayu. Penahanan tanpa ada proses pengadilan, pembakaran rumah penduduk, pengrusakan kebun rakyat, dan lain-lain.

Banyak sudah pelaku dan pejuang emansipasi di Papua yang dibantai secara keji dan kejam. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Papua tidak jauh berbeda dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh PKI pada Tanggal 30 September 1965. Misalnya pembunuhan keji terhadap Ketua PDP Theys Hiyo Eluay, Ferry Awom, Arnold Ap, Dr. Thomas Wanggai, Steven Suripaty, Mina Sangkek, Aristoteles Masoka, Willem Onde, Mekianus Salossa, Musa Keba, Abner Asmuruf dan lain sebagainya.

Berbagai kasus tindakan kejahatan pelanggaran HAM seperti pembantaian oleh TNI (ABRI) di seluruh dataran tanah Papua, antara lain:

- Pada Tahun 1965 di Manokwari
- Pada Tahun 1968 dan Tahun 2000 di Sorong di halaman gedung Gereja Imanuel Boswezen
- Peristiwa Ayapo Berdarah dengan korban 70 orang
- Pada Tahun 1977 di Jayawijaya
- Pada Tahun 1984 dan 1988 di Sarmi Jayapura
- Pada Tahun 1977 dan 1986 di Timika

- Pada Tahun 1989 di Mapenduma (Puncak Jaya)
- Pada Tahun 1998, pembunuhan di Biak dan Abepura
- Pada Tahun 2001 di Bonggo Jayapura
- Pada Tahun 2001 di Wasior-Manokwari
- Pada Tahun 2001 di Yapen Waropen
- Pada tahun 2001 di Merauke

Kejadian demi kejadian yang mengakibatkan adanya pembunuhan dan pembantaian terhadap rakyat Papua serta para pejuang emansipasi Papua dan berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI (ABRI) dan Kepolisian, dapat memberikan kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki itikad baik terhadap rakyat Papua untuk menumbuhkan dan mengembangkan identitas kepapuaan mereka. Dengan perkataan lain, tidak ada peluang dan kesempatan yang diberikan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan kepada rakyat Papua untuk dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan identitas budaya mereka. Kesediaan ini justru menjadi faktor utama bagi rakyat Papua untuk tidak merasa menjadi orang Indonesia.

Fakta menujukkan bahwa masyarakat Papua telah tiba pada suatu tahap paling akhir dan merata di berbagai lapisan masyarakat, untuk secara kolektif berusaha menggunakan identitas dirinya sendiri, seperti penggunaan nama Papua, bendera *Bintang Kejora* dan lagu kebangsaan *"Hai TanahKu Papua"* sebagai manisfestasi dari nasionalisme Papua.

Pada kenyataan ini, psikologi subyektifitas keindonesiaan telah 'dirusak' sendiri oleh praktek kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Artinya, kesadaran psikologis masyarakat Papua

menyangkut proses kepapuaannya semakin kuat untuk mengembalikan identitas jatidiri sebagai orang Papua.

## B. OTONOMI KHUSUS VERSUS MERDEKA

Saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan, saat itu pula terjadi polemik di seputar peradaban dan kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah keturunan bangsa *melanesoid* dan Papua adalah keturunan bangsa *negroid*. Dari berbagai perbedaan yang ada lahirlah Sumpah Pemuda dengan harapan akan dapat mempersatukan perbedaan tersebut. Namun hal itu ternyata diabaikan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga era Orde Baru (21 Mei 1998), dengan berbagai argumen, antara lain :

1. Pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tidak ada perwakilan pemuda Papua yang hadir. Yang ada hanya Pemuda Jong Sumatera, Jong Jawa, Jong Celebes dan Jong Ambon.
2. Pada saat upacara Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak ada rakyat Papua yang hadir.
3. Batas wilayah Negara RI adalah mulai dari Sabang sampai Maluku.

Pada hakekatnya, Indonesia dapat membentuk kesatuan budaya meskipun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, termasuk nasionalisme rakyat Papua. Perlu diingat bahwa, yang dimasukkan ke dalam nasionalisme Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan kemanusiaan.

Ironisnya, cita-cita luhur Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, oleh Ir. Soekarno malah dibelokkan

menjadi tujuan untuk dirinya sendiri. Nasionalisme menjadi proyek politik semata-mata. Hal ini terbukti ketika Pancasila dapat diperas menjadi satu sila. Bukan kemanusiaan yang dijadikan intinya melainkan gotong royong.

Kemanusiaan bersifat universal, sedangkan gotong-royong adalah terminologis Jawa. Epistemologi Soekarno sangatlah Jawa, demikian pula Soeharto, tak kalah Jawanya. Nasionalisme yang identik dengan gotong royong itu telah mendominasi politik Indonesia selama 57 tahun, pasca Indonesia merdeka. Dominasi epistemologi itu mulai digugat dengan kebangkitan Aceh yang menuntut referendum untuk memisahkan diri, Riau dan Papua pun menyusul. Hal ini merupakan suatu refleksi dari keinginan melepaskan diri dari kesan imperealisme dan intervensionis Jawa.

Politik Orde Baru dan Soeharto adalah politik Jawa yang tertutup dan sentralistik. Jawanisasi dalam kehidupan politik sangat jelas dalam perilaku politik Orde Baru, dan hal itu tanpa disadari menyimpan bom waktu. Kini gejala anti Jawa (Jakarta) muncul dalam berbagai aksi dan tuntutan pemisahan diri di wilayah-wilayah tertentu.

Gejala di berbagai wilayah terutama di Aceh dan Papua, bukan lagi berkembang dari otonom ke federal tetapi dari otonom ke merdeka. Kondisi di kedua wilayah tersebut justru diperburuk oleh aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparat militer dan Kepolisian Indonesia.

Walaupun pemerintah pusat berinisiatif memberikan otonomi khusus kepada kedua daerah tersebut, namun keinginan untuk memisahkan diri tetap kuat, sebab tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri terus terjadi walaupun UU Otsus sudah disahkan dan

dilaksanakan. Contohnya penembakan terhadap Rektor IAIN, Sekwilda Aceh, anggota DPRD Aceh dan penculikan terhadap Ketua PDP Theys Hiyo Eluay pada tanggal 10 November 2001 dan Aris Masoka (sopir Theys) oleh Kopassus.

Papua yang kaya akan sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan oleh elite kekuasaan Orde Baru (Soeharto), konglomerat Jakarta dan perusahaan multinasional Freeport Mc. Moran. Demikian juga perusahaan minyak di Sorong yang setiap tahun memberikan sumbangan terbesar ke negara sebanyak Rp 94 triliun. Padahal alokasi dana APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat ke provinsi Papua hanya sebesar Rp 836 miliar, hal ini tidak seimbang bahkan tidak adil sama sekali.

Meskipun posisi dan peran Papua sangat sentral dalam perekonomian nasional namun 1.738 (80%) desa dari 2.000 desa di Papua termasuk desa miskin dan masuk dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sekitar 10,7 juta hektar tanah dan hutan Papua telah dikapling bagi 44 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH ), sehingga masyarakat asli pemilik hak adat malah dibatasi haknya untuk mengambil kayu bakar.

Nasionalisme bangsa dalam bentuk aspirasi dan tuntutan dari rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI bukanlah persoalan budaya dan ekonomi semata namun sebuah perwujudan politik dari akumulasi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Persoalan ketidakadilan, diskriminasi, kejahatan dan pelanggaran HAM.
2. Pembagian kekuasaan dan hasil kekayaan alam yang tidak adil
3. Kemiskinan, kebodohan, pengrusakan lingkungan
4. Kuatnya rasa nasionalisme yang tertanam dan menimbulkan pernyataan

perasaan senasib bagi rakyat Papua dari Port Numbay sampai Port Sagawin karena terjajah.

Oleh karena kesadaran baru yang timbul dari rasa nasionalisme seluruh rakyat Papua telah tiba pada sebuah keyakinan yang kuat bahwa hanya dengan memisahkan diri atau merdeka dari RI maka rakyat Papua akan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

## C. TIMOR TIMUR JAJAK PENDAPAT HARUS BELAJAR DARI KASUS PEPERA 1969 DI PAPUA

Pada tanggal 30 Agustus 1999 rakyat Timor Timur menyelenggarakan jajak pendapat. Mereka diperhadapkan pada dua opsi yaitu, *otonomi khusus*, dengan tetap berintegrasi dengan Indonesia, atau *merdeka*, yakni membentuk negara baru, lepas dari NKRI. Proses serupa juga dilakukan PBB dengan Indonesia di Papua Barat, dari tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969, dengan menetapkan dua pilihan, yaitu ***merdeka penuh***, dengan pembentukan negara sendiri (Papua Barat) atau ***berintegrasi*** dengan NKRI.

Bertolak dari pengalaman empiris pelaksanaan Papera tahun 1969 di Papua, penulis berusaha untuk merekontruksi kejadian lewat pendekatan sejarah politik untuk melihat persamaan :

1. Psikopolitik yang berbentuk aksi-aksi pemberontakan seperti gerakan OPM, aksi-aksi demonstrasi, pengibaran bendera Bintang Kejora, tuntutan merdeka dengan pemisahan diri dari NKRI setelah 40 tahun berintegrasi.
2. Pengalaman empiris membuktikan bahwa pelaksanaan Pepera tahun

1969 di Papua sangat sarat dengan rekayasa politik, manipulasi uang disertai dengan ancaman dan intimidasi aparat keamanan TNI/Polri atas rakyat Papua, meskipun rakyat Papua telah menyatakan bergabung dengan Indonesia.

3. Polemik tentang status politik Papua Barat dapat bermuara pada New York Ageement tanggal 15 Agustus 1962, yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda tanpa melibatkan rakyat/wakil-wakil rakyat Papua di PBB. Perjanjian tersebut dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi pada tanggal 24 September 1962 No. 1752/XVII.

Pada tanggal 1 Oktober 1962 dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia dan pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan rakyat Papua menyatakan *"Hari Berkabung Nasional atau Hari Kematian Nasional Bangsa Papua"* setiap tanggal 1 Mei 1963, karena merupakan sejarah aneksasi bangsa Indonesia terhadap bangsa Papua.

Lebih tragis lagi, pemerintah Indonesia telah merekayasa dan memanipulasi suatu aturan permainan yang sangat melenceng dari isi pasal 18 New York Agreement di mana penyelenggaraan Pepera tahun 1969 atas dasar *one man one vote*, namun diganti dan diubah dengan sistem perwakilan (proporsional), melalui Operasi Khusus (OPSUS) yang dipimpin oleh Ali Moertopo.

Untuk menunjang sistem perwakilan, **Ali Moertopo** membentuk sebuah Dewan di Papua yang disebut dengan nama **"Dewan Musyawarah Pepera" (DMP)** yang beranggotakan 1.025 orang yang terdiri dari tokoh-

tokoh masyarakat yang direkrut dan ditentukan bukan dari rakyat, tetapi justru dipilih dan ditentukan oleh pemerintah Indonesia melalui Operasi Khusus (OPSUS). Papua pada waktu itu terdiri atas delapan kabupaten yaitu:

a. Jayapura
b. Teluk Cenderawasih
c. Manokwari
d. Sorong
e. Fak Fak
f. Jayawijaya
g. Merauke
h. Paniai

Alasan pembentukan DMP oleh OPSUS adalah:

1. Masyarakat dan penduduk Papua dianggap masih terbelakang, bodoh dan rendah tingkat pendidikannya, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi proses penentuan pendapat rakyat.
2. Alasan kondisi geografis dalam rangka proses sosialisasi Pepera.
3. Selain rekayasa dan manipulasi pelaksanaan Pepera melalui OPSUS ada juga tindakan represif atau kekerasan yang dilakukan oleh TNI/ Polri dalan bentuk:
   - ➪ Aksi-aksi intimidasi
   - ➪ Ancaman kekerasan
   - ➪ Pelanggaran HAM atas rakyat dan penduduk Papua
   - ➪ Para anggota DMP yang berjumlah 1.025 orang itu telah

dikarantina /diisolasi dari masyarakat, lalu diindoktrinasi dengan keharusan untuk memilih integrasi dengan Indonesia. ***Jika tidak memilih integrasi maka anggota DMP tersebut akan merasakan akibatnya yaitu dihukum atau ditembak mati***. Pengakuan ini disampaikan anggota DMP Theys Hiyo Eluay, Ketua LMA Papua dan Drs. Baas Retob, mantan Pegawai Kantor Perwakilan Pemda Papua di Jakarta.

Hasil pelaksanaan Pepera 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 dilaporkan pada Sidang Umum Majelis Umum PBB pada bulan September 1969 oleh utusan khusus Sekjen PBB Ortizan (diplomat Bolivia). Perlu disampaikan bahwa, hasil pelaksanaanPepera tahun 1969 yang kepada Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1969 hasilnya ditolak oleh 2/3 anggota PBB. Adapun alasan penolakan atas hasil Pepera tahun 1969 di Papua adalah sebagai berikut:

1. Tidak jujur dan tidak adil, bahkan tidak sesuai pasal 18 New York Agreement yang diubah menjadi sistem perwakilan proporsional (DMP 1.025 orang)
2. Sebagai reaksi atas penolakan 2/3 Anggota Majelis Umum PBB maka dikeluarkan *nota diplomatik* yang mencatat bahwa pernah diadakan semacam pemilihan umum di Papua. Perlu ditambahkan bahwa, pada saat perdebatan mengenai hasil Pepera, Koffi Anan (salah seorang Sekretaris Yunior dari Sekjen PBB, dan kini menjabat Sekjen PBB) pernah berada di Papua khususnya di Kabupaten Fak Fak menjelang Pepera tahun 1969.

## D. TIMOR TIMUR MERDEKA PAPUA PUN MERDEKA

Dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998, timbul semangat di kalangan rakyat untuk menyelesaikan segala masalah ke permukaan. Semua permasalahan yang tertutup rapat sepanjang 32 tahun masa Orde Baru berkuasa dapat dipertanyakan, digugat, dan diuji untuk diminta penyelesaiannya.

Salah satu persoalan yang paling hangat adalah kasus Timor Timur. Hasilnya pemerintah Indonesia menawarkan jejak pendapat. Tawaran ini memancing daerah lain untuk melakukan hal yang sama, seperti Papua setelah kejatuhan Soeharto beberapa tahun ini juga mengalami berbagai gejolak. Hal ini terbukti dari aksi-aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora pada awal bulan Juli dan Oktober 1998 di seluruh wilayah Cendrawasih.

Sudah 40 tahun sejak 1 Mei 1963 keterlibatan RI di Papua, dan sejak itu pulalah intervensi dan hegemoni Indonesia atas hak asasi manusia bahkan hak adat atas basis-basis tradisional masyarakat seperti tanah adat mereka yang dimanfatkan tanpa mempertimbangkan kehadiran manusia Papua. Akibatnya, lahir dan muncul perasaan diperlakukan tidak adil dan rasa tidak puas akibat penjajahan. Masyarakat dapat membandingkan situasi dan kondisi mereka tatkala masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan Indonesia, sehingga menurut mereka ada timbul semacam penjajahan baru (nekolonialisme), atas penduduk setempat.

Hal ini mungkin bisa dibandingkan dengan masa-masa awal tatkala masuknya pemerintahan Dai Nippon Jepang di Jawa (Indonesia), pada tahun

1942 yang memperlakukan penduduk Indonesia seperti saudara kandung. Namun perlakuan itu tak bertahan lama, karena yang muncul justru wajah asli penjajahan pemerintahan fasis militeristik Jepang di Indonesia yang berakhir pada perang Pasifik 1945.

Dari diskusi selama 6 bulan terakhir di tahun 2001 bisa diidentifikasi dua pendekatan guna menjelaskan perasaan diperlakukan tidak adil dan rasa tidak puas masyarakat Papua pada pemerintah di wilayahnya sehingga muncul dan lahir ide atau pemikiran dan tuntutan Papua merdeka melepaskan diri dari NKRI yaitu :

### 1. Pendekatan Pembangunan

Perasaan diperlakukan tidak adil dan rasa tidak puas rakyat Papua terhadap Indonesia berdasarkan pengalaman empiris pelaksanaan pembangunan nasional selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, dapat ditemui beberapa faktor sebagai ekses dari pelaksanaan pembangunan di Papua antara lain :

#### a. Proses rekrutmen dan dominasi kebijaksanaan politik

Pandangan yang berkembang selama 40 tahun integrasi adalah, orang Papua diperlakukan secara tidak adil bahkan diskriminatif oleh pemerintah RI, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dan berperan aktif. Hal ini terbukti dari proses rekrutmen untuk menduduki jabatan-jabatan strategis karier dan politis, baik di pusat maupun di daerah seperti pencalonan bupati, walikota, Kakanwil. Bahkan, gubernur sekalipun cenderung menolak aspirasi

lokal dengan alasan rasionalisme implisit yang ditujukan pada orang Papua bahwa masih bodoh, kurang mampu, tidak ahli dan lain sebagainya. Maka tak heran jika tidak ada satu pun orang Papua yang menempati jabatan pada eselon II, III, IV atau V di pusat. Jangankan eselon II, eselon V saja pada sebuah departemen di Jakarta tidak dijumpai.

Jadi tak ada peran dan partisipasi orang Papua dalam pembuatan dan pengambilan keputusan politik mengenai diri mereka sendiri sehingga penyelesaian masalah-masalah politik sangat terbatas bahkan cenderung diabaikan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa ternyata Indonesia gagal membangun Papua selama 40 tahun.

**b. Eksploitasi kegiatan ekonomi**

Papua bisa dikatakan sebagai korban dari konspirasi politik tingkat tinggi antara Indonesia dan AS, hal ini terbukti dari *surat rahasia* Presiden John F. Kennedy yang ditujukan kepada Perdana Menteri Belanda pada bulan Juni 1961 yang menekankan agar West Papua segera diserahkan kepada Indonesia. Konspirasi tersebut bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi AS dalam eksploitasi dan eksplorasi tambang tembaga dan emas yang sekarang dikenal pada PT. Freeport Indonesia di Timika Papua.

Beberapa kasus eksploitasi kekayaan alam di Papua dengan tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat, yakni:

- PT. Freeport,
- Perusahaan Kayu Jayanti,
- Barito Timber,

- Usaha Mina Sorong,
- Das Mamberamo,
- PT. Henrison Sorong,
- Perusahaan minyak Sorong,
- Perusahaan ikan di Biak, dan lain-lain.

Hal yang sama pernah terjadi di Sorong pada tahun 1992 , dimana tindakan pemerintah Kabupaten Sorong, dalam hal ini terhadap penulis bersama delapan pemilik tanah adat oleh Bupati Sorong. Karena tidak bersedia menyerahkan tanah untuk kepentingan transmigrasi, maka pemilik tanah adat ditangkap dan ditahan/dipenjarakan di Markas Kodim 1704 Sorong selama 14 hari. Pada waktu kami dalam tahanan, penebangan lokasi pemukiman transmigrasi segera dilakukan dan yang bertindak sebagai kontraktor dalam proyek tersebut adalah ABRI.

### c. Interaksi sosial dan intervensi kebudayaan

Fakta sosial membuktikan dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis baik di kota besar maupun kehidupan bersama di lingkungan pemukiman di Papua, ada kecenderungan terjadinya kesenjangan dan disharmoni.

Adanya polarisasi yang tercermin dalam ungkapan *"pendatang versus penduduk asli"* atau *orang Papua* dan *orang non Papua (Indonesia)*. Demikianlah hubungan yang tidak harmonis ini menampakkan wajah primordialisme, kesukuan yang ekstrim atau feodalisme dalam jenjang struktur sosial yang ada dan, sebagai akibatnya muncullah suatu sikap inferior dan superior dalam hubungan dan interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis termasuk

intervensi budaya dan status sosial.

Adanya perlakuan yang tidak seimbang, tidak adil dan proporsional, terbukti dari anggaran Departemen Agama untuk wilayah Papua. Dimana masjid mendapatkan bantuan dana yang lebih tinggi sedangkan gereja tidak. Demikian pula kasus penempatan transmigrasi yang dapat menimbulkan ekses, penduduk asli Papua merasa dianaktirikan. Pendekatan pembangunan selalu menggunakan pendekatan birokratis dan meliterisme dalam menerapkan sebuah program seperti Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika.

Hal semacam ini pernah dialami oleh penulis yaitu pada tahun 1992, dimana rencana program transmigrasi masuk wilayah Desa Moswaren Kecamatan Aitinyo Kabupaten Sorong. Masyarakat yang mempunyai hak adat atas tanah adat sebenarnya dapat menolak program transmigrasi, tetapi apalah artinya kekuatan rakyat.

Pada tanggal 13 Agustus 1992 melalui rapat Muspida yang menghadirkan Bupati Sorong, Dandim 1704 Sorong, Kapolres Sorong, Departemen Transmigrasi Kabupaten Sorong dan Camat Aitinyo, masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanah bagi pemukiman transmigrasi, namun rakyat menolak. Apa yang terjadi? Rakyat ditodong dengan senjata untuk menanda tangani surat pelepasan tanah adat, penembakan gertakan terjadi di mana-mana sehingga pada saat itu penulis yang ikut sebagai pemberi motivasi langsung mengadakan protes dan perlawanan.

Di Papua juga terdapat rasa tidak aman dan kurang perlindungan hukum. Akibat pendekatan keamanan yang berlebihan, muncullah ungkapan *"Apakah orang Papua itu musuh ABRI atau ABRI itu memusuhi orang Papua"* karena

hak asasi rakyat selalu dipasung dengan stigma GPK/OPM.

## 2. Pendekatan Sejarah Politik

Dari segi sejarah politik, pelaksanaan pembangunan selama 40 tahun telah menendorong timbulnya berbagai masalah di Papua, hal ini dikarenakan:

a. Harus jujur diakui bahwa, integrasi Papua ke dalam NKRI merupakan kesalahan besar yang dilakukan Indonesia pada rakyat dan penduduk Papua. Kesalahan sejarah politik pada saat KMB 1948 di Den Haag (Belanda), tatkala Indonesia-Belanda membicarakan persoalan kedaulatan Indonesia, termasuk Papua, rakyat dan wilayah ini tidak dilibatkan secara "subyek". Meskipun pada saat itu wakil orang Papua seperti Silas Papare, Nicolaas Youwe, Herman Wajoi dan lain-lain dalam delegasi Indonesia, namun mereka tidak dilibatkan secara subyek untuk mempersoalkan status politik tentang tanah mereka (Papua). Keberadaan mereka hanya sebagai obyek sebab KMB merupakan titik awal permasalahan status politik Papua yang dipersoalkan antara Indonesia, Belanda dan Papua.

b. Persoalan Papua yang secara intensif dipersoalkan lagi pada tanggal 15 Agustus 1962, pada saat Perjanjian New York yang di tandatangani oleh Indonesia dan Belanda, dengan tisak melibatkan partisipasi dan peran orang Papua mengenai tanah mereka. Rakyat Papua hanya menjadi obek bukan sebagai subyek dari perundingan tersebut.

Seharusnya perundingan tersebut merupakan pertemuan segitiga antara Indonesia - Belanda - rakyat Papua, seperti Timor Timur.

Mengapa rakyat Papua perlu dilibatkan? Alasannya adalah konflik antara dua negara yaitu Indonesia-Belanda tentang wilayah Papua seharusnya melibatkan peran dan partisipasi aktif rakyat dan penduduk Papua kerena menyangkut nasib dan masa depan mereka, bukan nasib dan masa depan Indonesia atau Belanda. Menurut logika yang sederhana rakyat dan wilayah Papua yang sedang atau tengah menjadi konflik, seharusnya diikutsertakan sebagai subyek untuk menentukan pilihan politik, bukan antara Indonesia atau Belanda.

Pasca penandatanganan New York Agreement telah ditetapkan pasal 18, 19 dan 22, yang menyatakan bahwa rakyat Papua diberikan kewenangan untuk menentukan nasib sendiri melalui plebisit atau referendum. Namun hak duduk bersama ini telah diabaikan oleh pemerintah Indonesia-Belanda, dan inilah awal mula pelanggaran HAM Papua di bidang politik oleh Indonesia atau Belanda.

c. Pemerintah Indonesia diberi tanggung jawab umtuk mempersiapkan pelaksanaan Pepera tahun 1969 dengan sistem plebisit atau referendum, berdasarkan prinsip demokrasi yaitu, *one man one vote*, namun kenyataannya beebeda. Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto merekayasa suatu aturan permainan melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Rejim Soeharto merubah aturan New York Agreement

melalui sistem perwakilan dengan dibentuknya DMP di Papua, yang beranggotakan 1.025 orang wakil yang ditentukan oleh pemerintah bukan dari pilihan rakyat.

Alasan Pemerintah Indonesia untuk membentuk DMP adalah :

1. Pertimbangan dan kesulitan geografis
2. Alam dan angkutan
3. Tingkat pemahaman politik dari rakyat yang digambarkan masih bodoh dan primitif (alasan klasik pemerintah Indonesia).

Alasan tersebut hanya sekedar mendukung kepentingan dan strategi politik masyarakat Indonesia, karena Papua pada saat itu masih berada dalam teritorial kerajaan Belanda. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa di bulan Juni 1961 rakyat Papua mampu untuk melakukan pmilihan umum dengan sistem distrik penuh dengan menggunakan sistem *one man one vote*?

Jadi, delapan tahun sebelum pelaksanaan Pepera, atau tiga tahun setelah Pepera, rakyat Papua untuk pertama kalinya di bawah rejim Orde Baru (tepatnya tahun 1971) mampu untuk melaksanakan dan mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan *one man one vote*.

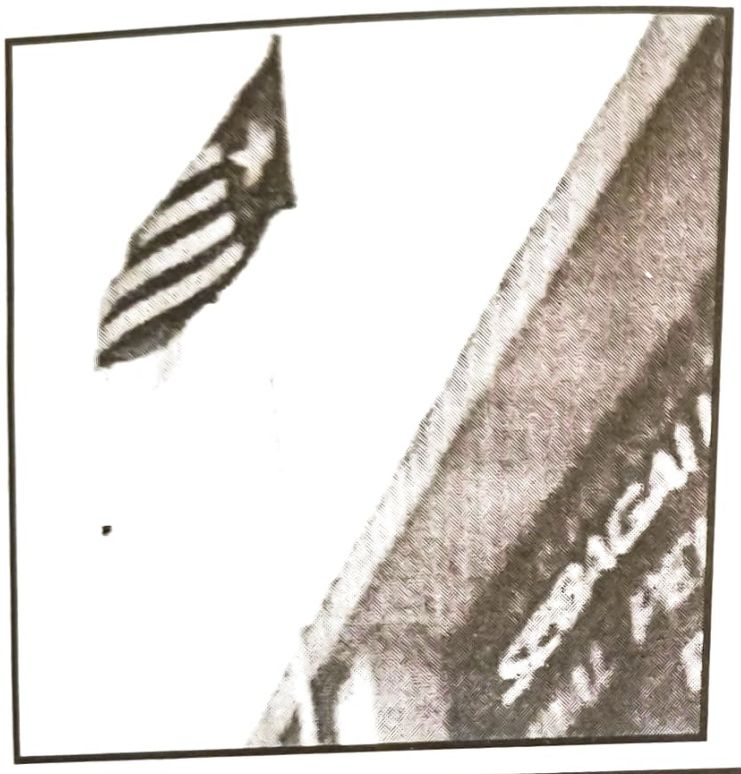
Jika demikian, menurut pendapat penulis, sampai pada tingkat semacam itu ternyata pengalaman sejarah politik membuktikan bahwa rekayasa dan manipulasi politik Indonesia sangat canggih untuk mengkhianati, bahkan melecehkan hak asasi dari suatu kelompok masyarakat di muka bumi yang hendak menentukan nasibnya sendiri.

Selain itu Indonesia tidak jujur sebagai bangsa yang beradab berdasarkan Pancasila dan UDD 1945 dalam menantaati perjanjian internasional. Oleh karena

itu, kini saatnya pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan ulang guna mendekonstruksi sejarah awal integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI secara jujur tanpa ditutup-tutupi.

Alasan munculnya tuntutan Papua merdeka adalah persoalan kecurangan-kecurangan yang dilakukan melalui Pepera dan pelecehan sikap tidak konsistennya Indonesia dalam kaitan dengan ketaatan pada Perjanjian New York.

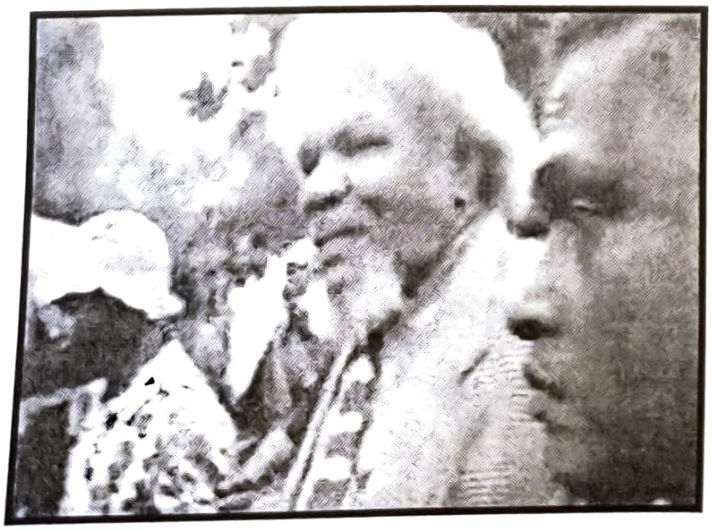
# BAB IV
# EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PEMBANGUNAN PAPUA



Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih berkibar secara berdampingan di Taman Imbi, Jayapura, tanggal 1 Desember 1999.



Satgas Papua mengamankan pengibaran Bintang Kejora 1 Desember 1999.



Mubes Rakyat Papua di Jayapura, tanggal 12 November 1999

# BAB IV
# EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PEMBANGUNAN PAPUA

## A. EKSISTENSI FREEPORT DI PAPUA

Dalam analisis antropologi sosial, pola budaya yang ditampilkan oleh kelompok masyarakat di pedalaman Papua adalah pola budaya masyarakat subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kegiatan meramu, yaitu suatu tingkat perkembangan budaya sebelum tingkat budaya pertanian. Dari sudut pandang ekologi, pola kehidupan yang ditampilkan oleh kelompok masyarakat di pedalaman Papua itu sebenarnya dapat menggambarkan perilaku penduduk ekosistem itu sendiri yaitu penduduk asli suatu wilayah tempat mereka hidup dan hal semacam ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak peradaban manusia itu.

Pada tahun 1936 tim peneliti (**Jean Jaeques Dozy**) menemukan kekayaan alam berupa tambang emas dan tembaga, di Erstberg (Timika, Papua). Hal ini semakin memancing para peneliti dari Eropa terus berdatangan ke Papua.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 telah lahirlah New York Agreement dan dibukalah Freeport Mac.Moran yang dikenal sebagai perusahaan induk dari

PT. Freeport Indonesia.

Keberadaan Freeport di Papua tidak dapat dilepaskan dari perjuangan awal bangsa Indonesia dalam rangka merebut Papua dari pemerintahan Hindia Belanda. Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949 ternyata hanya menghasilkan pengakuan "Kedaulatan Indonesia" oleh kerajaan Belanda, sedangkan persoalan Papua mengalami kendala.

Sebagai penyelesaian akhir persengketaan mengenai Papua pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York (Amerika Serikat), telah ditandatangani New York Agreement antara pemerintah Indonesia dengan Belanda guna penyelesaian kasus Papua. Hasil keputusan New York Agreement tersebut antara lain :

a. Pada tanggal 1 Mei 1963 Papua (Irian Barat) dapat diserahkan kepada Indonesia
b. Sesuai dengan pasal 18 NewYork Agreement, lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969, diadakan jajak pendapat (Pepera) di Papua, dan hasilnya Papua Barat dianeksasikan secara ilegal masuk ke dalam wilayah NKRI.

Upaya diplomasi politik antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan kasus Papua mengundang banyak campur tangan negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat. Presiden John F. Kennedy sangat berkepentingan dengan posisi strategis Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang cenderung berpihak kepada negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan RRC. Bila tidak dapat dibendung, maka akan berkuasalah komunisme di Asia terutama di Asia Tenggara, seperti di Vietnam, Laos, Kamboja termasuk Indonesia.

Oleh sebab itu, persoalan Papua segera diselesaikan Presiden John F. Kennedy melalui kunjungannya ke Jakarta pada tahun 1962 untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Sementara itu, AS terus menekan Belanda agar mau melakukan perundingan-perundingan rahasia dengan pihak Indonesia guna penyelesaian kasus Papua.

Hal lain yang dilakukan oleh Presiden John F. Kennedy yaitu mengeluarkan *'Surat rahasia'* yang ditujukan kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J. E. de Quay pada tanggal 2 April 1962, yang isinya antara lain :

a. Agar Belanda dengan ikhlas melepaskan Papua Barat ke Indonesia, karena apabila dibiarkan berlarut-larut hal itu akan menambah kemarahan Soekarno sehingga akan memperburuk situasi dan akan menggiring Indonesia jatuh ke tangan komunis.
b. Adanya kepentingan ekonomi Amerika di Papua Barat, dengan ditemukannya kekayaan alam berupa tambang emas dan tembaga pada tahun 1936 oleh Jean Jacques Dozy di Erstberg (Timika) Papua Barat.

Sesuai dengan isi New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, sejak tanggal 1 Mei 1963 Papua Barat menjadi wilayah "Administratif Republik Indonesia". Selanjutnya lima tahun kemudian harus dilakukan referendum/plebisit bagi penduduk Papua untuk menentukan *"nasib dan masa depannya sendiri"*. Memenuhi hal itu, pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 dilaksanakan ***Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)*** yang kemudian oleh rakyat Papua dinilai tidak sesuai dengan pasal 18 New York Agreement, karena Pepera diadakan jajak pendapat (Pepera) seharusnya menggunakan prinsip *"one man one vote"*. Tetapi prinsip itu tidak dilaksanakan sepenuhnya akibat adanya rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

lewat Operasi Khusus (OPSUS) Ali Moertopo di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Timbul pertanyaan kritis bila dikaitkan dengan keberadaan Freeport Indonesia (Papua). Mengapa pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Soeharto telah berani melakukan penandatanganan kontrak karya pertama pada tahun 1967? Padahal saat itu status politik dan hukum wilayah Papua Barat masih berada dalam situasi *"status quo"*, sebab Pepera baru berlangsung 1969. Dengan kata lain, status wilayah Papua Barat masih menjadi agenda pembicaraan PBB. Dan pertanyaan selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab atas penandatanganan Kontrak karya tersebut, sementara status politik dan hukum wilayah Papua masih dalam status quo?

Kesimpulan penulis, hal ini merupakan konspirasi politik antara Presiden John F. Kennedy (Amerika Serikat) dengan Presiden Soekarno (Indonesia). Kemudian hasil konspirasi itu dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengorbankan kepentingan, nasib dan masa depan komunitas sosial bangsa Papua. Jadi bertemulah dua kepentingan, yakni kepentingan Indonesia dengan kepentingan keutuhan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, sementara Amerika Serikat dengan kepentingan kapitalis dalam rangka mengelola emas dan tambang di tanah Papua.

Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada, sejak tahun 2000 PT. Freeport telah membantu rakyat Papua dalam upaya pemberdayaan penduduk dan masyarakat, terutama tujuh suku di wilayah eksplorasinya, melalui pemberian bantuan berupa beasiswa ke 5000 anak Papua yang bersekolah dari SD hingga program S2 di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

## B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan pioner yang cukup sukses dan mampu bertahan untuk beroperasi dalam kondisi yang cukup berat, telah meyakinkan para investor asing untuk melirik Papua sebagai wilayah masa depan untuk investasi skala besar di sektor pertambangan.

PT. Freeport telah mendukung sektor ekonomi kerakyatan di tanah Papua dengan melibatkan kelompok masyarakat asli. Keadaan masyarakat asli dari tradisi meramu ke mengenal pasar, dari tahap yang sangat sederhana hingga berkembang menjadi semangat kewirausahaan yang cukup tinggi di kalangan penduduk lokal terutama di sekitar Timika, merupkan hasil pembinaan dan bimbingan putra daerah yang dilakukan oleh PT. Freeport pada beberapa tahun lalu sehingga banyak pemuda dan pemudi Papua mulai menekuni bisnis antara lain :

1. Usaha di bidang Pertanian,
2. Peternakan,
3. Perikanan,
4. Koperasi dan jasa,
5. Industri bahan bangunan,
6. Usaha pertamanan,
7. Seni ukir, dan lain-lain

Tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia untuk mendukung pembangunan di Papua yang dilaksanakan sejak tahun 1974, selaras dengan tingkat pendapatan perusahaan dan besarnya keuntungan. Tanggung jawab tersebut dinyatakan melalui penyediaan 1% dari penghasilan kotor PT. Freeport

Indonesia yang disebut *Fund For Irian Jaya Development (FFIJD)*. Pada tahun 1996 telah diprogramkan Pengembangan Wilayah Timika Terpadu ( PWT II ).

Pada akhir tahun 1998 Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia, bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat yang bermukim di Lembah Waa di sekitar Tembagapura untuk memberdayakan masyarakat. Mereka dimukimkan di dataran rendah Timika pada lokasi SP IX da SP XII, serta diberdayakan melalui kegiatan ekonomi pasar di bawah bimbingan Yayasan Jaya Sakti Mandiri (YJM), sebuah yayasan yang dibentuk oleh PT. Freeport Indonesia.

Wujud dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia adalah :

a. Membangun rumah masyarakat, 103 unit di SP IX dan 350 unit rumah di SP XII.
b. Membangun sarana umum berupa sekolah, gereja, klinik, sarana air bersih, balai desa dan lain-lain
c. Memberikan pelatihan kepada para petani
d. Membentuk dan membina koperasi.

## C. NASIB ORANG PAPUA

Waktu rakyat Papua sedang menyongsong pelantikan Yacobus Salossa menjadi Gubernur Provinsi Papua, rakyat mempunyai harapan. Rakyat berharap Yacobus dapat menciptakan kesejahteraan dan mengembalikan kepercayaan serta harga diri orang Papua yang telah terpinggirkan selama 40

tahun. Diharapkan lewat otonomi khusus bagi rakyat Papua, Gubernur bersama DPRD Papua dapat memprioritaskan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di semua aspek kehidupan. Dengan otoritas yang dimilikinya, sudah saatnya juga Gubernur Papua perlu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan penting tentang kebijaksanaan perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi secara ekonomi, politik dan sosial masyarakat seperti PT. Freeport Indonesia.

Penulis selalu bertanya kepada Tuhan dalam pikiran doa-doa setiap hari, "Mengapa Tuhan menciptakan gunung-gunung batu dan salju yang indah itu di daerah Papua, khususnya Amugme? PT. Freeport Indonesia, ABRI, pemerintah dan orang luar datang mengambil hasil kekayaan alam Papua sementara rakyatnya sendiri menderita, ditekan, dibunuh tanpa alasan. Sungguh, Penulis benar-benar marah pada Tuhan. Mengapa dia menempatkan segala yang indah dan barang tambang itu di sini?

Deretan bait-bait puisi di atas, dikutip dari *Tuarek Narkine,* tetua suku Amugme pada tahun 2002 dalam buku yang berjudul *"Merana di Tanah Kelimpahan"* yang diterbitkan oleh EL-SAM (1998).

Meskipun bertahun-tahun suku Amugme dan suku lain di Papua telah dan sudah habis air mata bahkan darah, namun Amugme masih beruntung. Mereka masih punya *Tuarek Narkitme*, Tom Beanal, mama Yosepha dan ketua-ketua lain yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Tegaklah di dataran rendah, ada suku Komoro yang nyaris terabaikan. Suku yang masih meramu hidup dari hasil hutan dan berburu serta mencari ikan di sungai itu sebenarnya jauh lebih sengsara. Kehidupan sosial budaya mereka berubah total, karena tanah adat mereka menjadi kawasan pembuangan tailing, limbah penambangan PT. Freeport Indonesia.

Sungai Aykwa tak dapat lagi dilayari, padang berburu menyempit dan untuk memperoleh sagu mereka harus berjalan jauh ke hilir. Tak ada yang menyuarakan nasib mereka, karena suku Komoro sangat individual dan tidak memiliki pemimpin yang benar-benar ditaati. Bertahun-tahun pula mereka hidup dengan kualitas yang buruk. Keadaan ini membuat subsuku Komoro di Nawaripi, pada tahun 1982 dipindahkan dan dimukimkan oleh Departemen Sosial ke kawasan Koperapoka Baru di Timika.

Tahun 1994, pemerintah dan Freeport membangun pemukiman untuk masyarakat Nawaripi di Nawaripi Baru, sekitar 3 km dari Timika. Tetapi jumlah rumah yang dibangun tidak sepadan dengan jumlah keluarga yang dipindahkan sehingga satu rumah berukuran tiga puluh meter persegi dihuni beberapa keluarga. Akibatnya, terjadi migrasi pada tahun 1997. Dari 100 keluarga, hanya 53 keluarga yang tetap tinggal di Nawaripi Baru. Migrasi itu berlangsung tidak atas dasar pola tradisional, sehingga membuat orang Nawaripi tercerai berai dari tanah adat, dusun sagu, ikan sungai bahkan air tawar mereka.

Kembali kepada suku Amugme, protes tiada henti dan pembentukan perwakilan masyarakat Amugme yang disebut LEMASA menghasilkan *trust fund* sebesar 1% dari pendapatan Freeport sejak tahun 1996, seperti diungkapkan oleh Mindo Pangaribuan, Departemen Komunikasi Eksternal Freeport, bahwa:

a. Bantuan berupa *trust fund* sebesar 1 % pada tahun 1996 sebesar Rp. 34,5 miliyar.
b. Tahun 1997 meningkat menjadi 15 juta dolar Amerika Serikat.
c. Tahun 1998 menjadi 13 juta dolar Amerika Serikat.
d. Tahun 1999 menjadi 12 juta dolar Amerika Serikat.

Yang menjadi pertanyaan, selesaikah persoalan? Ternyata tidak. Masyarakat tetap menjadi miskin dan persoalan sosial bermunculan di mana-mana. Untuk itu diundanglah ***Labat Anderson*** untuk melakukan audit sosial. Hasilnya, ia memberikan laporan pada tahun 1997 yang menyebutkan bahwa :

a. *Trust fund* yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan tujuh suku yang ada di kawasan pertambangan ternyata tidak mencapai sasaran.
b. Pihak Freeport lebih bersifat reaktif dari pada rensponsif.
c. Adanya perbedaan pandangan sosial budaya antara masyarakat lokal dengan perusahaan.
d. Prosedur manajemen dan filosofi manajemen Freeport seperti materialisme, hak kepemilikan individu, hukum tertulis formal, kesenjangan (birokrasi) dan pengambilan keputusan tanpa konsensus bersama, bersifat baku sehingga menimbulkan salah pengertian
e. Lemahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Fak Fak dan Timika sehingga menimbulkan kekacauan peran dan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah daerah.
f. Pemerintah daerah dan militer (TNI/Polri) banyak memperoleh bantuan Freeport, sehingga cenderung memihak kepada kepentingan perusahaan.

Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dan kejahatan HAM di seputar wilayah operasi Freeport. Dari hasil audit yang dilakukan ternyata telah terjadi banyak penyimpangan, maka Labat Anderson dapat merekomendasikan berbagai hal, antara lain :

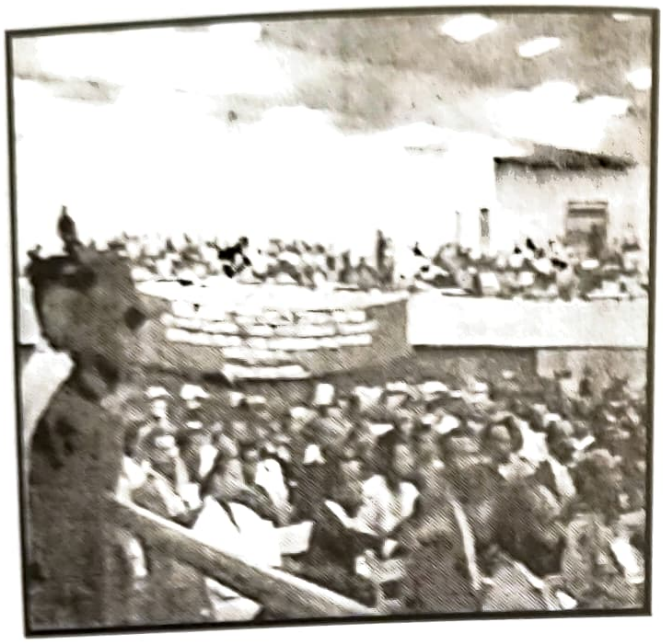
a. Riset antropologi,
b. Pengembangan/pemberdayaan institusi lokal,
c. Melibatkan LSM,

d. Membuat perjanjian dan perundingan baru.
e. Mengadakan pertemuan berkala dan koordinasi dengan masyarakat.
f. Freeport harus merubah struktur manajemen.
g. Membangun dengan kearifan lokal.
h. Kantor pusat Freeport di Jakarta dapat dialihfungsikan ke Papua.
i. Presiden direktur Freeport sudah bisa dipercayakan kepada putra Papua asli.

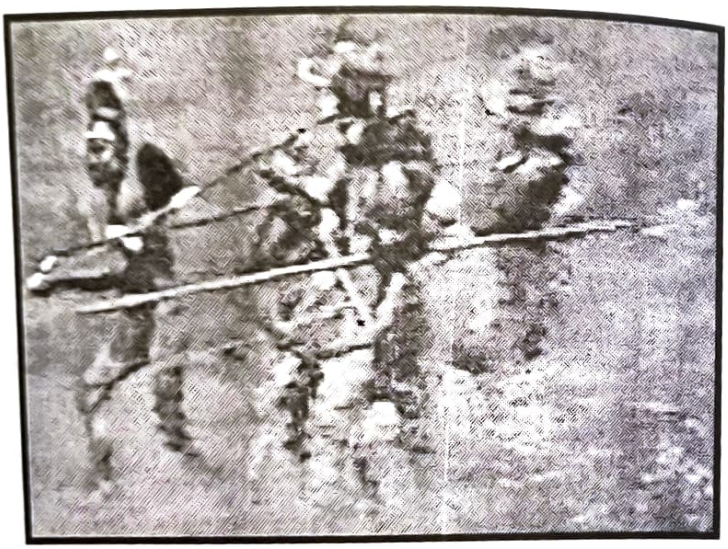
Dalam kurun waktu 37 tahun beroperasi di Papua, PT Freeport ternyata gagal dalam mempersiapkan sumber daya manusia orang Papua. Sebagai contohnya, N. A. Maidepa yang kini Kakanwil Departemen Pertambangan Provinsi Papua, Dr. John Nasei, geolog lulusan Jepang, John Karma geolog lulusan Amerika dan Jacobus Hans Wospakrik ahli Fisika murni yang kini menyelesaikan program S3 di Amerika Serikat, tidak dipakai. Mengapa manajemen tidak dipercayakan pada mereka?

Dari berbagai argumentasi yang disinggung di atas, ternyata sejarah kehadiran Freeport sejak awal telah menimbulkan komplikasi baik politik, ekonomi, sosial budaya bagi masyarakat Papua. Seharusnya *stake holders* sejak lama sudah harus menyadari kondisi psikologis rakyat Papua. Jangan lagi kepala orang Papua selalu ditundukkan dengan kekerasan.

# BAB V
# MEMAHAMI TUNTUTAN PAPUA MERDEKA



Suasana Kongres II Rakyat Papua (29 Mei s/d 4 Juni 2000)



Perlawanan rakyat Pupua menentang pemerintah RI.



Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969, yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara anggota PBB.

# BAB V
# MEMAHAMI TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

## A. INTEGRASI NASIONAL

Sebelum membahas masalah integrasi nasional lebih mendalam, ada baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu konsep dan definisi tentang etnis, integrasi politik, integrasi nasional dan integrasi teritorial.

### 1. Pengertian Integrasi

Ada beberapa pendapat tentang konsep dan definisi integrasi, antara lain:

a. Menurut Cynthia H. Enloe, kelompok etnik adalah suatu kesatuan individu yang memiliki rasa saling atas dasar ikatan budaya dan biasanya berkombinasi dengan agama, bahasa, suku dan adat istiadat dan suatu perasaan dari nenek moyang yang sama. Batas antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya yang memisahkan antara kita dan mereka tidaklah harus bersifat teritorial. Batas-batas ini merupakan perasaan

loyalitas bersama dan rasa berbeda dengan orang-orang luar. Demikian analisis akhir kelompok-kelompok etnik, seperti juga bangsa-bangsa, adalah suatu kesatuan kolektif sikap berpikir dan kesadaran akan perasaan persaudaraan. Kesadaran etnik berkembang melalui suatu komunitas bahasa, ras, agama dan kosentrasi regional dalam berbagai kombinasi.

b. Integrasi politik menurut Ronald L. Watt adalah penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat ataupun wilayah, ke dalam suatu organisasi politik yang bisa bekerja dan bertahan hidup. Sedangkan konsep integrasi nasional mengacu pada suatu proses atau kondisi penyatuan bagian-bagian bangsa yaitu masyarakat yang hidup di wilayah negara yang bersangkutan yang memiliki persamaan sejarah, kesatuan simbol dan perasaan subyektif yang mengikat antara satu anggota dengan anggota lainnya. Watt juga menjelaskan bahwa integrasi politik bisa tumpang tindih tidak saja dengan integrasi nasional dalam kasus negara-bangsa, tetapi juga pada suatu unit sub nasional yang lebih kecil atau dalam bentuk yang lebih luas lagi seperti organisasi politik mulitinasional.

c. Menurut klaim, untuk mendapatkan kebebasan dari pemerintah pusat biasanya sangat efektif di daerah-daerah yang ikatan-ikatan etnik, budaya dan bahasanya sangat kuat. Sering kali gerakan kebebasan tersebut secara khusus amat aktif di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Daerah-daerah ini kemungkinan besar adalah daerah-daerah pertama yang mengalami dampak negatif dari tumbuhnya sentralisasi kekuasaan

sehingga menunjukkan reaksi kuat. Pola konflik ini disebut oleh Milton J. Esman sebagai pola pusat dan pinggiran *(centre and periphery)*.

d. Sedangkan Myron Weiner berpendapat bahwa masalah yang amat serius dalam integrasi teritorial adalah upaya dari pemerintah yang baru untuk mengontrol wilayah perbatasan yang mereka warisi dari pemerintah kolonial. Demikian juga masalah integrasi nasional yang secara khusus mengacu pada masalah menciptakan perasaan nasional teritorial yang menutupi atau melenyapkan ikatan subordinat yang sempit.

Yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah proses berencana untuk menyatukan pemerintah negara dengan rakyat dan antara golongan rakyat yang satu dengan golongan yang lainnya, yang mendiami teritori suatu negara nasional yang sama, sehingga menjadi satu komuniti politik yang handal untuk mencapai cita-cita nasional. Sesuai dengan luasnya, cakupan integrasi nasional merupakan proses politik yang amat kompleks. Integrasi nasional ini mengacu pada konsensus politik berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, dimana konsensus politik ini sendiri bersifat dinamis. Konsensus yang sama dapat dipahami secara berbeda dalam pelaksanaannya oleh elite yang merumuskan konsensus itu.

Konsensus itu sendiri bisa dilanggar baik dengan sengaja maupun kerena terpaksa oleh keadaan. Generasi yang baru datang menyusul dapat memberikan tafsirannya sendiri terhadap konsensus yang ada atau menghendaki konsensus baru. Aspirasi dan kepentingan golongan dalam

negara nasional juga dapat berubah. Golongan yang ada dalam masyarakat, bahkan mungkin mempertanyakan manfaat eksistensi negara nasional itu sendiri khususnya jika kehidupan mereka di bawah negara nasional itu tidak jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Oleh karena itu, berdampingan dengan integrasi nasional yaitu terurainya kembali komponen-komponen negara nasional tersebut menjadi satu-satunya politik yang terpisah baik untuk dapat mendirikan suatu negara nasional baru, ataupun untuk bergabung dengan suatu negara nasional yang lain.

Disintegrasi nasional dengan konflik komunal antara pusat dan pinggiran tidaklah harus berbentuk kekerasan. Konflik komunal terbagi atas tiga tingkatan antara lain:

a. Beberapa konflik akan muncul dalam bentuk ketegangan karena dua atau lebih kelompok etnik dituntut untuk bekerja sama secara kooperatif.
b. Konflik bisa juga berbentuk oposisi politik terhadap program-program pemerintah pusat. Biasanya, konflik ini muncul karena anggota satu kelompok etnik percaya bahwa kementerian di pusat bertindak sebagai agen dari satu masyarakat etnik yang berkompetensi.
c. Konflik yang paling ekstrim berbentuk gerakan separatis, dimana satu kelompok etnik atau suatu koalisasi minoritas berupaya untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat.

Ikrar Nusa Bakti mengemukakan masalah tentang proses integrasi nasional Papua dengan perhatian khusus terhadap peranan luar negeri di daerah itu serta perkembangan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani gerakan separatis, antara lain:

a. Bahwa negara Belanda lah yang pertama kali menanamkan bibit separatis terhadap RI di daerah itu.
b. Gerakan separatis menjadi marak justru karena kesalahan strategi pemerintah RI sendiri yang dalam taraf awal sangat mengandalkan pendekatan keamanan. Adalah menarik bahwa penilaian terhadap kurang efektifnya pendekatan yang terlalu berat terhadap aksi militer justru dari pejabat tinggi ABRI di daerah itu sendiri yaitu, Pangkowilhan Letjend (Marinir) Kahpi Suriadiredja dan Pangdam Brigjend Raja Kami Sembiring Meliala.
c. Perhatian pemerintah RI yang terlalu besar terhadap pembangunan provinsi Timor Timur telah menimbulkan kecemburuan di daerah ini.
d. Kecemburuan penduduk lokal terhadap pendatang yang mempunyai kedudukan baik sebagai salah satu unsur yang menyulut perasan separatis.
e. Simpati terbuka atau tertutup yang diberikan pemerintah negara tetangga seperti Australia dan PNG.
f. Telah terjadi perubahan sikap negara-negara di Pasifik Selatan, yang kemudian menjadi anti terhadap NKRI.

Aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka disebabkan adanya faktor yang meningkatkan kesadaran kedaerahan, yaitu:

1. Secara nasional, modernisasi di daerah-daerah yang tertinggal. Adanya perbedaan ideologi, politik dan ekonomi untuk menciptakan kebencian dan ketakutan terhadap eksploitasi yang berasal dari wilayah yang lebih maju.
2. Kemampuan yang tak seimbang untuk mempengaruhi kehidupan perpolitikan di pusat juga merupakan faktor pengumpan bagi kebencian/

kemarahan dan meningkatkan kesadaran nasional

3. Dampak dari pengaruh-pangaruh eksternal baik langsung maupun tak langsung terhadap kesadaran nasional.

## 2. Proses Integrasi Papua

Papua Barat (Irian Barat) adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui New York Agreement yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusinya pada tanggal 21 September 1962 No. 1752 (XVII). Pada tangga1 Oktober1962 dilakukan Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintahan Sementara PBB *(United Nations Temporany Executive Authority-UNTEA)*. Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Indonesia, dan pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pada tanggal 19 Nopember 1969 Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat menjadi semakin sah dengan adanya Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) yang mencatat hasil Pepera tersebut.

Bila ditinjau dari sejarah, masuknya Papua Barat ke Indonesia amatlah singkat dan sederhana. Tetapi kenyataannya panjang dan rumit. Indonesia bukan hanya menggunakan cara-cara diplomasi untuk mendapatkan Papua Barat, tetapi juga dengan cara-cara militer. Pada fase pembebasan, yaitu antara tahu 1949-1963, sudah muncul benih-benih gerakan Organisasi Papua Merdeka.

Benih gerakan Organisasi Papua Merdeka ini dipupuk dan dikembangkan

oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an. Belanda sejak saat itu bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi di Papua tetapi juga pembangunan politik seperti Pembentukan Dewan Niew Guinea (Niew Guinea Raad), yaitu suatu kuasi parlemen yang pada tanggal 15 April 1961 dilanjutkan dengan upaya mendirikan negara Papua Barat dengan mempersiapkan beberapa tokoh Papua yang ada pada saat itu, antara lain Nicolaas Youwe, P. Torey, Markus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma dan Elieser Jan Bonay (yang kemudian menjadi Gubernur Irian Barat) dan Herman Wajoi serta Eduard Hegemur.

Pada tanggal 19 Oktober 1961 pemerintah Belanda mengijinkan Dewan Niew Guinea untuk dapat mengadakan Sidang Komite Nasional yang melahirkan beberapa keputusan, antara lain :

a. Bendara negara adalah Bintang Kejora;
b. Lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua;
c. Nama negara adalah Papua Barat;
d. Nama penduduk orang Papua;
e. Lambang negara adalah Burung Mambruk;
f. Mata uang negara adalah Rupiah Irian Barat (IB);

Masalah yang dapat menyebabkan bangkitnya kembali sikap antipati bagi gerakan OPM di Papua pada fase peralihan 1963-1969 untuk merdeka antara lain:

1. Sikap sebagian pejabat di Papua seperti baru menang perang sehingga dapat menumbuhkan persepsi di kalangan penduduk asli Papua bahwa pendatang itu adalah *the New Colonial Master.*
2. Para pejabat sipil maupun militer juga mengambil barang-barang

peninggalan Belanda dari Papua sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa seolah-olah pejabat tersebut merampok Papua, sehingga timbul suatu sikap antipati Indonesia di Papua.

3. Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa krisis ekonomi dan berdampak ke Papua yang mengakibatkan :
   a. Kesulitan untuk membangun Papua Barat walau telah dibantu oleh dana Belanda lewat FUNDWI (Dana bantuan PBB untuk Papua Barat), kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk saat itu sulit didapat dipasar, kalau pun ada harganya selangit.
   b. Banyak migrasi penduduk dari Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ke Papua, khususnya dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan Maluku, untuk mengadukan nasibnya di Papua. Hal ini tentunya sangat mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak mengecap pembangunan, tetapi juga terpental sebagai pedagang eceran di pasar-pasar di Papua.
4. Keinginan pemerintah untuk memantapkan tertib administrasi di Papua, yang menyebabkan banyak orang Papua yang terpental dari posisi mereka di pemerintahan Belanda, karena pemerintah Indonesia mengganti banyak pegawai orang Papua.
5. Keinginan pemerintah untuk mempercepat indonesianisasi di Papua, yaitu integrasi masyarakat Papua ke dalam NKRI, menyebabkan penggunaan pendekatan keamanan lebih menonjol daripada pendekatan persuasif dan pendekatan kesejahteraan. Dampak negatifnya, tidak sedikit orang Papua yang dulunya mendukung Indonesia dan mau bekerja sama dengan Indonesia sekarang berbalik

dan bersikap menjadi antipati kepada Indonesia. Dalam pandangan mereka, jika orang Papua Barat merdeka mereka bisa mengatur negaranya sendiri dan menikmati kemakmuran.

6. Situasi buruk yang terjadi di Papua pada saat itu dapat membangkitkan kembali sikap anti asing (antiamber), yang kemudian berubah menjadi pemberotakan. Suatu gagasan baru untuk mendirikan OPM secara resmi terbentuk pada tahun 1963 dan tahun 1964 di daerah *Mansinyek Ayamaru*. OPM pecah pada tahun 1965, yang dipimpin oleh Wompere, Permenas Awom, Abner Asmuruf (seorang Bister/Kepala Distrik) kecamatan Aitinyo, Musa Keba, Womsiwor, Marinus Athabu Ruben Kambuaya, David Naa, Yohanes Kareth, Jelmau, Wamban, Maipauw, dan lain-lain.
7. Pada tanggal 28 Juli 1965 salah satu kerusuhan atau pemberontakan paling besar terjadi di Oransbari Manokwari di bawah pimpinan Permenas Awom, dan pemberontakan yang sama juga terjadi Biak, Enarotali dan Wagheta.

## 3. Aksi OPM

Gerakan OPM telah melakukan berbagai aktivitas politik dan militernya antara tahun 1970-1984 di Jayapura, dan merembet ke Selatan dan PNG. Sampai saat ini, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Selandia Baru, Fiji, Kepulauan Salomon dan Samoa Barat, tetap tidak mengakui kedaulatan Indonesia di Papua Barat, bahkan secara resmi mendukung OPM. Pemerintah Vanuatu juga menyetujui untuk memberi tempat bagi aktivis OPM di Swedia,

Ghana, Yunani dan Belanda untuk mengadakan Konvensi Nasional Papua Barat.

Ada beberapa sebab mengapa Organisasi Papua Merdeka tetap melakukan kegiatan politiknya, antara lain :

a. Munculnya PNG sebagai negara merdeka pada tanggal 16 September 1975, yang memperlihatkan ternyata Papua juga mampu mandiri sebagai suatu negara merdeka. Secara geografis dan topografis di Papua juga terdapat sumber daya alam yang cukup banyak, hanya saja sejarah kedua wilayah tersebut memang berbeda sehingga Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia sedangkan PNG bisa menjadi negara sendiri.
b. Letak Papua yang berbeda di ujung timur Indonesia dan berbatasan dengan PNG merupakan sumber inspirasi bagi beberapa kalangan di daerah itu untuk tetap mempertahankan OPM. Artinya, gerakan-gerakan OPM bisa digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar tetap memperhatikan pembangunan sosial ekonomi dan politik di daerah tersebut.
c. Dialihkannya perhatian pemerintah Indonesia (pusat) dari Papua ke provinsi Timor Timur, menimbulkan rasa cemburu masyarakat dan kalangan intelektual di Papua soal pembangunan.
d. Masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan hankam yang ada di Papua saat ini tak jauh berbeda dengan situasi pada masa peralihan.
e. Adanya kesamaan rumpun bangsa. Ada beberapa kalangan di PNG yang mempertahankan perasaan **Solidaritas Persaudaraan Melanesia** *(Malanesian Brotherhood Solidarity)* terhadap saudra-sadaranya di Papua. Hal ini bisa menjelaskan mengapa secara tak resmi PNG tetap bersimpati

kepada OPM.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka bagi rakyat Papua telah terungkap dalam pernyataan sikap melalui Pandangan Umum Daerah dari 14 daerah kabupaten/kota di seluruh provinsi Papua pada tanggal 2 Juni 2000 di Gedung Olah Raga Cenderawaih Jayapura, dengan tegas menyatakan menolak integrasi dan meminta pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat yang dianeksasi pada tanggal 19 Desember 1961.

## B. AKSI PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA

### 1. Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Kontroversi antara perintah Presiden Gus Dur untuk menaikkan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua yang diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal S. Bimantoro kepada Kapolda Irian Jaya Brigjen Polisi S.Y.Wenas sudah selesai. Tetapi apakah permasalahan rakyat Papua sudah selesai?

Untuk dapat menjawab pertanyaan itu ada baiknya kita menelusuri kembali latar belakang sejarah dan makna simbolis dari aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora. Salah satu hal yang tidak pernah kita sadari sebagai bangsa adalah bahwa Bintang Kejora merupakan salah satu dari suatu paham

kebangsaan lain, nasionalisme Papua. Paham yang menghendaki wilayah Papua Barat menjadi negara bangsa *(nation state)* yang merdeka dan berdaulat penuh. Suatu nasionalisme yang pada awalnya dibangun oleh pemerintah Belanda, terutama di masa menjelang pelaksanaan KMB pada tahun 1949 bahkan sejak tahun 1945.

Lahirnya nasionalisme Papua diindikasikan dengan kegagalan KMB antara pihak Indonesia dan kerajaan Belanda dalam menentukan status politik wilayah Papua Barat yang diproklamasikan pada tanggal 1 Desember 1961 dengan pengibaran bendera *Bintang Kejora*, menyanyikan lagu kebangsaan *"Hai Tanahku Papua"*, pembentukan Dewan Papua (Niew Guinea Raad) dan TNP, (Tentara Nasional Papua).

Nasionalisme yang didasari pada suatu paham bahwa Indonesia dan Papua Barat tidak memiliki hubungan etnologis, sosiologis dan keagamaan. Sebagai bangsa yang telah dibina Belanda dengan orientasi ke dalam dan pernah menjadi anggota Forum Pasifik Selatan (6 Februari 1946), Papua Barat tak berkiblat ke Indonesia ataupun Belanda, tetapi ke Pasifik Selatan.

Cita-cita menjadi negara bangsa *(nation state)* yang merdeka dan berdaulat penuh itulah yang di-*bypass* oleh Perjanjian New York tanggal 15 Januari 1962, yang berlangsung tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual Papua, padahal perjanjian itu tidak menyangkut nasib bangsa Indonesia atau Belanda. Inilah sebuah konspirasi politik antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda yang mengorbankan harapan dan cita-cita sebuah komunitas sosial untuk mewujudkan Papua merdeka.

Proses Integrasi dengan RI menjadi pengalaman traumatik bagi komunitas

Papua, ketika simbol kebangsaan Papua Barat lagu, bendera bahkan nama Papua dinyatakan terlarang. Larangan tersebut mengakibatkan meletusnya pemberontakan bersenjata pertama di daerah pedalaman Ayamaru, yaitu *Mansinyek* pada tahun 1964 yang dimotori oleh Permenas Awom. Pemberontakan kedua di Manokwari pada tanggal 26 Juli 1965, yang dimotori oleh Lowdewik Mandatjan dan Awom bersaudara dengan dukungan politikus senior John Ariks, yang kemudian menghambat pelaksanaan proses pembangunan nasional di Papua, dan membuat wilayah itu benar-benar terisolasi dari pusat kekuasaan di Jakarta.

Isolasi yang dimaksud bukan saja dalam dimensi fisik geografis, tetapi juga isolasi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan dan politik. Oleh kerena itu berbagai bentuk pengalahgunaan kekuasaan dalam wujud pelanggaran HAM di tanah Papua nyaris tak pernah terbuka dan terselesaikan sampai ke pusat.

## 2. Tragedi Bintang Kejora

Tragedi berdarah terjadi dari Wamena Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya hingga Timika (Papua), pada peristiwa 6 Oktober 2000 lalu sebagai akibat instruksi operasi penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat kepolisian RI. Operasi penurunan Bendera ini kemudian memperoleh perlawanan keras dari masyarakat, khususnya Satgas Papua, yang berbuntut pada meninggalnya 40 korban jiwa, disamping yang luka-luka. Sesudah itu, terjadi pengungsian besar-besaran warga pendatang baik ke luar kota Wamena maupun yang

berlindung di Makodim setempat.

Permasalahannya, apakah dengan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok tanah Papua bisa menyelesaikan akar persoalan di Papua, atau justru semakin memperkeruh keadaan? Lebih tragis lagi, tragedi Wamena 6 Oktober 2000 telah membuktikan bahwa sesungguhnya pemerintah pusat di Jakarta tidak serius untuk menyelesaikan akar permasalahan masyarakat Papua selama 40 tahun (sejak 1962) berintegrasi.

Sangat mengherankan karena kejadian di Wamena itu sebenarnya tak muncul begitu saja. Bila diamati secara teliti dan saksama, peristiwa 6 Oktober 2000 timbul sebagai ekses dari instruksi Kapolri kepada Kapolda Papua yang kemudian diteruskan kepada bawahannya, Kapolres Wamena. Di Posko pertama bendera diturunkan oleh petugas kepolisian, khususnya Brimob, secara paksa. Di Posko kedua dan ketiga, hal yang sama dilakukan. Di Posko induk sedang terjadi perundingan yang alot antara Kapolres Wamena dengan Satgas Papua. Anak buah Kapolres melakukan penurunan bendera Bintang Kejora, yang dijadikan tameng adalah putra-putra daerah Papua yang berasal dari pesisir pantai utara (Biak, Serui) dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat/ satgas papua yang berasal dari Suku Dani, hal ini dapat menunjukkan bahwa:

a. Konflik awal terjadi antara aparat kepolisian dengan Satgas Papua, dan menurut hemat penulis sifatnya konflik vertikal.
b. Digunakannya putra daerah Papua khususnya petugas Brimob. Menurut pendapat penulis bahwa, sadar atau tidak sadar ada semacam 'rekayasa' yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengadu domba antara orang papua dengan orang papua sendiri, antara petugas

kepolisian yang berasal dari daerah pantai utara dengan Satgas Papua dan pemuda suku Dani.

c. Pembentukan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP) dengan tujuan untuk membantu korban pengungsian akibat kejadian 6 Oktober 2000 di Wamena. Latar belakang dan motivasi dibentuknya GSMIP adalah memobilisasi masyarakat pendatang untuk melakukan perlawanan bila terjadi penyerangan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh rakyat dan penduduk setempat (Satgas Papua), atau dengan kata lain pembentukan gerakan ini justru memberi peluang bagi terjadinya pertentangan atau konflik horizontal antara kaum pendatang dan penduduk lokal.

Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konflik, maka aparat keamanan dan kepolisian bisa menjustifikasi kondisi tersebut, lalu melakukan tindakan kekerasan yang sangat dikhawatirkan akan memperlebar kasus Maluku dan Aceh di Papua.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka melalui demonstrasi pengibaran Bendera Bintang Kejora ini menuntut perhatian mengenai:

a. Penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua;
b. Hak atas partisipasi dalam jenjang kepegawaian dan birokrasi pemerintahan;
c. Pengendalian atas perampasan kekayaan sumber daya alam;
d. Permasalahan transmigrasi;
e. Persoalan hak adat atas tanah.

Upaya pemerintah di dalam penyelesaian masalah Papua tidak cukup

hanya dengan pemekaran provinsi Papua menjadi tiga dan pelantikan gubernur tanggal 11 Oktober 1999 yang dipetieskan, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, merestui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II tanggal 29 Mei-4 Juni 2000, mengijinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora namun kemudian melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan penyediaan anggaran Sebesar Rp. 1.7 triliun dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah Indonesia. Namun tugas pemerintah dan aparat keamanan yang sebenarnya adalah:

- ⇨ Mengakui secara jujur, transparan, dan demokratis sejarah politik integrasi papua dengan NKRI yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969), sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.
- ⇨ Harus ada penyelesaian yang menyeluruh atas pelanggaran dan kejahatan HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan selama tiga dekade lebih berintegrasi.
- ⇨ Presiden Megawati Soekarnoputri (pemerintah) hendaknya memfasilitasi penyelenggaraan dialog dan kerja sama pada tingkat nasional dan daerah, untuk menampung berbagai sudut dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar dengan melibatkan seluruh unsur negara bangsa di Papua, baik formal maupun informal, yang mewakili pluralisme agama, suku, ras dan kelompok-kelompok masyarakat.

Dan bila masalah Papua ini tidak segera di tangani sebagai prioritas, bukan tidak mungkin kita akan terperangkap dalam tragedi kemanusiaan dan ancaman serius terciptanya disintegrasi bangsa.

### 3. Faktor Pemicu

Perasaan tidak puas dengan pola dan hasil-hasil pembangunan serta dampak negatif dari proses perubahan tersebut justru merupakan faktor utama pemicu yang mendorong munculnya aspirasi dan tuntutan perlawanan rakyat. Faktor-faktor pemicu yang dimaksud antara lain:

#### a. Perubahan Sosial

Interaksi sosial dan intervensi kebudayaan merupakan fakta sosial yang membuktikan bahwa dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis baik di kota besar maupun kehidupan bersama di lingkungan pemukiman di Papua cenderung tejadi 'kesenjangan' dan disharmoni, karena :

- ➪ Adanya polarisasi yang tercermin dalam ungkapan pendatang versus penduduk asli atau orang Papua dan orang Indonesia;
- ➪ Primodialisme;
- ➪ Kesulungan yang ekstrim;
- ➪ Feodalisme dalam jenjang struktur sosial yang ada;
- ➪ Kecemburuan sosial di antara kelompok etnis yang ada;
- ➪ Adanya sikap inferior dan superior dalam hubungan dan interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis;
- ➪ Intervensi budaya dan status sosial;
- ➪ Adanya perlakuan yang tidak adil dalam anggaran Departemen Agama. Dan bila masalah Papua ini tidak segera di tangani sebagai prioritas, bukan

tidak mungkin kita akan terperangkap dalam tragedi kemanusiaan, ancaman serius terciptanya disintegrasi bangsa.

**b. Budaya**

Arus globalisasi dan era reformasi dapat memunculkan fenomena baru dari setiap kelompok masyarakat untuk mempertanyakan 'jati dirinya' sebagai sebuah identitas dalam sebuah bangsa seperti Indonesia. Kearifan itu telah di jawab oleh Presiden Gus Dur dengan mengembalikan nama "Papua" kepada rakyat dan penduduk asli wilayah itu. Fakta tersebut tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena menjawab bagaimana caranya mempertahankan individualisme, kesukuan, budaya, daerah, sejarah bahkan agama didalam kesatuan keluarga masyarakat nasional dan global.

Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur pada tanggal 31 Desember 2000 merupakan sebuah proses pengangkatan kembali identitas dan nilai-nilai budaya orang Papua agar memperoleh pengakuan ungkapan identitas kepapuaan, dan merupakan gerakan balasan budaya yang dipandang sebagai pemberontak terhadap basis negara dan bangsa *(nation state)* Indonesia.

Ungkapan tersebut harus dipandang sebagai salah satu tonggak budaya di antara identitas dan budaya lainnya, yang diharapkan pada gilirannya akan memperkukuh keutuhan persatuan dan kesatuan identitas dari sebuah bangsa. Oleh sebab itu sebutan "Papua" tidak lagi relevan jika dikaitkan dengan sebutan separatisme.

### c. Ekonomi

Di sektor ekonomi, kekayaan Papua berupa tambang emas, minyak bumi, gas alam, hasil hutan dan laut, dieksploitasi habis-habisan oleh pemerintah pusat, 'Group Cendana' dan kroni-kroninya.

Pemerintahan Jakarta, Soeharto dan ABRI-nya tidak segan-segan menggunakan kekerasan militer untuk mendapatkan kesetiaan dan ketaatan rakyat. Sebagai akibatnya, terjadilah peminggiran rakyat papua dan rakyat di wilayah-wilayah lain secara ekonomi, politik, sosial budaya yang bercampur baur dengan penindasan dan kejahatan HAM.

Tetapi waktu tidak bisa dihentikan, perubahan tak bisa ditahan, tantangan demi tantangan bermunculan dan paradigma pun bergeser. Rakyat tak bisa lagi dibohongi. Guratan hitam dalam wajah nasionalisme bangsa Indonesia adalah aspirasi dan tuntutan dari beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan RI untuk merdeka, seperti Papua dan Aceh, tak dapat dihindari lagi.

Kedaulatan negara yang sangat besar melalui pendekatan ekonomi kapitalis yang berorientasi pasar, terutama perusahaan multinasional sebagai pelaku hubungan internasional, menyebabkan kedaulatan negara di bidang politik menjadi lemah. Belum lagi lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB dan IMF tidak saja memiliki kekuatan nyata untuk mengatur ekonomi suatu negara tetapi juga sistem politik atau malah menentukan personil yang akan duduk dalam pemerintahan.

Kedaulatan negara juga semakin mempersempit ruang gerak bidang ekonomi lewat arus kapitalisme yang berbentuk perjanjian internasional.

Ekonomi pasar bebas yang dirumuskan dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) tidak mungkin lagi ditolak masuk dengan dalil tidak sesuai dengan ideologi atau faham kebangsaan. Contoh, kasus penyanderaan yang dilakukan oleh Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya terhadap Para peneliti WWF pada tahun 1996 dan kasus pengibaran bendera Bintang Kejora oleh Dr. Thomas Wanggai pada tanggal 14 Desember 1988.

**d. Politik**

Rasa nasionalisme yang identik dengan gotong royong yang telah mendominasi politik Indonesia selama 57 tahun pasca Indonesia merdeka, mulai digugat dengan kebangkitan Papua menuntut merdeka dan memisahkan diri dari NKRI yang disusul dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Refleksi dari keinginan untuk melepaskan diri karena terkesan imperialis dan intervensional Jawa.

Politik pemerintah Indonesia adalah politik Jawa yang tertutup dan sentralistik. Jawanisasi kehidupan politik sangat jelas dalam perilaku politik Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut tanpa disadari dapat menyimpan bom waktu. Kini anti Jawa (Jakarta) muncul dalam rupa aksi-aksi dan tuntutan pemisahan diri di wilayah-wilayah tertentu di tanah air seperti Papua dan Aceh.

Aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka bertumpu pada dua alasan yaitu :

1. Alasan sejarah, dimana pengalaman sejarah politik mencatat bahwa sejak

bulan Juni 1961, rakyat dan penduduk asli Papua yang saat itu bernama Niew Guinea masih berada dalam teritorial kerajaan Belanda, sedangkan Pepera yang dilaksanakan dari tanggal 14 Juli s/d 5 Agustus 1969 telah menganeksasi bangsa Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimensi politik karena proses integrasi Papua selama 40 tahun (1 Mei 1961-1 Mei 2002) tidak menunjukkan adanya itikad baik pemerintah Indonesia untuk memperlakukan rakyat Papua sebagai warga bangsa ini secara adil dan sejahtera. Dan harus diakui secara jujur bahwa yang melatarbelakangi lahir dan timbulnya tuntutan Papua merdeka menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Papua periode 1974-1977 dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 1977-1982 Ellyas Paprindey adalah akibat perasaan tidak puas. Ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua karena pembangunan di tanah Papua oleh pemerintah Indonesia tidak menyentuh kepentingan rakyat dan penduduk asli Papua.

Sementara itu menurut anggota DPR RI asal Papua Drs. Simon Patrick Morin bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua telah kehilangan 'roh kemanusiaannya', ini terbukti dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Papua telah menghilangkan identitas dan jati diri orang Papua. Hak kesejahteraan, budaya, bahkan hak untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran pun diabaikannya. Penghancuran identitas diri, budaya dan sejarah yang tercermin lewat

kata Papua dihilangkan selama 40 tahun integrasi.

Oleh karena itu, langkah politik yang diambil oleh Presiden Gus Dur dengan mengembalikan istilah dan atau nama Papua menjadi suatu titik balik sekaligus upaya pembebasan dari sebuah belenggu sejarah dalam upaya pengembalian jati diri orang Papua kepada orisinalitas kebudayaannya.

2. Akses Pembangunan. Pemaparan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan suatu kesenjangan yang luar biasa. Kegagalan demi kegagalan pemerintah Jakarta inilah yang dapat membuat rakyat dan penduduk asli Papua telah terlantar selama 40 tahun. Kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan telah membungkus orang Papua. Orang Papua menjadi miskin di atas kekayaannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dan ketidak seriusan pemerintah, untuk membangun Papua.

**e. Pelanggaran**

Ribuan nyawa orang Papua telah hilang entah dimana jasad dan rimbanya, karena dibunuh. Banyak orang telah kehilangan suami/isteri, anak-anak, harta kekayaan dan hak adat. Pemerkosaan serta perlakuan yang keji dan kejam yang lainnya telah dapat ditunjukkan oleh ABRI kepada orang Papua. Penculikan dan pembantaian merupakan lagu wajib bagi militer terhadap rakyat Papua. Dengan uraian di atas, maka rakyat Papua merasa senasib dan sepenanggungan.

Untuk itu tidak ada jalan lain selain harus melakukan perlawanan dan menuntut untuk merdeka.

## C. TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

Bentuk yang paling canggih dari eskpisme itu adalah penekanan dikotomi antara rambut keriting versus rambut lurus, dan antara penduduk asli dan pendatang. Dialog 100 orang tokoh masyarakat Irian Jaya (Papua) dengan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 di Jakarta, sangat menarik untuk dikaji. Melalui juru bicaranya Tom Beanal, mereka dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan merdeka, permasalahannya, serta mengapa muncul tuntutan dan aspirasi merdeka, padahal Irian Jaya telah berintegrasi selama 26 tahun sejak tahun 1963.

Apakah akar permasalahan yang telah diabaikan selama tiga dasa warsa lebih atas rakyat Papua sepatutnya kita mengkaji dan memahami makna dan hakekat dibalik tuntutan dan aspirasi merdeka. Untuk menjawab hal itu perlu digunakan dua perspektif tinjauan antara lain :

### 1. Sejarah Politik

Pelanggaran HAM terbesar di dunia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda pada awal polemik tentang status politik Papua pada saat terjadinya perundingan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Kedua pemerintahan tidak melibatkan secara aktif rakyat Papua melalui wakilnya,

untuk bersama-sama duduk dalam satu meja perundingan. Rakyat Papua pada waktu itu hanya menjadi obyek bukan subyek dari perundingan New York Agreement, dalam bentuk segi tiga yaitu Indonesia - delegasi rakyat Papua - Belanda. Persengketaan antara Indonesia-Belanda mengenai wilayah Papua seharusnya melibatkan masyarakat Irian Jaya (Papua) sendiri, karena perundingan itu menyangkut nasib dan masa depan Papua bukan masa depan Indonesia-Belanda.

Hak untuk duduk bersama pada satu meja perundingan bagi rakyat Papua pada saat itu telah diabaikan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Peristiwa ini merupakan awal mula pelanggaran hak asasi orang Papua dibidang politik untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Sesuai isi New York Agreement tahun 1962 yaitu bahwa rakyat Papua diberi wewenang untuk menentukan nasib sendiri lewat plebisit atau referendum.

Plebisit merupakan konsensus Indonesia dan Belanda dalam New York Agreement (1962), atau yang lebih dikenal dengan Pepera *(The Act Of Free Choice)* pada tahun 1969 dibawah pengawasan PBB. Di dalam New York Agreement pasal 18 dinyatakan bahwa pelaksanaan plebisit atau penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua dilaksanakan dengan prinsip demokrasi *one man one vote*, yaitu satu orang satu suara, dengan dua opsi (merdeka atau ikut Indonesia).

Namun semua harapan dan impian masyarakat Papua hilang dan tinggal kenangan belaka, dengan adanya operasi khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Moertopo, yang mana dapat dicari dan direkayasa suatu aturan permainan yang sangat melenceng dari keputusan New York Agreement. Rekayasa yang dilakukan adalah penentuan nasib sendiri bukan lagi atas dasar *one man one vote* tetapi melalui sistem perwalian. Untuk dapat mewujudkan sistem tersebut

maka dibentuklah sebuah dewan yang disebut Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang beranggotakan 1.025 orang. Dalam DMP ini setiap orang wakil yang terdiri dari kepala suku adat dari masyarakat dijadikan perwakilan dari kelompok etnis atau suku dari masyarakat yang bersangkutan.

Alasan dibentuknya DMP karena menurut pemerintah pusat masyarakat Papua masih terbelakang, bodoh dan rendah pendidikan, karena itu suara mereka diwakili kepala suku dan kepala adat dalam Dewan Musyawarah Pepera.

Alasan tersebut dibantah karena sejarah mencatat bahwa pada bulan Juni 1961, tatkala Papua masih berada dalam wilayah teritorial Belanda atau disebut Niew Guinea, masyarakat Papua telah mampu melaksanakan pemilihan umum dengan sistem distrik penuh. Jadi kalau pemerintah Indonesia berdalil bahwa Pepera harus dilaksanakan dengan sistem perwalian atau proporsional karena kondisi masyarkat pada saat itu belum memungkinkan, bisa dipertanyakan apakah rakyat Papua yang bodoh dan terbelakang ataukah memang ada kepentingan Indonesia atas wilayah itu.

Ada beberapa alasan sejarah politik tentang status tanah Papua yang harus digugat antara lain:

a. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah memanipulasi pelaksanaan Pepera atau penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua di Papua dengan mengabaikan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1961. Hal ini membuktikan telah terjadi pelanggaran HAM terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.
b. Hasil Pepera yang dilaporkan kepada wakil Sekjen PBB Ortizan ternyata ditolak oleh 2/3 anggota PBB pada sidang Majelis Umum PBB. Penolakan

tersebut dipelopori oleh Kongo, Brazzaville, Gana, dan Senegal.

c. Akibat ketegangan yang berakhir dengan ditolaknya hasil Pepera 1969 di Papua, maka sidang dapat mengeluarkan *"Diplomatic Note"* yang isinya menolak dan tidak menerima hasil pelaksanaan Pepera yang diselenggarakan oleh Indonesia di Papua, karena Indonesia dinilai tidak jujur dan adil dalam menerapkan prinsip *one man one vote* menurut kesepakatan New York Agreement pasal 18 dan 20 tentang tata cara pelaksanaan plebisit atau referendum.

d. *Diplomatic Note* mengatakan bahwa permasalahan pepera di Papua tetap mengambang sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah melakukan pelacuran politik dan mengorbankan rakyat Papua di Papua untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.

e. Setelah *Diplomatic Note* dikeluarkan pada Sidang Umum PBB, negara-negara anggota sepakat untuk melakukan voting tentang hasil Pepera. Namun sebelum voting dilaksanakan duta besar Italia di PBB mengusulkan sebuah *"Memorandum of Roma"* yang isinya antara lain:

   1. Indonesia diberikan mandat oleh PBB untuk membangun Papua selama 25 tahun.
   2. Pembangunan dalam rangka perwalian tersebut, biayanya ditanggung oleh PBB, Belanda dan Indonesia.
   3. Setelah 25 tahun, maka mandat perwalian harus segera dikembalikan kepada PBB untuk selanjutnya diatur mengenai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Apabila mulai dihitung berdasarkan Perjanjian Roma yang ditandatangani tanggal 30 September 1963, maka waktu 25 tahun tersebut berakhir tanggal 30 September 1987,

atau jika dihitung sejak integrasi tanggal 1 Mei 1963, waktu 25 tahun itu berakhir tanggal 1 Mei 1988.

Jadi sudah sangat jelas dan transparan, pemerintah Indonesia tidak jujur dalam menaati konsensus internasional tentang nasib rakyat Papua dan Pemerintah secara sadar dan sengaja telah mengabaikan hak asasi manusia dan masyarakat Papua.

Untuk itu, tuntutan merdeka telah terungkap dalam pertemuan tokoh masyarakat Papua (Tim 100 orang) dengan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999, jadi jangan sampai pemerintah Indonesia mencap tuntutan Papua merdeka dengan tuduhan stigma separatis.

Menurut penulis, di sinilah terletak akar persoalan yang tak pernah diselesaikan secara tuntas dan baik, sehingga sebagai dampaknya timbul aksi-aksi demonstrasi yang dibarengi pengibaran bendera Bintang Kejora pada bulan Juli 1998, dan tuntutan merdeka dari seluruh rakyat Papua pada bulan Februari 1999. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang seharusnya bersalah, apakah rakyat Papua atau pemerintah Indonesia?

## 1. Pelaksanaan Pembangunan

Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada suatu unsur kesengajaan penggelapan sejarah orang Papua yang berintegrasi dengan Indonesia sehingga berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia gagal di dalam memahami apa kinginan yang ada dalam *back mind* (batok kepala) masyarakat Papua selama berintegrasi dengan Indonesia. Sebagai bukti antara lain kasus-kasus pelanggaran HAM masih tetap berlangsung secara rutin dan

sistematis di wilayah itu, pengingkaran eksistensi dan kebudayaan penduduk asli Papua digunakan untuk:

a. Membenarkan tindakan oknum aparat pemerintah untuk melecehkan kebenaran orang /rakyat Papua.
b. Pemerintah Indonesia sedang menjalankan paham hirarki kebudayaan.
c. Kebudayaan Papua yang sesungguhnya sangat majemuk diposisikan pada derajat yang lebih rendah. Contoh, betapa populernya penggambaran tentang orang Dani yang nyaris telanjang dan masih hidup di jaman batu.
d. Bentuk lain dari penyangkalan adalah dikotomi antara rambut kering versus rambut lurus, antara penduduk asli dan pendatang.

Hal lain yang menjadi penggambaran adalah para petani di lembah Baliem yang memiliki kebudayaan pertanian ubi-ubian yang tergolong paling canggih di dunia, yaitu hasil inovasi dan adaptasi selama empat ratus tahun tanpa bantuan sepotong logam (G.J. Aditjondro 1993). Demikian pula perlawanan PT. Freeport Indonesia terhadap penduduk Amungme, Dani dan Komoro di sekitar wilayah eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga terbesar di Asia bahkan di dunia.

Dampak sosial yang paling eksklusif adalah masyarakat lokal kehilangan tanah ulayat mereka sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi mereka. Hilangnya tanah ulayat, dalam perspektif suku Amungme dan Komoro, menimbulkan masalah baru. Persoalan baru itu adalah kehilangan keniscayaan kesinambungan antartanah, alam dan hutan yang dimiliki, karena konsep tanah bagi orang Amungme dan Komoro adalah mekanisme pengaturan kesinambungan yang dinamis antara alam dan lingkungan budaya setempat. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik, maka tanah tempat mereka berpijak

dirusak dan dapat mengganggu equilibrium mata rantai, hubungan timbal balik antara alam - ukrowi - manusia.

Ekses dari ketidakberdayaan masyarakat Papua dalam menghadapi derasnya arus perubahan, akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyrakat adalah pelarian ke masa lalu. Franz Fanon (1967) mensinyalir bahwa wujud pelarian ke masa lalu ini hidup subur di kalangan cendikiawan asli Papua. Manifestasi dari bentuk pelarian ke masa lalu tersebut adalah pengukuhan identitas ras melanesia atau Papua sebagai ekspresi ketakberdayaan dalam menghadapi arus pendatang dari daerah lain di Indonesia.

Lebih ekstrim lagi, manifestasi atau perwujudan dari pelarian ke masa lalu dapat kita lihat pada aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Papua Barat yaitu Bintang Kejora pada awal Juli 1998 dengan permintaan delegasi yang terdiri dari 100 orang tokoh masyarakat Papua untuk bertemu Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 guna menyampaikan keinginan untuk 'merdeka' dan keluar dari NKRI serta membentuk negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sangat di sesalkan jika aksi-aksi dan tuntutan aspirasi masyarakat papua untuk minta merdeka itu dapat dicap separatisme oleh Pemerintah Indonesia tanpa melihat akar persoalan yang sebenarnya yang selama ini diabaikan.

Selama 38 tahun papua berintegrasi dengan NKRI sebutan "Papua" secara resmi digunakan pada tanggal 7 Januari 2001 dalam institusi-institusi pemerintah maupun swasta. Namun bila dikaitkan dengan integrasi masyarakat dan sebutan separatis atau separatisme, penduduk Papua tidak terlepas dari persoalan-persoalan kebangsaan yang membelenggunya.

## Kongres Rakyat Papua II

Aspirasi dan tuntutan merdeka yang disuarakan sejak bergulirnya reformasi sangat relevan. Sejak kapan timbul aspirasi dan tuntutan tersebut? Sejak lengsernya Soeharto, 21 Mei 1998, aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora dan aksi-aksi demonstrasi tersebut dilakukan secara transparan. Melalui aksi-aksi tersebut dapat diketahui bahwa Papua menuntut untuk merdeka.

Apa latar belakang, motivasi, ataupun tujuan tuntutan melalui aksi-aksi tersebut? Pada umumnya muncul suatu kesimpulan bahwa tuntutan merdeka bagi rakyat dan penduduk Papua semata-mata merupakan persoalan politik dan yang paling menonjol dari sikap untuk melepaskan tanah Papua dari NKRI, adalah penyerangan atas kompleks TNI di Manokwari yang dilanjutkan dengan menjalarnya pemberontakan bersenjata ke seluruh wilayah Kepala Burung, dan hal tersebut dinyatakan sebagai lahirnya **Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat**, organisasi yang oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan dicap sebagai **Organisasi Papua Merdeka (OPM)**.

Berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi pada awal tahun 60-an, para perjuangan nasionalis Papua berusaha untuk melakukan konsolidasi guna menghadapi Referendum 1969 dan Papera.

Menurut Perjanjian New York pasal 18 ayat (d), semestinya referendum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi universal, yaitu *one man one vote* (satu orang satu suara). Tetapi oleh Jenderal Ali Moertopo melalui operasi khusus, referendum tersebut direkayasa menjadi sistem musyawarah untuk mufakat yaitu sebuah praktek demokrasi ala Orde Baru. Berbagai cara, strategi dan taktik dapat dihalalkan oleh operasi pemerintah Indonesia tahun 1969, melalui tiga tokohnya yaitu Jenderal Ali Murtopo, Jenderal Sarwo Edy Wibowo

dan Pangdam XVII Cenderawasih pada waktu itu dengan melakukan :

a. Intimidasi,
b. Teror,
c. Ancaman,
d. Pembunuhan terhadap rakyat dan para pejuang nasionalis Papua yang tak mau bergabung dengan Indonesia.

Unjuk rasa dan demonstrasi secara besar-besaran dari rakyat Papua di Jayapura untuk memprotes hasil praktek penyelenggaraan Papera yang digelar pada tanggal 12 Februari 1969, yang di pimpin oleh Herman Wajoi dan Penehas Hans Torey, berlangsung di depan kediaman Fermando Ortiz dengan 2 tuntutan yaitu:

a. Menolak praktek pelaksanaan Papera dengan sistem musyawarah karena tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York (1962)
b. Adanya perlakuan buruk, penindasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer, khususnya ABRI, atas rakyat dan tokoh-tokoh Papua yang menolak pelaksanaan Pepera dengan sistem musyawarah.

Namun di tengah protes keras dan demonstrasi tersebut, Pepera tetap dilaksanakan dengan sistem musyawarah. Hasilnya, 1.025 orang anggota DMP yang berkumpul secara estafet di 8 kota mulai dari Marauke pada tanggal 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969, dengan suara bulat menyatakan tetap dalam NKRI. Hasil Pepera yang disertai dengan lampiran Dr. Ortizan tersebut disampaikan ke Sidang Umum PBB bulan September 1969. Dalam acara voting di PBB, anggota PBB terpecah menjadi empat kelompok antara lain:

a. Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, menyatakan

menerima hasil Pepera, mengingat kepentingan ekonomi kapitalis AS untuk mengeksploitasi hasil tambang dan emas di Papua yang kini terkenal sebagai PT. Freeport Indonesia di Timika.

b. Negara-negara Blok Soviet yang tak ingin diintervensi lebih jauh oleh Indonesia tanpa banyak perdebatan menerima hasil Pepera.
c. Negara-negara Islam juga menerima hasil Pepera sebab menginginkan dukungan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bagi Palestina.
d. Negara Afrika yang berjumlah 15 negara, menolak hasil Pepera karena didorong oleh rasa Solidaritas kulit hitam.

Setelah pelaksanaan Pepera yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan HAM oleh ABRI, Zeth Rumkorem menanyakan ketentuan internasional Perjanjian New York 1962. Pada 1 Juli 1971, mantan anggota TNI AD dan juga putra dari pejuang pro Indonesia Lukas Rumkorem mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" di markas Viktoria (Marvik), yang terletak di Kecamatan Waris dekat daerah Perbatasan Papua - PNG.

Sejak saat itulah berbagai kelompok masyarakat Papua secara bergantian terlibat dalam upaya nasionalisme Papua, melalui simbol pengibaran bendera Bintang Kejora. Sosialisasi ini berlangsung dari generasi ke generasi di Papua, khususnya di kalangan PNS, mahasiswa dan dosen. Seorang doktor Ilmu Administrasi Negara lulusan Amerika Serikat, Thomas Wanggai (alm.) bahkan sempat melakukannya di stadion Mandala Jayapura pada tanggal 14 Desember 1988. Untuk itu, ia harus menerima ganjaran hukuman penjara selama 20 tahun yang tak sempat dijalani sepenuhnya, karena ia meninggal secara misterius di Rumah Sakit Polri Jakarta pada tahun 1996. Nasionalisme Papua tumbuh dan

berkembang secara merata di daerah pantai utara, pantai selatan, hingga ke pengunungan Jayawijaya dan pegunungan Bintang.

Pelanggaran dan kejahatan HAM, pembantaian, pemerkosaan, gelombang transmigrasi dan migrasi spontan, serta eksploitasi SDA tanpa menghormati dan menghargai hak adat dan ulayat rakyat Papua pun semakin memperkuat nasionalisme Papua.

Proses nasionalisme Papua yang pada awalnya hanya sebagai bentukan pemerintah Belanda kini telah terakomodasi dalam kebudayaan rakyat Papua menjadi jati diri masyarakat Papua. Ia hidup dan membentuk diri sebagai konsep-konsep pemahaman masyarakat terhadap dunianya yang terungkap lewat simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti oleh komunitas yang memahami kebudayaan Papua.

Nasionalisme Papua tidak saja menjadi jati diri tetapi juga telah menjadi basis logika dalam perilaku sekaligus harga diri bagi para perilaku kebudayaannya, atau nasionalisme Papua telah menjadi faktor kohesi sosial yang mengikat masyarakat Papua sebagai suatu komunitas.

Instruksi Kapolri untuk menggelar operasi dalam upaya menurunkan bendera Bintang Kejora yang melahirkan tragedi berdarah 6 Oktober tahun 2000 telah membuktikan kegagalan pemerintah pusat dan aparat keamanan rakyat terutama, masyarakat Dani. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kesombongan kita sebagai bangsa di dalam menangkap sinyal dibalik bersikerasnya rakyat Papua (Satgas Papua), untuk mempertahankan pengibaran bendera Bintang Kejora. Sikap itu sekaligus membuktikan tiadanya penghargaan pada eksistensi dan identitas nasionalisme Papua, dan disparitas tersebut telah, ditenggelamkan oleh 'kebijakan pusat' melalui instruksi Kapolri.

Anehnya, akar sejarah dan budaya tersebut tidak dipelajari dan dipahami oleh pemerintah pusat, aparat keamanan (TNI/Polri), polisi, intelektual, dan kaum cendikiawan Indonesia lainnya, sehingga tak pernah ada usaha untuk membuat rumusan dan agenda politik yang jelas untuk menyelesaikan masalah Papua dengan baik.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali belajar untuk mengetahui dan memahami nasionalisme Papua yang tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi memiliki akar sejarah dan budaya yang sama seperti nasionalisme Indonesia. Hanya dengan cara itulah kita dapat memposisikan nasionalisme Papua sebagai bagian dari pluralisme bangsa sehingga diharapkan akan ada saling pengertian yang kelak menciptakan kehidupan yang rukun antara rakyat Papua dari rakyat Indonesia lainnya. Pertanyaannya, maukah kita sebagai bangsa melakukannya?

a. Konflik awal terjadi antara aparat kepolisian dengan Satgas Papua dan menurut hemat saya sifatnya konflik vertikal.
b. Digunakannya putra daerah Papua khususnya petugas Brimob, menurut pendapat saya bahwa, sadar atau tidak sadar, ada semacam 'rekayasa' yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengadu domba antara orang Papua dengan orang Papua sendiri, antara petugas kepolisian yang berasal dari daerah pantai utara dengan Satgas Papua dan pemuda Dani.
c. Pembentukan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP) dengan tujuan untuk membantu korban pengungsian akibat kejadian 6 Oktober 2000.

Latar belakang dan motivasi dibentuknya GSMIP adalah, memobilisasi masyarakat pendatang untuk siap menghadapi apabila sewaktu-waktu terjadi

penyerangan yang dilakukan oleh rakyat dan penduduk setempat (Satgas Papua), atau dengan kata lain pembentukan gerakan ini justru memberi peluang bagi terjadinya pertentangan atau konflik horizontal antara kaum pendatang dan penduduk lokal.

Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konflik, maka aparat keamanan dan kepolisian bisa menjustifikasi kondisi tersebut, lalu melakukan tindakan kekerasan yang sangat dikhawatirkan akan memperlebar kasus Maluku dan Aceh di Papua.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka melalui demonstrasi pengibaran bendera Bintang Kejora ini menuntut perhatian mengenai:

a. Penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua;
b. Hak atas partisipasi dalam jenjang Kepegawaian dan birokrasi pemerintahan;
c. Pengendalian atas perampasan kekayaan SDA;
d. Permasalahan transmigrasi;
e. Persoalan hak adat atas tanah;

Upaya pemerintah di dalam penyelesaian masalah Papua tidak cukup hanya dengan pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga dan pelantikan Gubernur tranggal 11 Oktober 1999 yang di*petie*skan, ijin pengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, merestui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000, mengijinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora yang kemudian melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan penyediaan anggaran sebesar Rp 1.7 triliun dalam mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia, namun tugas pemerintah dan aparat keamanan adalah adanya pengakuan secara jujur, transparan, dan demokratis

sejarah politis awal integrasi Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969) sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.

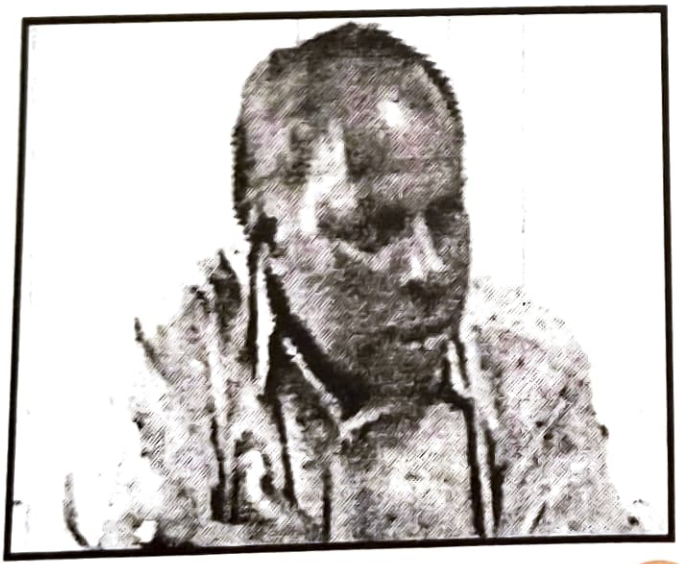
# BAB VI
# KONGRES MENUJU PAPUA BARU



Ribuan jiwa rakyat Papua menghadiri Kongres Rakyat Papua II dan meminta merdeka.



**Theys Hiyo Eluay, Ketua PDP**



**Tom Beanal, Wakil Ketua PDP**

# BAB VI
# Kongres Menuju Papua Baru

## A. MASA DEPAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA

Bila diamati secara mendalam, sesungguhnya aspirasi dan tuntutan pemisahan Papua (Irian Jaya) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dianggap enteng oleh pemerintah pusat di Jakarta. Alasannya, rakyat Papua sudah terlalu lama diperlakukan secara tidak adil dan manusiawi oleh suatu instrumen kekuasaan pemerintahan Indonesia. Aspirasi dan cita-cita politik rakyat Papua dimanipulasi tentang tanah hak adat dirampas, yang sumber daya alam dieksploitasi dan hasilnya pun diboyong ke luar daerah, bahkan di luar negeri.

Bertolak dari beberapa penjelasan awal di atas, maka Kongres Rakyat Papua II merupakan resolusi dasar menuju kemerdekaan Papua. Sesungguhnya sesuatu yang amat dan sangat sulit untuk diterima oleh Pemerintah Indonesia dan rakyat negeri ini yaitu membaca keputusan Kongres Rakyat Papua II di Jayapura yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000, yang menyatakan masyarakat dan wilayah Irian Jaya (Papua Barat) ke luar dari NKRI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh 60.000 rakyat Papua yang

menghadiri kongres. Kongres tersebut dihadiri pula oleh:

1. 501 orang anggota panel;
2. Duta Besar Negara-negara sahabat seperti PNG, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Australia, Irlandia, Jepang Cina, dan lain-lain;
3. Pemerintah Indonesia;
4. Wartawan dalam dan luar negeri;
5. Pelaku sejarah, dan lain-lain.

Anehnya sebelum kongres berakhir, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Abdurrahman Wahid lewat juru bicaranya Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak, menyatakan menolak hasil Kongres Rakyat Papua. Alasannya, Kongres Rakyat Papua dianggap tidak representatif, sebab tidak melibatkan kelompok pro integrasi dan adanya intervensi orang asing.

Bagaikan gayung bersambut, penolakan itu diikuti oleh Ketua DPR RI Akbar Tanjung yang tak tanggung-tanggung menyatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap panitia kongres dan PDP. Selain Akbar Tanjung, kecaman dan pernyataanpun mengalir dari Menlu Alwi Shihab, Menkopolsoskam/Menteri Dalam Negeri Surjadi Sudirja, Panglima TNI, Ketua Komisi I DPR RI Yasril Ananta Baharuddin, anggota DPR yang ikut-ikutan mengecam seperti jajaran DPD KNPI.

Permasalahannya, mengapa hingga pemerintah pusat seperti kebakaran jenggot dalam merespons masalah Papua? Sehusnyanya para elit politik pusat justru bertanya dalam diri mereka, apa makna dibalik pernyataan dan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua itu. Apakah yang salah selama ini, yang telah dilakukan oleh mereka atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bangsa, terhadap rakyat Papua? Apa yang direnungkan oleh kita sebagai bangsa

mengenai peristiwa dibalik pelaksanaan KRP?

Reaksi yang diperlihatkan oleh elit kekuasaan dan birokrasi, baik sipil maupun militer (TNI/Polri), dalam merespon pelaksanaan kongres dan hasilnya membuktikan bahwa :

1. Sebelum Kongres Rakyat Papua II selesai dievaluasi, bahkan menolak sebelum mengetahui hasilnya. Apabila Pemerintah keberatan bahwa KRP tidak representatif dan diintervensi oleh pihak lain dengan kehadiran orang asing, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang bisa menentukan apakah kongres itu representatif? Sekurang-kurangnya ada 501 orang wakil rakyat sebagai peserta utusan daerah masing-masing wilayah. Bila ditanyakan kepada ribuan rakyat yang datang dan menyaksikan kongres tersebut, maka mereka akan menyatakan sudah terwakili.

   Di samping itu, ada saja dalih pemerintah bahwa aspirasi merdeka hanya atas nama, segelintir orang. Artinya pemerintah pusat tidak saja gagal memahami realitas politik yang berkembang di masyarakat Papua tetapi juga seolah-olah menyederhanakan masalah Papua, pada hal selama 32 tahun persoalan Papua tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

2. Pelurusan sejarah. Sebenarnya selama pelaksanaan KRP tidak ada masalah. Yang ramai justru elite penguasa di Jakarta. Misalnya pernyataan Pangdam XVII Trikora, Alberth Ingkiriwng, bahwa tidak usah ada penambahan pasukan, sewaktu menanggapi pernyataan dari Pangkostrad Agus Wirahadikusumah.

Kehadiran orang asing sejauh yang dapat diamati dan sesuai dengan informasi yang diperoleh bahwa orang asing yang hadir hanya beberapa wartawan luar negeri yang datang untuk meliput jalannya kongres dan beberapa orang staf diplomat negara-negara sahabat yang memang menjadi tugas mereka sebagai pemantau peristiwa-peristiwa tertentu, tidak saja di Papua tetapi di wilayah lain di Indonesia.

Khusus untuk Gubernur Provinsi Sandau dari PNG John Tiwek, menurut hemat penulis bahwa kehadirannya dapat dijelaskan sebagai tanda menyatakan 'rasa solidaritas kemanusiaan' dengan saudara-saudaranya serumpun Melanesia di Papua yang selama ini diperlakukan secara tidak adil. Sebagai saudara-saudara yang serumpun yang ikut solider dan prihatin atas nasib dan masa depan rakyat Papua yang ternyata selama 32 tahun lebih berintegrasi dengan Indonesia namun tidak pernah ada perbaikan dalam kehidupan rakyat Papua.

3. Yang lebih lucu lagi yaitu hasil akhir dari Kongres Rakyat Papua II berupa resolusi sesuai pemantauan, tidak ada satupun media massa baik cetak maupun elektronik baik di daerah maupun di Jakarta yang memuat secara lengkap dan benar.

Padahal rakyat Papua melalui resolusi hanya meminta perhatian atas 4 faktor secara *de facto* pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia yaitu :

a. Pada tanggal 1 Desember 1961 bangsa Papua sudah diberikan

kedaulatan.

b. Bangsa Papua tidak terwakili sebagai subyek sewaktu pembuatan dan penandatanganan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962.
c. Pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 ternyata cacat hukum bahkan dilakukan di bawah intimidasi dan penindasan.
d. Ada sejarah kejahatan dan pelanggaran HAM selama 38 tahun yang tidak pernah diselesaikan secara hukum oleh pemerintah Indonesia.

4. Akar permasalahan, keinginan rakyat Papua untuk meminta perhatian awal dari pemerintah pusat untuk mencari kebenaran dan keadilan serta proses itu perlu dilakukan secara bersama–sama. Inilah roh dasar dari resolusi. Mengapa ungkapan isi hati yang disertai ajakan berupa permohonan tulus dan ikhlas dari rakyat Papua sulit didengar apalagi diterima oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Pada hal kalau ditelusuri dengan baik, maka aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua bukanlah hal yang baru.

Selama 38 tahun integrasi Papua Barat (versi Indonesia) dengan RI namun hal itu ditentang oleh rakyat Papua dan diwujudkan dalam gerakan-gerakan perlawanan bersenjata sporadis oleh OPM yang dimulai dari tahun1961 sampai sekarang.

Namun sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, maka gerakan bersenjata mulai mengalami pergeseran bentuk dan orientasi menjadi pernyataan-pernyataan bebas dan sudah merambat ke Istana Presiden RI. Bahkan penyelesaian kasus

politik Papua yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh cara-cara militer melalui pendekatan kemauan yang reprensif oleh TNI/Polri, kini lebih menonjol dengan cara-cara politik, diplomasi dan dialog.

Di samping itu, ada fenomena dan gerakan baru yang lebih menonjol dalam gerakan organisasi Papua merdeka, antara lain :

a. Keterlibatan intensif kelompok intelektual Papua yang notabenenya merupakan produk republik yang diprakarsai oleh mahasiswa dan dosen Universitas Cendrawasih, Jayapura dan PTS-PTS di seluruh Papua.
b. Terbentuknya Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (FORERI) pada tahun 1998 untuk menghimpun kelompok intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan mahasiswa, guna menyatukan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.
c. Terbentuknya Tim 100 orang Papua untuk menghadap Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999, yang diketuai oleh Tom Beanal untuk menuntut melepaskan diri dari NKRI
d. Pembentukan LMA di seluruh Papua pada tanggal 12 Nopember 2000.
e. Pembentukan Presidium Dewan Papua pada tanggal 12 Desember 1999.
f. Pembentukan Komite Nasional Pemuda Papua pada tanggal 26 Mei 2000.
g. Pelaksanaan KRP dari tanggal 29 s/d 4 Juni 2000.

Apabila ditelusuri secara cermat dan mendalam kejadian demi kejadian di Papua yang berpuncak pada KRP telah lama berkembang dari KMB di Den Haag tahun 1949 yang bermuara pada beberapa akar permasalahan antara lain :

a. Selama 38 tahun, pemerintah Jakarta (Indonesia) tidak mendengarkan tuntutan dan aspirasi rakyat Papua bahkan pemerintah Indonesia melupakan rakyat Papua setelah rakyat Timor Timor berintegrasi ke

wilayah RI pada tahun 1975.

b. Proses kemerdekaan Timor Timor, perhatian dunia internasional sangat besar sedangkan Papua sangat minim.

c. Pemerintah Indonesia berani memberikan hak untuk merdeka bagi rakyat Timor Timor melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, sedangkan Papua Barat yang masuk ke Indonesia melalui perjanjian internasional (New York Agreement) tanggal 15 Agustus 1962 tidak dihiraukan.

d. Penyelesaian masalah Aceh melalui garansi dialog di Swiss oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang berpuncak pada penandatanganan "Jeda Kemanusiaan" dengan fasilitator Yayasan/Lembaga Henry Dunant Center, sedangkan rakyat Papua melaksanakan kongresnya di wilayah teritorial RI justru hasil kongresnya ditolak dengan alasan ada intervensi pihak asing, nah kalau begitu proses penandatanganan dan penyelesaian Aceh yang melibatkan fasilitator Henry Dunant Center, bukanlah juga dianggap merupakan campur tangan pihak asing.

e. Hal ini merupakan ketidakjujuran pemerintah Indonesia baik Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dalam melakukan diskriminasi, tidak adil dan tidak jujur dalam penyelesaian kasus Papua.

f. Akhir catatan, menyimak dari berbagai uraian di atas, maka sudah saatnya dilakukan dialog secara terbuka dan transparan antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang melibatkan dunia internasional (PBB) sebagai mediator dan fasilitator guna penyelesaian masalah-masalah yang ada di Papua antara lain :

- Pelurusan sejarah integrasi Papua ke NKRI;
- Asal usul nama Irian (Papua Barat);
- Penegakan HAM dan pengusutan, yang dilanjutkan dengan pengadilan bagi pelaku yang melanggar HAM di Papua termasuk pelaku pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys Hiyo Eluay;
- Rehabilitasi sosial bagi para korban pelanggaran dan kejahatan HAM, baik langsung maupun keluarganya;
- Pendekatan keamanan termasuk tuduhan makar atas tokoh-tokoh Papua yang menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua II;
- Sabotase hak adat dan eksploitasi SDA yang merupakan hak dasar rakyat Papua seperti IHPHH, tambang, perikanan, hasil hutan, dan lain-lain.
- Tinggalkan cara-cara militeristik dan gantikan dengan pendekatan dialogis, menyangkut masalah DOM di Papua.

Sebagai suatu catatan, adalah penting untuk direnungkan realitas yang berkembang di rakyat mulai dari Port Sagawin sampai Port Numbay, bahwa rakyat Papua ingin berdialog bukan hanya untuk mendiskusikan otonomi khusus atau pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat menjadi 3 (tiga) provinsi, tetapi rakyat Papua ingin berbicara tentang masa depan rakyat dan bangsa Papua.

## B. KONGRES RAKYAT PAPUA II

Untuk dapat memahami semua permasalahan yang mendasar, patut dijelaskan pasca Kongres Rakyat Papua II, yang berlangsung dari tanggal 29

Mei s/d 4 Juni 2000 di Port Numbay, bagaimana nasib dan masa depan bangsa dan rakyat Papua, serta sikap dan kebijakan apakah yang harus diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta dalam merespon aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua.

Adanya tuntutan dan aspirasi rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI dapat muncul sebagai suatu kesadaran baru bahwa berbagai perlakuan yang sangat diskriminatif hanya dapat diselesaikan jika rakyat Papua memisahkan diri atau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ironisnya, untuk menghadapi kesadaran baru dari tuntutan merdeka ini, pemerintah Indonesia justru reaktif, bahkan disertai ancaman pengambilan tindakan kekerasan, misalkan menangkap, menahan dan mengadili tokoh-tokoh PDP, bahkan membunuh Ketua PDP Theys Hiyo Eluay. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah pusat gagal dalam memahami realitas politik pada masyarakat dengan derasnya aspirasi dan tuntutan merdeka. Realitas politik semacam itu menuntut adanya cara dan pendekatan khusus yang memberikan garansi kesejahteraan, kesetaraan dan kemakmuran bagi rakyat Papua.

Pemerintah pusat seharusnya mencari dan memecahkan akar permasalahan yang mengakibatkan munculnya aspirasi dan tuntutan merdeka, karena selama 38 tahun integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintah Indonesia sadar atau tidak sadar telah gagal melakukan beberapa hal antara lain :

1. Tidak tuntasnya masalah integrasi Papua dengan Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurang transparannya sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Pemerintah cenderung menutup-nutupi realitas

yang sebenarnya dari sejarah politik Papua sebagaimana termuat dalam pasal 18 New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, serta implikasi terhadap pelaksanaan Pepera tahun 1962

2. Pendekatan keamanan dan kekuasaan selama 32 tahun telah membuat rakyat Papua seakan-akan hidup di bawah rejim kolonialisme, karena adanya berbagai tindakan kekerasan seperti :
   a. Teror,
   b. Intimidasi,
   c. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer,
   d. Pemerkosaan,
   e. Pelanggaran HAM yang luar biasa.
3. Tidak adanya kesetaraan politik bagi rakyat Papua dan tidak ada ruang gerak untuk rakyat Papua dalam menentukan keputusan-keputusan politik Pemerintah Pusat mengenai dirinya
4. Monopoli sumber daya alam dan ekonomi oleh masyarakat pendatang (non Papua) menjadi salah satu faktor seperti yang terjadi di PT. Freeport Indonesia, Petrometren di Sorong dll.

Ditinjau dari sudut pandang hukum ketatanegaraan Indonesia tuntutan merdeka bagi rakyat Papua boleh dibilang *absurd*. Tetapi dari prespektif perubahan dan kondisi psikologi penduduknya tuntutan tersebut bisa dipahami.

Untuk itu, format dari reformasi pro demokrasi harus membuka peluang baru di dalam materi gugatan terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan kebijakan pemerintahan pada sistem yang lalu, termasuk dalam pelurusan sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Gugatan itu memang sudah

sampai dan menyentuh sendi-sendi keberadaan dan kebersamaan kita sebagai bangsa dan negara.

Adanya suatu pengakuan yang jujur atas pluralisme atau keanekaragaman masyarakat dan daerah, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk mengatur diri sendiri melalui *local self government* dan melaksanakan model pembangunan yang sesuai dengan kekhasannya. Keanekaragaman atau pluralisme dalam konteks ini dapat dipahami sebagai *"gewine engagement of diversities within the bonds of democracy"* (ikatan keanekaragaman yang sejati dalam bingkai demokrasi).

Secara politik, dampak dari kelambatan pemerintah pusat dalam menanggapi tuntutan dan aspirasi merdeka rakyat Papua sehingga muncul resolusi Kongres Rakyat Papua yang disertai dengan tuntutan untuk meninjau kembali status politik rakyat dan wilayah Papua Barat. Tuntutan tersebut bukanlah sekedar tuntutan belaka, melainkan memiliki rasionalitas yang sama yakni keinginan untuk ke luar dari suasana ketidakadilan ekonomi, politik dan budaya.

Sebab pada dasarnya di tengah masyarakat Papua telah muncul suatu kesadaran baru bahwa berbagai ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif hanya bisa dapat diselesaikan apabila rakyat Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.

Tuntutan merdeka bagi rakyat Papua adalah harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan lebih bersikap negarawan, terbuka, mencintai suasana yang melegakan dan menciptakan suasana demokrasi yang bersahabat bagi terwujudnya perdamaian dunia yang abadi dan bersahabat.

Merdeka dalam berbagai bentuk selalu mengandung arti 'pembebasan'. Dimensi pembebasan tersebut menekankan usaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan kekuatan dominan. Tujuan mengatasi ketergantungan pada kekuatan tersebut adalah untuk mengakhiri eksploitasi oleh kekuatan yang dominan.

Untuk membongkar dependensi dan menciptakan kedudukan yang setara bagi rakyat Papua dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, diperlukan aspek kemerdekaan yang disebut pembebasan dan emansipasi atau dengan perkataan lain, rakyat Papua membutuhkan pembebasan diri tapi sekaligus memperjuangkan 'emansipasi' mereka dalam rangka mengakhiri dominasi dan dependensi, sehingga setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.

## C. ARTI DIALOG

Untuk dapat menangkap segala persoalan yang sedang dan akan terus berlangsung, maka dipandang perlu dan sangat penting dialog nasional tentang Papua segera dilaksanakan. Lewat dialog akan terjadi komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dialog merupakan proses kesadaran dari sebuah peradaban, artinya salah satu tolok ukur dari sebuah pemerintah yang beradab adalah adanya proses dialog dalam mengatur sebuah bangsa. Pengaturan itu bukan saja meliputi dan mencakup hubungan kekuasaan tetapi juga mencerminkan bagaimana sebuah pemerintahan lewat proses dialog mampu memanusiakan sebuah kelompok masyarakat, dalam hal ini rakyat Papua, karena ukuran

pemerintahan yang mempunyai peradaban adalah :

a. Adanya nilai-nilai demokrasi;
b. Menghargai dan menghormati sesama warga bangsa;
c. Terjadinya proses dialog;
d. Menghargai hak dan martabat manusia.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa selama 38 tahun integrasi masyarakat dan wilayah Papua dengan NKRI, ternyata rakyat Papua berada dalam situasi tanpa dialog dan keterbukaan. Akibatnya banyak kali ditemui konflik antara rakyat dengan pemerintah yang selalu berakhir dengan:

a. Penindasan
b. Ketidakadilan
c. Kemelaratan
d. Kemiskinan dan kebodohan
e. Pertumpahan darah.
f. Adanya pengakuan secara jujur, transparan, dan demokratis sejarah politik awal integrasi papua dengan NKRI yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969) sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.
g. Harus ada penyelesaian yang menyeluruh atas pelanggaran dan kejahatan HAM di Papua, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan selama tiga dekade lebih berintegrasi
h. Presiden Megawati Soekarnoputri (pemerintah) hendaknya memfasilitasi penyelenggaraan dialog dan kerja sama pada tingkat nasional dan daerah untuk menampung berbagai sudut dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar dengan melibatkan seluruh unsur negara bangsa

di Papua baik formal maupun informal yang mewakili pluralisme agama, suku, ras dan kelompok-kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, rencana dialog yang telah dirancang oleh Kantor Mensesneg lewat Kantor Wapres pada pertemuan formal tanggal 28-29 Oktober 2000 lalu di Jakarta merupakan PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, karena dialog nasional tentang Papua merupakan salah satu agenda reformasi selain agenda-agenda lainnya.

## D. RESOLUSI

Fakta sejarah telah mencatat bahwa kenyataannya rakyat Papua telah sampai pada suatu titik kulminasi perjuangan, yaitu adanya suatu keyakinan yang sungguh bahwa cuma dengan memisahkan diri atas merdeka dari NKRI, maka perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang dirasakan dan dialami selama ini akan berakhir.

Untuk itu, langkah yang seharusnya diambil dalam rangka mengatasi masalah Papua adalah, pemerintah harus dapat memahami kenyataan masyarakat Papua secara terbuka, transparan dan demokratis, sehingga dapat menemukan titik temu antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia

Di dalam usaha untuk mencoba memahami kenyataan masyarakat Papua tidak pernah diagendakan oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk

memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan dan dialami masyarakat papua selama 40 tahun integrasi, sejak tahun 1962.

Usaha untuk merehabilitasi kembali tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam menyikapi aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua. Akibat ketidakperdulian dari Jakarta yang tidak mau memperhatikan dan memahami aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua, hanyalah memperlebar kesenjangan komunikasi. Dengan dalih untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga pemerintah RI menolak aspirasi dan tuntutan rakyat papua dengan label separatisme yang ditumpas dengan kekuatan senjata.

Sesungguhnya ada tiga faktor yang dapat mendorong masyarakat Papua Barat untuk terus menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Ketidakmampuan lembaga negara dalam menangkap sinyal yang ada di balik aspirasi dan tuntutan merdeka yang dapat disimbolkan melalui pengibaran bendera Bintang Kejora, karena ketidak percayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian kepada masyarakat Papua. Ketidak adilan dan perlakuan yang diskriminatif sangat merugikan dan dirasakan oleh masyarakat papua selama 40 tahun integrasi yaitu mulai dari era, Soekarno, Soeharto, B J. Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, dan pemerintah RI tidak mampu memberikan kesejahteraan, kedamaian, keadilan dan kesetaraan.
2. Para elite pemerintah RI hanya sibuk menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan bangsa, sehingga arena publik lebih diwarnai dengan pertarungan politik dari berbagai kubu dan aliran.

Masyarakat Papua, melalui aspirasi dan tuntutan untuk merdeka, dapat mengingatkan kita bahwa masalah bangsa bukan hanya kasus *Bulog gate*, *Brunai gate*, Bank Bali, Aceh, Tanjung Priok, Trisakti, Poso, Sambas, Maluku atauHAM di Timor Timur, tetapi juga masalah papua yang memerlukan adanya suatu penyelesaian yang serius dan konkrit.

3. Adanya perkembangan globalisasi yang ditandai dengan ekonomi pasar dunia, yang dapat mendorong berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat Papua Barat kembali bernaung di bawah panji tradisi dan solidaritas kesukuan, agama, golongan dan kedaerahan, untuk melakukan suatu perubahan.

Deskripsi istilah sosiolog Neil J. Smelser, yaitu bahwa telah terjadi semacam revolusi identitas diri. Perubahan mendasar telah terjadi, dimana batas-batas antara kelompok yang sebelumnya bersifat longgar, kini mungkin mengeras dalam batas-batas simbolik yang tak ternegosiasikan, dan pada akarnya telah terjadi pergeseran yang luar biasa dari kepentingan ekonomi ke penegasan identitas.

Jika untuk kepentingan ekonomi masih dimediasikan oleh berbagai bentuk kepentingan ekonomi, sepanjang dan selama sumber daya masih memungkinkan maka penegasan identitas diri lebih bersifat "Zero Sun Game" yang artinya setiap komponen masyarakat berdiri tegak dalam menegakkan identitasnya masing-masing, sehingga memporak-porandakan aturan-aturan hubungan antar manusia di arena publik.

Hal tersebut telah menggejala di Indonesia termasuk di Papua sehingga rakyat Papua Barat bangkit dan mempersoalkan integrasi dengan NKRI selama 40 tahun karena. Sejarah awal integrasinya dianggap telah di manipulasi dan

diabaikan.

Praktek serupa telah dirasakan dan dialami oleh rakyat Papua pada saat pelaksanaan Pepera 1969 yang melenceng jauh dari ketentuan pasal 18 New York Agreement tanggal 15 Januari 1962, yang seharusnya didasari pada prinsip *one man one vote* yang ternyata dibelokkan oleh pemerintah RI lewat Opsus Ali Moertopo (alm) menjadi sistem musyawarah untuk mufakat melalui, DMP sabagai sitem demokrasi Orde Baru pimpinan Soeharto. Bahkan tidak tanggung-tanggung, disertai dengan intimidasi, ancaman, kekerasan dan pelanggaran HAM rakyat Papua.

Di dalam penyelesaian masalah Papua, sikap diskriminatif merupakan suatu penerapan logika satu dimensi yang membuat Pemerintah Indonesia tidak mudah membedakan apakah suatu gerakan daerah itu merupakan gerakan separatis, ataukah gerakan pengembalian identitas lokal yang menjadi suatu keniscayaan sejarah.

Untuk itu, haruslah secara jujur diakui bahwa ada suatu kecenderungan bahwa pemerintah Indonesia bersikap diskriminatif, tidak adil dan tidak jujur dalam menyelesaikan masalah tuntutan Papua merdeka bagi rakyat Papua.

Sejarah telah membuktikan bahwa penyelesaian masalah Papua yang diskriminatif, tidak jujur dan tidak adil dapat membuktikan bahwa logika satu dimensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, dan bahwa proses subsidiari lewat dialog lebih akomodatif dan aspiratif.

Beranjak dari kenyataan tersebut diatas, maka tidaklah mengherankan jika masyarakat Papua berupaya keras untuk terus mengeliminasi bantuan eksternal bagi kemerdekaan papua Barat melalui jalur diplomasi politik ke negara-negara Eropa, AS, Asia dan Pasifik Selatan. Untuk itu menurut hemat saya, guna

penyelesaian persoalan Papua harus melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap dialog internasional dengan agenda utamanya antara lain:
   a. Pelurusan sejarah masuknya Papua Barat kedalam NKRI dan asal usul nama Papua Barat
   b. Penegakan HAM dan pengusutan terhadap para pelaku dengan mengadukan bagi mereka yang melanggar HAM di Papua
   c. Rehabilitasi sosial bagi para korban pelanggaran HAM.
2. Resolusi
   a. Segera membuka dialog internasional dengan menghadirkan pemerintah Belanda Indonesia, Amerika Serikat dan rakyat Papua Barat, dengan PBB sebagai mediatornya
   b. Referendum bagi rakyat Papua.



Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tanggal 1 Desember 1999.



Ketua dan Wakil Ketua PDP memasuki ruang sidang Kongres Rakyat Papua II pada pembukaan Kongres, tanggal 29 Mei 1999.



Jenazah Ketua PDP, Theys H. Eluay diusung dengan berjalan kaki sepanjang ± 45 km



Jenazah Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay diarak dari Jayapura menuju Sentani.

# DAFTAR PUSTAKA


1. Adrianto, Taufik Tuhana. *Mengapa Papua Bergejolak*, Yogyakarta: Gama Global Media, 2001,
2. Aka, Claude. *A Theory of Political Integration*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1967.
3. Anderson, Benedict. *Komunitas-komunitas Imajiner*. Renungan tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist, 1999.
4. _____. *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh – Jakarta – Papua*, YAPPIKA Yogyakarta, 2001 .
5. _____. *Bara Dalam Sekam*. Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik Lokal di Aceh – Maluku – Papua dan Riau, Tim Peneliti LIPI, Mizan Pustaka Kronik di Indonesia Baru, Kerja sama Kantor Menristek RI, 2001.
6. _____. *Bebaskan Irian Barat*. Kumpulan Pidato Presiden Soekarno tentang Pembebasan Irian Barat, 18 Agustus 1961 – 17 Agustus 1962.
7. Bahar, A. Saafroedin. *Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
8. Bahar, A. Saafroedin. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992.
9. Beanal, Tom. *Amungme Megaboard Negel Jombei Peinei*, Jakarta : Walhi, 1997.
10. Bhakti Ikrar Nusa, *Intervensi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat, Masalah Internasional Masa Kini*, Jakarta : LRKN, LIPI, 1985.

11. Boelaars, J. *Manusia Irian Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
12. Decky, N. Pigay BIK. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
13. Djopari, R. G. John. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
14. Meniagasi, Frans. *Masa Depan Papua Merdeka*. Otonomi Khusus dan Dialog, Jakarta: Millenium Publisher, 2001
15. Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. *Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia*, Puspa Swara untuk Pusat P3R – YSE, 2000.
16. Saraswati, Arimbi Adinda. *Sandera 130 Hari Terperangkap di Mapanduma*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
17. Subandrio, DR, *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku, 2001.
18. Yorrys TH Raweyai, *Dokumentasi VCD, "Mengapa Papua Ingin Merdeka"*, Presidium Dewan Papua (PDP), 2002.



# BIODATA PENULIS

**ORIGENES REAGEN IJIE, SE,** lahir di desa Wermit Teminabuan Sorong Papua tanggal 19 Oktober 1969.

**Pendidikan :**

- SD YPK Syalom Moswaren, tahun 1984.
- SMP Negeri 3 Sorong, tahun 1987.
- SMA YPPK St. Agustinus Sorong, tahun 1990
- Sarjana Muda Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, tahun 1994.
- Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih Jayapura, tahun 2001.

**Pengalaman kerja :**

- Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sorong, tahun 1996 – sekarang,
- Direktur CV. Sumber Mandiri, tahun 2000 – sekarang.

**Pengalaman Organisasi :**

- Ketua V Ikatan Mahasiswa Sorong di Sulawesi Utara, tahun 1991 – 1992.
- Koordinator Kampus I Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Unsrat Manado, tahun 1990 – 1993.
- Sekretaris IV Ikatan Mahasiswa Indonesia Irian Jaya Sulawesi Utara, tahun 1993 – 1995.

- Wakil Ketua Pemuda Gereja Baptis Anugerah Indonesia Wilayah I Sorong, tahun 1995 - 2000.
- Ketua Bidang Keuangan Jemaat Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Sinai Sorong, tahun 2001 – 2004.
- Ketua Panitia Konfercab Partai Buruh Sosial Demokrat Kota/Kabupaten Sorong, tahun 2002.
- Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Partai Buruh Sosial Demokrat Kota Sorong, tahun 2002 – 2007.
- Ketua Delegasi Kota Sorong dalam Tim 315 orang untuk Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, tahun 2002.
- Anggota Tim Penyusunan Kajian Prospek Provinsi Irian Jaya Barat.
- Koordinator Irian Jaya *Crisis Center* Daerah Kota Sorong.
- Wakil Ketua I DPD PBSD Provinsi Papua, tahun 2002 – 2007.
- Koordinator Wilayah III Kepala Burung (Irian Jaya Barat) Partai Buruh Sosial Demokrat, tahun 2002 - 2007.



AM 0162430 Code I-2004-336715

37 HARVARD LAW SCHOOL

Pada akhirnya, rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan dan dialami masyarakat Papua selama 40 tahun integrasi, sejak tahun 1962.

Usaha untuk merehabilitasi kembali tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam menyikapi aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua.

ISBN 979-95553-3-7